PANDUAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

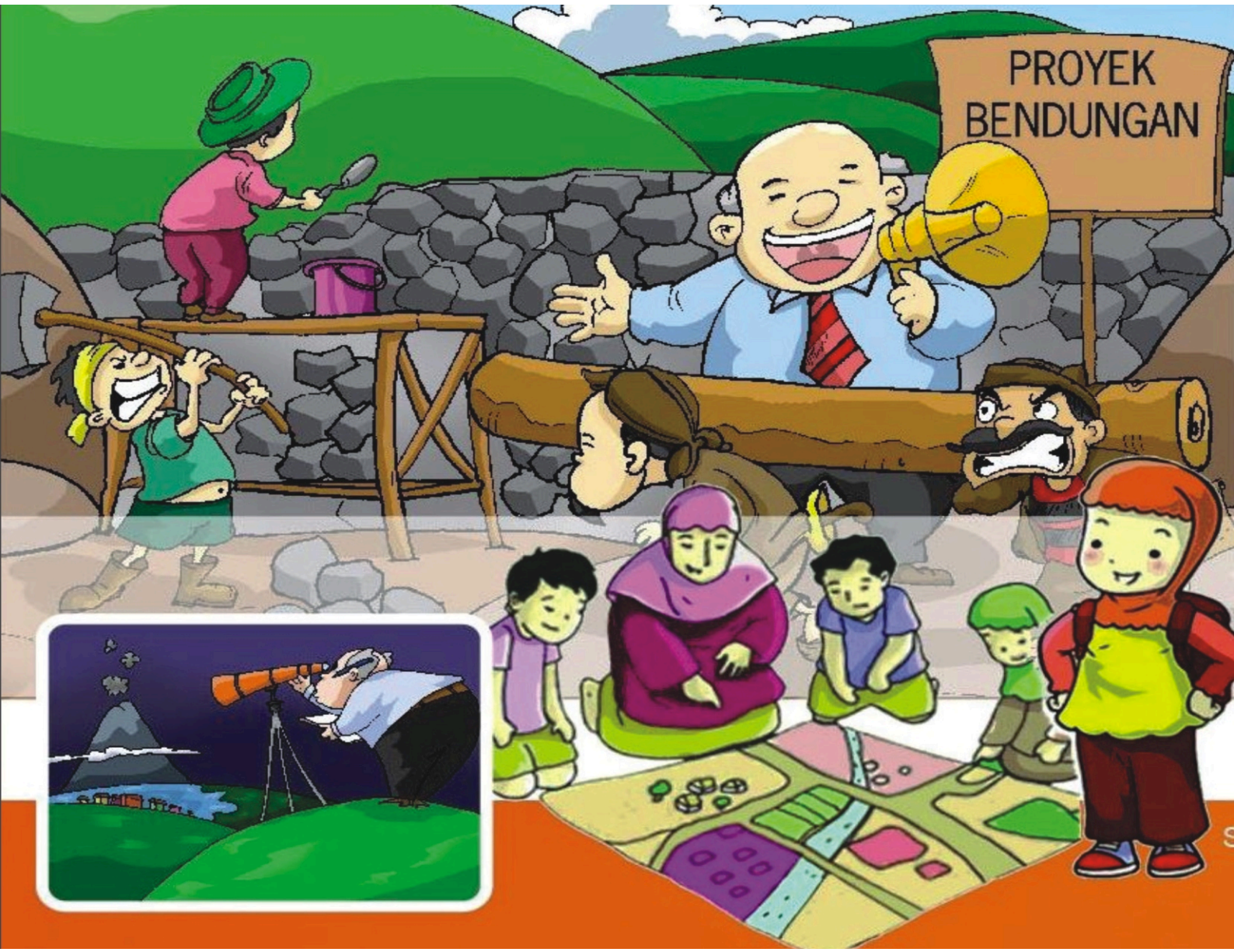

Editor ahli:
Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah

Penyusun / Kontributor:
Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Amin Magatani, Juni Pristianto, Catur Sudira, & Hening Parlan

Editor bahasa: Theresia Wuryantari

Tata Letak: Koko Sudarmo @1942

Panduan ini disusun dan diterbitkan oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan dukungan PSMB, Lingkar, dan UNDP-SCDRR. Panduan versi bahasa Inggris diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia dengan dukungan APADM dan Planas

2014

PANDUAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

BUKU
1
PENTINGNYA PRBBK

BUKU
2
TEKNIK DAN ALAT PRBBK

Editor ahli:
Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah

Penyusun / Kontributor:
Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Amin Magatani, Juni Pristianto, Catur Sudira, & Hening Parlan

Editor bahasa: Theresia Wuryantari

Tata Letak: Koko Sudarmo @1942

Panduan ini disusun dan diterbitkan oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan dukungan PSMB, Lingkar, dan UNDP-SCDRR. Panduan versi bahasa Inggris diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia dengan dukungan APADM dan Planas

2014

PRAKATA

Panduan ini merupakan manifestasi mandat Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MBPI) dalam mendukung kerja-kerja lembaga-lembaga di Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Sebagai sebuah organisasi yang tidak bekerja langsung di lapangan, peran terbaik yang bisa diambil MPBI adalah memfasilitasi proses untuk menggali praktik-praktik unggulan dan alat-alat yang digunakan dalam praktik-praktik PRBBK dan menyebarkannya melalui Konferensi Nasional PRBKK yang diselenggarakan oleh MPBI setahun sekali.

Selama sepuluh tahun terakhir dalam penyelenggaraan Konferensi ini terlihat bahwa pertukaran praktik-praktik PRBBK di lapangan selama konferensi telah membantu untuk membangun kesepakatan tentang nilai-nilai, hasil-hasil, tujuan-tujuan, dan strategi-strategi PRBBK. Dari kerja-kerja yang sporadis dan sektoral yang diarahkan oleh visi dan misi perorangan, banyak lembaga saat ini telah mengubah pendekatannya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih holistik, termasuk dalam memilih metode-metode dan alat-alat untuk kerja-kerja PRBBK dengan menggunakan alat-alat yang partisipatif seperti penelusuran desa secara partisipatif (*participatory rural appraisal*/PRA), pengkajian aksi partisipatif (*participatiory action reseach*/PAR), dan penelusuran desa secara cepat (*rural rapid appraisal*/RRA).

Panduan ini diharapkan akan bisa digunakan untuk membantu para praktisi PRBBK dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap risiko bencana dengan bertahan terhadap ancaman-ancaman bahaya dan menangani isu-isu terkait kapasitas dan kerentanan. Ini artinya membangun kapasitas untuk menggerakkan sumber daya kolektif masyarakat untuk mengelola risiko bencana daripada membangun ketergantungan mereka pada bantuan dan dukungan luar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor dan penyunting yang bersama-sama mewujudkan panduan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional Jogjakarta (PSMB UPN) dan Perkumpulan Lingkar Jogjakarta, dan SCDRR - UNDP yang telah berperan dalam menyunting dan menerbitkan edisi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas) dan Asia Pacific Alliance for Disaster Management (APADM) yang telah mendukung penerjemahan panduan ini ke dalam Bahasa Inggris.

Mari kita pertahankan kerja-kerja yang telah kita lakukan!

DR. Eko Teguh Paripurno
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

DAFTAR ISI

PRAKATA

DAFTAR ISI

BUKU 1
PENTINGNYA PRBBK

1. Pentingnya PRBBK
1.1. Pengantar
1.2. Definisi Penanggulangan Bencana
1.3. Pengurangan Risiko Bencana
1.4. Definisi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
1.5. Kerangka Aksi Hyogo Dan Pengurangan Risiko Bencana

2. Pendekatan Berbasis Komunitas
2.1. Definisi Komunitas
2.2. Definisi Berbasis Komunitas
2.3. Pembenaran Pendekatan Berbasis Komunitas
2.4. Peran Masyarakat: Titik Berat **PRBBK**

3 Kerangka Hukum PRBBK
3.1. Peran Komunitas dalam Kerangka Hukum

4. Karakteristik dan Kecirian PRBBK
4.1. Partisipasi Komunitas dalam Pengeloaan Risiko Bencana
4.2. Kecirian Umum PRBBK

5. Sistematika PRBBK
5.1. Sistematika
5.2. Tahapan Kerja
5.3. Keberlanjutan PRBBK

6 PRBBK Di Indonesia
6.1. Pelembagaan PRBBK Di Indonesia
6.2. Nilai Dan Prinsip
6.3. Kode Etik Praktisi
6.4. Strategi Pengakhiran (*Exit Strategy*) PRBBK
6.5. Audit PRBBK: Input Dari HFA

Kotak 1 Sejarah PRBBK Di Indonesia
Kotak 2 PRBBK dan Konteks PB di Indonesia
Kotak 3 Contoh Kasus Kearifan Lokal
Kotak 4 Contoh Inisiatif PRBBK Dalam Kerangka Hukum Lokal

Gambar 1.1 PRBBK, Pilar PRB di Indonesia
Gambar 2.1 Tingkat Partisipasi Rakyat
Gambar 5.1 Proses PRBBK
Gambar 5.2 Proses Manajemen Risiko

Tabel 1 Perbandingan Pendekatan PRBBK Dan Konvensional PB

BUKU 1
TEKNIK DAN ALAT PRBBK

1. Teknik Fasilitasi
1.1. Arti Fasilitasi
1.2. Nilai-Nilai Dasar Fasilitasi
1.3. Tujuan Fasilitasi
1.4. Prinsip-Prinsip Fasilitasi
1.5. Langkah-Langkah Fasilitasi
1.6. Syarat untuk Menjadi Fasilitator

2 Alat-Alat Riset Partisipatif
2.1. Pengantar
2.2. Pemetaan
2.3. Alur Sejarah
2.4. Kalender Musim
2.5. Wawancara
2.6. Analisis Mata Pencaharian
2.7. Sketsa Kebun
2.8. Aktivitas Keluarga
2.9. Matriks Pemeringkatan
2.10. Transek
2.11. Analiasis Penghidupan Berkelanjutan
2.12. Analisis Pelaku
2.13. Analisis Sumber Daya
2.14. Peta Pikiran
2.15. Analisis Bahaya, Kerentanan, dan Kapasitas (ABKK)
2.16. Alat-Alat Lain

3 Pengorganisasian Komunitas
3.1. Pengorganisasian Komunitas
3.2. PRBBK Sebagai Perencanaan Sosial
3.3. PRBBK untuk Rencana Aksi Komunitas
3.4. Proses Pengorganisasian Komunitas

Gambar 1.1 Tingkat Fasilitasi
Gambar 2.1 Ilustrasi Dimensi dan Hasil Interaksi Kualitatif-Kuantitatif
Gambar 2.2 Peta Partisipatif Kawasan Longsor Sijeruk

Gambar 2.3 Kalender Penghasilan masyarakat
Gambar 2.4 Transek Kampung Marsinam, Papua Barat
Gambar 2.5 Ilustrasi Tren Perubahan Aset dalam 5 Tahun Terakhir di Desa Toineke
Gambar 2.6 Daftar Periksa Penelusuran Sistem Penghidupan Masyarakat
Gambar 2.7 Capital Asset yang berpotensi hilang atau bertambah sebelum, ketika, dan setelah bencana
Gambar 2.8 Pengaruh dan Dampak Kuasa
Gambar 2.9 Peta pikiran
Gambar 2.10 Hubungan Intensitas Ancaman dan Tingkat Keseringan Kejadian
Gambar 2.11 Kerentanan Berbasis Gender
Gambar 2.12 Kerentanan Berbasis Klas

Tabel 2.1 Keterampilan dasar untuk fasilitator PRBBK
Tabel 2.2 Sejarah Pangan Dusun Ngemplak Parangtritis
Tabel 2.3. Pemetaan Stakeholder PRBBK di Desa X
Tabel 2.4. Contoh Matrik Analisis Sumber Daya PRBBK
Tabel 2.5. Contoh Matrik Modal dasar PRBBK
Tabel 2.6. Contoh Matriks Analisis Ancaman
Tabel 2.7. Tingkat Risiko dengan Basis Ancaman (Desa Ie Rhop)
Tabel 3.1. Pokok-pokok pikiran dalam pengorganisasisan komunitas
Table 3.2. Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas

DAFTAR ISTILAH PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR PUSTAKA

PANDUAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

BUKU
1
PENTINGNYA PRBBK

Editor ahli:
Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah

Penyusun / Kontributor:
Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Amin Magatani, Juni Pristianto, Catur Sudira, & Hening Parlan

Editor bahasa: Theresia Wuryantari

Tata Letak: Koko Sudarmo @1942

Panduan ini disusun dan diterbitkan oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan dukungan PSMB, Lingkar, dan UNDP-SCDRR. Panduan versi bahasa Inggris diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia dengan dukungan APADM dan Planas

2014

1

PENTINGNYA PRBBK

1.1. PENGANTAR

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah salah satu pilar penting dalam upaya pengelolaan risiko bencana saat ini. PRBBK umum diterima oleh kalangan ahli bencana karena selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural/fisik semata dan fokus pada kedaruratan serta pendekatan yang *top-down* yang jarang memberikan hasil pada ranah pengurangan risiko bencana (PRB) yang berkelanjutan. PRBBK memberikan jawaban yang mencakup beberapa prinsip seperti efisiensi karena idealnya memiliki biaya transaksi rendah karena adanya asupan lokal maksimum dan asupan eksternal minimum. Yang menjadi argumentasi panduan ini adalah bahwa ukuran-ukuran keberlanjutan seperti efektifitas, legitimasi (partisipasi), dan kesetaraan (*equality*) terpenuhi, sehingga menjamin keberlanjutan bila beberapa prosedur yang ditawarkan mampu dipenuhi.

PRBBK sejatinya adalah praktik lama yang kemudian dilembagakan dengan pengetahuan dan konsep yang lebih sistematis. Pada studi sejarah bencana maupun studi antropologi bencana (Oliver-Smith & Hoffman, 1999), ada banyak kasus menarik yang layak dipelajari, bagaimana pelembagaan untuk pengetahuan tentang mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah berusia ratusan tahun dan terus dipraktikkan hingga hari ini.

1.2. DEFINISI PENANGGULANGAN BENCANA

Strategi Internasional PBB untuk Pengurangan Bencana (*United Nations International Strategy for Disaster Reduction*/UNISDR) (2009) mendefinisikan bencana sebagai "gangguan serius terhadap masyarakat atau komunitas yang menyebabkan terjadinya kehilangan jiwa, kerugian ekonomi, dan lingkungan secara luas, yang melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak untuk menghadapinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri."

Penanggulangan bencana adalah sebuah proses sistematis dengan menggunakan keputusan administratif, organisasi, keterampilan operasional, kapasitas implementasi, strategi, dan kapasitas dari masyarakat dalam mengurangi dampak dari ancaman alam, lingkungan, maupun bencana teknologi. Hal ini meliputi segala kegiatan, termasuk ukuran-ukuran struktural/non-struktural dalam mengurangi ataupun membatasi (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak dari bencana yang mungkin timbul.

Gambar 1.1: PRBBK, Pilar PRB di Indonesia

Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, istilah di atas disamarkan dalam istilah: Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang menyebabkan timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Makna penanggulangan bencana (PB) telah mengalami evolusi seiring dengan berjalannya waktu. Dalam kategorisasi yang mutakhir, istilah "penanggulangan bencana" sering diartikan sebagai paradigma lama yang merespons bencana secara reaktif, sering dipadankan dengan terminologi pengelolaan kedaruratan.

Kalangan awam (dan tentunya sebagian literatur bencana yang lama) kerap menyamakannya dengan pengelolaan risiko bencana atau *disaster risk management* (DRM), namun penyamaan ini merupakan sebuah penyederhanaan yang tidak tepat serta tidak menghargai perkembangan konseptual tentang bencana itu sendiri. Istilah seperti DRM sebenarnya telah populer dalam studi-studi bencana di Amerika Serikat pasca 1970-an (seperti Delaware University Centre for Disaster Study). Pengurangan risiko total pada dasarnya adalah penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan manajemen atau pengelolaan risiko bencana; yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. Pengelolaan risiko bencana merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang berfokus pada pengurangan ancaman dan potensi kerugian dan bukan pada pengelolaan bencana dan konsekuensinya.

Prinsip kehati-hatian dimulai dengan mencermati setiap bagian kegiatan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keberadaan aset penghidupan dan jiwa manusia. Ancaman tersebut perlahan-lahan maupun tiba-tiba akan berpotensi

menjadi sebuah bencana, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan lingkungan. Kejadian ini terjadi di luar kemampuan adaptasi masyarakat dengan sumber-dayanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dipahami potensi risiko yang mungkin muncul, yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan hilangnya (jiwa, korban, kerusakan dan kerugian ekonomi) yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Risiko yang biasanya dihitung secara matematis, merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya. Jika potensi risiko pada pelaksanaan kegiatan jauh lebih besar dari manfaatnya, kehati-hatian perlu dilipat-gandakan. Upaya mengurangi kerentanan yang melekat, yaitu sekumpulan kondisi yang mengarah dan menimbulkan konsekwensi (fisik, sosial, ekonomi dan perilaku) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan pengelolan risiko bencana.

Upaya-upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan (*prevention*) terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Untuk mencegah banjir perlu upaya untuk mendorong usaha masyarakat membuat sumur resapan, dan sebaliknya mencegah penebangan hutan. Agar tidak terjadi kebocoran limbah, perlu disusun prosedur keselamatan dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Walaupun pencegahan sudah dilakukan, sementara peluang adanya kejadian masih ada, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (*mitigation*), yaitu upaya-upaya untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Upaya-upaya di atas perlu didukung dengan upaya kesiagaan (*preparedness*), yaitu melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siaga. Misalnya, penyiapan sarana komunikasi, pos komando dan penyiapan lokasi evakuasi. Di dalam usaha kesiagaan ini juga dilakukan penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*), yaitu upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa

bencana kemungkinan akan segera terjadi. Termasuk dalam contoh upaya ini adalah pembuatan perangkat yang akan menginformasikan ke masyarakat apabila terjadi kenaikan kandungan unsur yang tidak diinginkan di sungai atau sumur di sekitar sumber ancaman. Pemberian peringatan dini harus (1) menjangkau masyarakat (*accesible*), (2) segera (*immediate*), (3) tegas tidak membingungkan (*coherent*), (4) bersifat resmi (*official*).

Pada akhirnya jika bencana dari sumber ancaman terpaksa harus terjadi, harus dilakukan tindakan tanggap darurat (*response*), yaitu upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan dan mengurangi dampak lebih besar, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda. Secara sinergis juga diperlukan bantuan darurat (*relief*), yaitu upaya memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa : pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi dan air bersih.

Agar dampak tidak berkepanjangan, proses pemulihan (*recovery*) kondisi lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak/bencana dimulai dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan bukan sekedar memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar puskesmas, dll) tetapi termasuk fungsi-fungsi ekologis. Upaya tersebut, dalam jangka pendek umumnya terdiri dari usaha rehabilitasi (*rehabilitation*), yaitu upaya untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian dan fungsi ekologis setelah bencana terjadi. Penyelesaian masalah lingkungan sejauh ini hanya melakukan tindakan fisik ini, yang umumnya belum menyentuh rehabilitasi fungsi ekologis. Selanjutnya rekonstruksi (*reconstruction*) merupakan upaya jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya.

1.3. PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Dalam perkembangannya secara global, sejak dikumandangkannya dekade internasional pengurangan bencana (*International Decade for Natural Disaster Risk*/IDNDR) yang kemudian dilanjutkan oleh strategi internasional pengurangan bencana (*International Strategy for Disaster Reduction*/ISDR), muncul istilah pengurangan risiko bencana (PRB) yang lebih memberikan pesan menguatkan penanggulangan bencana pada aspek antisipatif, preventif, dan mitigatif. Pada saat yang bersamaan terminologi-terminologi seperti Penanggulangan bencana tidak lagi populer dan menjadi bagian dari status quo.[1]

Definisi UNISDR menjadi acuan otoritatif tentang makna PRB. Dalam kumpulan istilah yang diterbitkan tahun 2009, PRB didefinisikan sebagai konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikuranginya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan.

Komponen-komponen utama PRB meliputi: 1) Kesadaran tentang dan penilaian risiko, termasuk di dalamnya analisis ancaman serta analisis kapasitas dan kerentanan; 2) Pengembangan pengetahuan termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian, dan informasi; 3) Komitmen kebijakan dan kerangka kelembagaan, termasuk organisasi, kebijakan, legislasi, dan aksi komunitas (yang bisa diterjemahkan di sini sebagai pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK)); 4) Penerapan ukuran-ukuran PRB seperti pengelolaan lingkungan, tata guna lahan, perencanaan perkotaan, proteksi fasilitas-fasilitas penting (*critical facilities*), penerapan ilmu dan teknologi, kemitraan dan jejaring, instrumen keuangan; dan 5) Sistem Peringatan Dini termasuk di dalamnya prakiraan, sebaran peringatan, ukuran-ukuran kesiapsiagaan, dan kapasitas respons (UNISDR,

[1] *Encyclopedia of International Development*, Edisi I, 2006.

2004).

1.4. DEFINISI PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/ pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Namun pokok dari keduanya adalah penyelenggaraan yang seoptimal mungkin memobilisasi sumber daya yang dimiliki dan yang dikuasainya serta merupakan bagian integral dari kehidupan keseharian komunitas (Paripurno, 2006a). Pemahaman ini penting, karena masyarakat akar rumput yang berhadapan dengan ancaman bukanlah pihak yang tak berdaya sebagaimana dikonstruksikan oleh kaum teknokrat. Kegagalan dalam memahami hal ini berakibat pada ketidakberlanjutan pengurangan risiko bencana di tingkat akar rumput. Bila agenda-agenda pengurangan bencana tidak lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan.

Masih banyak pendefinisian lain yang dikemukakan oleh para pelaku PRBBK berdasarkan pengalamannya. Meski demikian, secara keseluruhan mengarah pada pemaknaan yang cenderung sama. Berikut ini bisa kita lihat beberapa definisi tersebut antara lain Pribadi (2008), menggunakan PRBBK dengan definisi sebagai suatu proses pengelolaan risiko bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanannya dan meningkatkan kemampuannya. Definisi lainnya PRBBK adalah kerangka kerja pengelolaan bencana yang inklusif berkelanjutan di mana masyarakat terlibat atau difasilitasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan bencana (perencanaan,

implementasi, pengawasan, evaluasi) dengan input sumber daya lokal maksimum dan input eksternal minimum. PRBBK juga didefinisikan sebagai upaya pemberdayaan komunitas agar dapat mengelola risiko bencana dengan tingkat keterlibatan pihak atau kelompok masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya lokal dalam kegiatan implementasi oleh masyarakat sendiri (Abarquez & Murshed, 2004).

Kotak 1
SEJARAH PRBBK DI INDONESIA

Belum ada riset sosial khususnya dari aspek sejarah PRBBK. Adopsi pertama khususnya dalam konteks Gunung api Merapi di Yogyakarta, secara embrionik di mulai sejak tahun 1994 yang diawali dengan membaca perilaku masyarakat Merapi yang selamat dari peristiwa letusan Gunung api Merapi di tahun 1994. Para aktivis di Kappala (Komunitas Pencinta Alam dan Pemerhati Lingkungan) Indonesia kemudian melakukan pembelajaran sendiri dan konseptualisasi sendiri atas kerja-kerja mereka bersama komunitas Merapi.

Munculnya istilah CBDM (*Community Based Disaster Management*) relatif baru dimulai di tahun 1996-1998. Dari persinggungan dengan aktor-aktor PRB internasional seperti Oxfam yang berbasis di Yogyakarta, beberapa tokoh Kappala seperti Dr. Eko Teguh Paripurno dan peneliti di UPN Veteran Yogyakarta, pertama kali menerbitkan buku tentang Participatory Rural Appraisal (PRA) untuk penanggulangan Bencana.

Lain halnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, PRBBK muncul awalnya sebagai sebuah gerakan yang bertepatan dengan peristiwa El-Nino di tahun 1998, di mana Pusat Informasi Rawan Pangan (PIRP) memulai pengumpulan informasi serta melakukan berbagai riset-riset sosial untuk menanggapi masifnya respon internasional dan pemerintah dalam hal pengadaan pangan yang justru merusak sendi-sendi pertahanan dan penyesuaian lokal. Peristiwa pengungsian dari Timor Leste ke Timor Barat, berbarengan dengan berbagai rentetan bencana di Timor Barat sejak tahun 1999. PIRP yang kemudian berubah nama menjadi Forum Kesiapan dan Penanggulangan Bencana (FKPB) mulai secara serius beralih pada diskursus PBBK. Istilah PBBK sendiri di NTT di mulai sejak tahun 1998, tepatnya saat pertama kali beberapa kader PIRP/FKPB mengikuti pelatihan CBDM di Bangkok Thailand dan Filipina. Menurut catatan kami, setidaknya dalam tahun 1998-2000, tiga orang staf FKPB di Kupang mengikuti training di ADPC (*Asian Disaster Preparedness Center*) Bangkok.

Hal ini memberikan indikasi bahwa ADPC Bangkok pada awalnya menjadi knowledge hub yang mentransmisikan pengetahuan dan modul-modulnya yang kemudian di NTT digunakan dalam training-training LSM. Training PBBK pertama di NTT dilakukan oleh Oxfam GB tahun 2000 dengan peserta dari Indonesia Timur termasuk Maluku. Dengan membawa serta pengalaman Merapi, para fasilitator dan pelatih PRBBK seperti Eko Teguh Paripurno yang 10 tahun kemudian memenangkan penghargaan Sasakawa Award dari *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* di Genewa tahun 2009.

Sejarah singkat ini tidak hanya mengindikasikan bagaimana pengalaman PRBBK di Gunung api Merapi yang bukan hanya melahirkan para tokoh seperti Almarhum Mbah Maridjan, dan segenap komunitas Paguyuban Siaga Merapi (PASAG) Merapi yang kebijaksanaan mereka coba kami konseptualisasikan, tetapi juga menggambarkan bagaimana potret menyebarnya pengetahuan dari Merapi, NTT, hingga ke Maluku dan Maluku Utara, ke Aceh dan Papua, Sulawesi Utara. Sinyalemen bahwa PRBBK adalah hasil impor tidak sepenuhnya benar. Pengetahuan PRBBK ini praktisnya adalah sintesa pengalaman lapangan dan ilmu pengetahuan pada umumnya. (Jonatan Lassa)

1.5. KERANGKA AKSI HYOGO DAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pada Konferensi Dunia untuk Pengurangan Bencana di Kobe, Jepang, 2005,168 negara, termasuk pemerintah Indonesia beserta masyarakat internasional menyepakati sebuah strategi PRB yang berjangka waktu 10 tahun, yaitu Kerangka Aksi Hyogo 2005–2015, *Hyogo Framework for Action* (HFA).

HFA menetapkan tiga tujuan strategis dan lima prioritas aksi yang mencakup bidang-bidang utama PRB. Kerangka aksi ini juga memberi saran akan bidang-bidang penting yang membutuhkan intervensi dalam setiap tema (lihat Lampiran 2).

Berdasarkan kategori-kategori HFA, dua badan PBB telah mengembangkan indikator-indikator PRB, terutama untuk tingkat nasional. Indikator-indikator inilah yang menjadi acuan untuk mengukur tingkatan implementasi PRB di suatu negara.

Kotak 2
PRBBK DAN KONTEKS PB DI INDONESIA

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) yang diikuti dengan diundangkannya beberapa peraturan pelaksanaan di tahun 2008, memberikan berbagai pertanda membaiknya penanggulangan bencana di Indonesia di tingkat regulasi. Hal tersebut patut kita hargai, terlepas dari masih adanya kekurangan seperti hambatan internal birokrasi di semua tingkat yang tidak efisien, proses pembuatan kebijakan yang top-down dan yang tidak berbasis hak. Di lain pihak, UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) yang mensyaratkan

dimasukkannya perencanaan tata ruang berbasis bencana dengan pendekatan partisipatif, semakin memberikan angin segar bagi komunitas PRB di Indonesia. Belajar dari banyak inisiatif saat ini di Indonesia ada banyak uji coba pemetaan partisipatif masyarakat dalam desain tata ruang dan tata guna lahan.

Pelaksanaan PRBBK di Indonesia dalam gambaran besarnya masih mencari bentuk di konteks lokal. Berbagai inisiatif membangun, 'desa tangguh', 'desa siaga', 'kampung siaga bencana, 'mukim daulat bencana', hingga rentetan nama lainnya, masih dalam taraf proyek percontohan dari berbagai versi organisasi non pemerintah maupun pemerintah dan donor. Semuanya masih dalam tahap mencari bentuk yang terbaik.

Inisiatif-inisiatif terdahulu seperti dalam konteks masyarakat lereng Gunung api Merapi, keberlanjutan praktik PRBBK menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tetapi dari berbagai pembelajaran (*lessons learned*) di beberapa tempat lainnya uji coba PRBBK mengalami mati muda karena ketidakberlanjutan program dan proyek.

Mortalitas PRBBK tentunya bisa didiagnosis secara memadai. Mortalitas PRBBK salah satunya disebabkan oleh faktor kelahirannya yang prematur karena investasi waktu dan sumber daya lokal serta pengetahuan yang terbatas. Kebanyakan inisiatif PRBBK datang dan diikat oleh 'waktu donor' atau 'waktu proyek' yang mampat dan tidak terhubungkan dengan 'waktu sosial' yang lebih longgar dalam konteks keseharian komunitas.

Di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gambaran yang lebih utuh tentang inisiatif-inisiatif PRB di Indonesia dari Aceh hingga Papua bisa ditemukan. Selain merupakan tugas BNPB, tentunya penting dipahami bahwa inisiatif-inisiatif PRB yang didokumentasikan merupakan bagian dari komitmen bersama tingkat global khususnya dalam *Hyogo Framework for Action*. (Jonatjan Lassa)

2

PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS

2.1. DEFINISI KOMUNITAS

Visi tentang komunitas berbeda-beda, karenanya, definisi tentang komunitas sangat beragam, berkarakter jamak dan tidak homogen.[2] Pertanyaan tentang apakah definisi komunitas, telah lama diajukan dalam studi sosial. Dan terdapat banyak tulisan yang membahas definisi berbeda tentang komunitas. Misalnya, Philip Alperson (2002), menulis ulang pengertian awal tentang "komunitas organik"—dengan hierarki alamiah yang berasosiasi feodal dan kuno, bersifat hierarki, dengan basis stratifikasi sosial seperti jender, kasta, kelas yang dikonstruksikan 'alamiah' dan sudah diatur "dari atas".[3]

Komunitas bisa merupakan suatu kumpulan dan tatanan yang disebut sebagai "paguyuban" dengan suatu nilai "kekerabatan" seperti kesetiakawanan, komitmen, imbal balik, dan kepercayaan (Koentjaraningrat, 1987); atau juga kategori deskriptif atau seperangkat variabel: tempat, minat, keterikatan, atau kemanunggalan (Frazer, 1999). Variabel-variabel ini dapat bersifat simbolik sebagai sumber daya dan tempat penyimpanan dari makna-makna dan acuan untuk identitas mereka (Cohen, 1985).

[2] Lihat kompilasi definisi oleh Jerry Hampton di http://www.community4me.com/comm_definitions.html [diakses 1 Mei 2009).
[3] Lihat halaman 3. Juga lihat definisi-definisi lainnya dalam Philip Alperson, 2002,"Diversity and community: an interdisciplinary reader." Wiley-Blackwell.

Bagaimana suatu komunitas dibedakan antara satu dengan yang lainnya? Anggota-anggota suatu komunitas mempunyai suatu kesamaan seperti kesamaan wilayah, satuan hukum, karakteristik lahiriah, atau bahasa. Kesamaan itu secara signifikan membedakan mereka dari anggota komunitas yang lain. Ada suatu garis bersifat maya yang membatasi suatu komunitas dari komunitas lainnya.

Norma-norma atau adat apa sajakah yang ikut terlibat di dalamnya? Ada tiga norma dasar, yaitu toleransi (rasa keterbukaan terhadap sesama anggota komunitas, rasa hormat, dan kemauan untuk mendengarkan dan belajar satu sama lain); timbal balik (rasa kesediaan untuk menolong, altruisme tanpa pamrih—kalaupun ada mungkin berjangka panjang); dan kepercayaan (bahwa orang dan lembaga dalam komunitas akan berperilaku secara konsisten, jujur, dan patut).

Dalam bahasa yang lain, komunitas juga diikat oleh "modal sosial" yang digambarkan oleh Putnam (2000), sebagai keterhubungan antarindividu, yakni jejaring-jejaring sosial (*social networks*) dan hubungan timbal balik (*reciprocity*) dan saling percaya. Contohnya, komunitas satu desa yang tinggal pada lingkungan geografis yang sama, terekspos pada ancaman (hazard) dan risiko bencana yang berulang—memiliki pengalaman krisis yang sama: kesamaan risiko memberi peluang meningkatnya rasa senasib sepenanggungan (Lassa, 2007).

Tentunya terminologi modal sosial tidak sesederhana definisi di atas. Baik desain maupun pelaksanaan PRBBK hanya bisa langgeng bila agen-agen eksternal (seperti fasilitator PRBBK, LSM, pemerintah, dsb.) memahami formasi dan dinamika modal sosial yang ada di tingkat komunitas; ditambahkan bahwa modal sosial tidak selalu bergerak ke arah yang positif demi pengurangan risiko.

Karena komunitas bukanlah satuan yang homogen namun mempunyai beberapa kesamaan pengalaman dalam relasi dengan alam dan fenomena alam, memiliki

dan mereproduksi "pengetahuan lokal" dalam menghadapi peristiwa ekstrem yang kemudian disebut sebagai PRBBK. Konsekuensinya, tidak ada konsep tunggal PRBBK dan tidak bisa dipaksakan PRBBK yang homogen dalam konteks Indonesia yang bhinneka.

Pemaknaan komunitas itu sendiri berdimensi jamak. Secara geografis bisa berarti "sekelompok rumah tangga", "sebuah desa kecil", ataupun "sebuah kota besar". Secara sektoral dan subsektoral bisa berarti petani (petani karet, padi), kelompok bisnis, peternak, atau pelaut. Berdasarkan pengalaman aktual, kebersamaan bisa berarti kelompok etnis, profesional tertentu, bahasa, maupun umur. Atau, bermakna sekelompok orang dengan perasaan senasib sepenanggungan dalam menghadapi atau mengalami peristiwa ancaman bencana tertentu (bisa dalam keterbatasan atau melampaui geografis).

2.2. DEFINISI BERBASIS KOMUNITAS

Maksud konsep "berbasis komunitas" adalah bahwa pekerjaan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh dan bersama dengan komunitas di mana mereka berperan kunci sejak perencanaan, desain, penyelenggaraan, pengawasan, hingga evaluasi program. Disepakati bahwa dalam konsep ini komunitas adalah pelaku utama yang membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan penting sehubungan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara empiris, dalam banyak kasus, cerita, sejarah, atau peristiwa, manusia adalah makhluk yang berupaya menyelesaikan krisis-krisis yang dihadapinya. Beberapa komunitas di dunia, sudah lama akrab dan 'hidup bersama risiko bencana'. PRBBK menjadi sebuah penanda tentang apa yang komunitas tertentu telah, sudah, sedang, dan akan lakukan dalam mengelola risiko bencana yang dihadapi; yang bersifat siklus atau periodik atau pun prediktif.

Beberapa komunitas di Bangladesh, Afrika, Timor, Yogyakarta, Aceh, Nias, dan

sebagainya sudah lama hidup bersama ancaman baik banjir, kekeringan, vulkanik, tsunami, atau gempa, yang datang silih berganti. Pengetahuan pengelolaan bencana yang diolah dari 'bioindikator' atau 'biodetektor' (suara burung tertentu, fenomena ular turun gunung, dsb.), 'geoindikator' atau 'geodetektor' (air surut pertanda tsunami, bunyi gemuruh laut, burung gempa) yang selanjutnya disebut pengetahuan-lokal atau asli (*indigenous knowledge*) yang diturunkan antar generasi. Hal-hal ini merupakan bagian penting dari praktik PRBBK. Beberapa diantaranya terbukti efektif bagi upaya pengelolaan risiko dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sehingga dikenali sebagai kearifan-lokal (*local-wisdom*).

PRBBK merupakan cerminan dari kepercayaan bahwa komunitas mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan jenis dan cara penanggulangan bencana di konteks mereka. Hal ini muncul dari implikasi atas kepemilikan hak dasar pada orang-perorangan dan komunitas yang melekat dengan hak untuk melaksanakan hak itu dalam bentuk kesempatan untuk menentukan arah hidup sendiri (self determination). Mengikuti alur pikir ini, maka sejauh diizinkan oleh peraturan hukum dan perundangan, komunitas mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan apa dan bagaimana mengelola risiko bencana di kawasannya sendiri-sendiri.

Makna berbasis komunitas dalam PRBBK tentunya bisa diperluas sebagai berikut:[4] Adanya partisipasi penuh yang melibatkan pula partisipasi pihak rentan, laki-laki dan perempuan; anak-anak, kelompok lanjut usia, orang-orang yang berkebutuhan khusus, ras marjinal, dan sebagainya.

Sinonim dengan *bottom-up* bukan *top-down*, partisipasi penuh, akses dan kontrol, pendekatan inklusif,sense of belonging terhadap sistem penanganan bencana yang sudah, sedang, dan akan dibangun. Pendekatan top-down pada awal

[4] Modul 2.3, Indosasters, 2007

kegiatan memungkinkan untuk dilakukan, namun seiring dengan waktu, masyarakat disiapkan untuk dapat mandiri sehingga mekanisme bottom-up dapat lebih dominan.

Menggunakan konsep "dari, oleh, dan untuk" masyarakat dalam keseluruhan proses, di mana masyarakat yang mengontrol sistem dan bukan dikontrol sistem (dalam seluruh sistem PRBBK termasuk pula pada Sistem Peringatan Dini) (Twigg, 2006).

Kotak 3.
CONTOH KASUS KEARIFAN-LOKAL

Masyarakat Renggarasi, Sikka Setiap tahun masyarakat di desa Renggarasi, Kabupaten Sikka, hidup dengan ancaman angin puting beliung. Namun, masyarakat di komunitas ini memiliki keahlian yang telah diajarkan secara turun-temurun antargenerasi dalam memprediksi kapan terjadinya angin dan upaya-upaya kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak angin tersebut.

Munculnya angin puting beliung dapat diperkirakan dengan cara melihat tanda-tanda di lingkungan sekitar dalam dua hingga tiga hari sebelumnya. Apabila terdapat awan berwarna merah yang bergerak dengan cepat dan juga terdapat pelangi yang melintas gunung dan berakhir di laut antara bulan Januari dan Maret, masyarakat desa Renggarasi segera bersiap-siap untuk menghadapi angin ribut tersebut.

Mereka juga memiliki pengetahuan-lokal untuk mengurangi dampak dari angin puting beliung ini. Setelah mereka melihat tanda-tanda lingkungan, mereka segera mengikat atap rumah mereka dengan batang pohon atau rotan yang telah diikat dengan pemberat (atau dikenal dengan istilah memaku atap rumah). Untuk melindungi agar pohon-pohon tidak tercabut karena angin, mereka mengikat pohon-pohon tersebut menjadi satu. Dengan menggunakan cara-cara ini, atap rumah mereka dan juga pepohonan yang ada tidak akan terbawa angin ribut.

Pengetahuan dan keakhlian dalam pengurangan risiko bencana ini telah ditularkan dari generasi ke generasi dan telah menjadi kearifan-lokal. Oleh karena itu, komunikasi risiko dari tua ke muda dan juga sebaliknya merupakan hal penting untuk menjaga kearifan lokal yang sudah ada. (Jonathan Lassa)

2.3. PEMBENARAN PENDEKATAN BERBASIS KOMUNITAS

Komunitas adalah faktor pembeda kejadian bencana. Kejadian-kejadian yang disebabkan oleh alam, non-alam maupun sosial lazimnya baru disebut sebagai

suatu bencana bilamana kejadian itu menimbulkan dampak yang mengganggu keberfungsian suatu komunitas sehingga menimbulkan kerugian baik fisik, sosial, ekonomi, dan sedemikian rupa sehingga komunitas yang bersangkutan tidak akan dapat untuk menanganinya dengan sumber dayanya sendiri (UNISDR, 2004).

Dalam satuan analisis bencana adalah komunitas. Status keberdayaan komunitas menjadi faktor penentu terjadinya bencana atau tidak, atau setidak-tidaknya tingkat keparahan dampaknya. Mengikuti logika ini, maka komunitas adalah juga unit dasar di mana harus dilakukan investasi untuk penanggulangan bencana. Bahwa satuan kabupaten hingga nasional adalah agregat dari risiko-risiko komunitas di tingkat lokal sehingga praktik PRB yang aktual adalah di tingkat komunitas.

Sumber daya sosial budaya, unsur-unsur, struktur, dan proses-proses interaksi internal dan eksternal setiap komunitas adalah modal bagi kehidupan komunitas termasuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peluang untuk menggali dan mengoptimalkan penggunaan potensi inilah yang membuat PRBBK menjadi lebih memadai ketimbang pendekatan lainnya.

Tujuan PRBBK adalah mengurangi risiko bencana dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu rumah tangga, dan komunitas dalam mengelola risiko bencana, menghadapi dampak merusaknya bencana. Komunitas dan kelompok paling rentan adalah aktor utama/kunci dalam PRBBK dan pihak luar (LSM lokal dan internasional, lembaga-lembaga PBB, dan lembaga lainnya) berperan mendukung dan mengambil peran fasilitasi seperti membantu analisis situasi, mengukur tingkat perencanaan dan implementasi agenda ataupun konsensus PRBBK. Pendekatan yang dominan dengan solusi perekayasaan atau sains dan solusi hukum atau aturan semata mempunyai tendensi untuk top-down dan kaku dalam pengambilan keputusan. Minimnya partisipasi publik serta pihak terdampak yang diperlakukan sebagai ‘korban’ yang pasif, menyebabkan

gagalnya banyak proyek mitigasi bencana.

Konsentrasi kuasa dan pengetahuan pada satu titik (pemerintah pusat/daerah) dan peminggiran masyarakat dalam pengambilan keputusan, membuat banyak proyek mitigasi (kekeringan, banjir, gempa, vulkanik) lebih merepresentasikan kepentingan penguasa atau pihak-pihak yang mempunyai uang (donor), ketimbang kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Keterbatasan partisipasi dapat mengerdilkan keberlanjutan program, meningkatkan kerentanan terhadap bencana, dan bukan sebaliknya, memperkecil kerentanan. Ketiadaan akses dan kontrol atas sistem mitigasi dan PRB yang dibangun, menyebabkan ketidakberlanjutan di tingkat komunitas.

Tidak ada yang lebih berkepentingan dalam memahami masalah bencana di tingkat komunitas selain komunitas yang kerap bertahan dan bertaruh dengan bencana itu sendiri.Komunitas lokal memiliki kesempatan untuk lebih mengetahui tantangan, ancaman, hambatan, dan kekuatan lokal dalam menghadapi bencana. Sumber daya lokal dalam penanganan bencana (maupun pembangunan) layak diasah dan dikembangkan secara berkelanjutan. Pengalaman PRBBK di komunitas tertentu dapat dimodifikasi, direvisi, dan disesuaikan di tempat lain.

Dokumentasi Simposium PRBBK I—VII di Indonesia memberikan pesan yang kuat tentang kecirian PRBBK. Argumentasi yang menonjol adalah bahwa komunitas lokal memiliki kapasitas yang unik dalam menghadapi risiko-risiko bencana setempat, lebih sensitif dan lebih menginformasikan tentang lingkungan mereka sendiri, mereka seringkali lebih dapat meramal kejadian-kejadian yang tidak mereka inginkan. Mereka kaya dengan pengalaman dalam pertahanan diri yang berevolusi sejak dulu, paling sesuai dengan lingkungan sosio-ekonomik, budaya, dan politik yang ada. Meskipun demikian, studi-studi empiris menunjukkan bahwa tindakan PRB tidak selalu lahir dari pemikiran rasional tentang perencanaan PRB itu sendiri, melainkan dilakukan menurut rasionalitas tertentu yang memiliki

akses pada pengambilan keputusan, dimana rasionalitas komunitas lokal sering dianggap kurang penting dan tidak logis dibanding rasionalitas ahli dari luar, pemerintah, dan donor.

Idealnya, PRBBK merupakan pendekatan berbasis pemberdayaan komunitas demi mengurangi ketergantungan eksternal, terutama pada saat darurat bencana maupun dalam rangka meningkatkan kapasitas dan ketangguhan/daya lenting (*resilience*) penghidupan komunitas yang menjadi sasaran. PRBBK mengaplikasikan prinsip "*leave no one behind*" alias antidiskriminasi yang berbasis gender, umur, kelompok agama, ras, suku, dan antidiskriminasi minoritas.

Ketimpangan jender merupakan salah satu sumber kerentanan. Pendekatan PRBBK yang mempertimbangkan aspek ini mempunyai potensi untuk juga membantu mengatasi isu-isu sosial dan kesetaraan gender. Distribusi risiko kematian yang berbeda secara mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam peristiwa Tsunami Aceh 2004, menunjukkan secara tegas bahwa ada komponen sosial dan non-alam dari risiko bencana.

Feltenbiermann (2006), dengan mengutip hasil riset, menunjukan bahwa rasio angka kematian laki-laki dan perempuan adalah 1:3. Sementara sebuah riset yang disponsori Oxfam (2005) di belasan desa terpilih, menunjukan rata-rata 1 : 5 untuk laki-laki dan perempuan. Rofi & Doocy (2006) dan Doocy dkk. (2007), menunjukkan pengalaman di Aceh, sedangkan Nishikiori dkk. (2006), mempresentasikan suatu pola kematian di Srilanka berdasarkan gender, di mana semuanya secara jelas menunjukkan bagaimana perbedaan gender ikut bermain sebagai salah satu faktor penting yang turut menentukan distribusi risiko tsunami. Mengintegrasikan gender sebagai satu faktor penting yang turut menentukan distribusi risiko, tidak bisa lagi dilihat sebagai suatu opsi melainkan sesuatu yang vital dan bersifat imperatif.

Usia adalah faktor lain yang signifikan pula untuk diperhitungkan, yang tidak tercakup di dalam alat-alat penilaian risiko bencana seperti dokumen PN-PRB tersebut. Peek (2008), mencatat beberapa bencana "berskala besar", termasuk gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia tahun 2004, gempa bumi Pakistan tahun 2005, serta badai Katrina tahun 2005, yang menunjukan suatu realitas yang menyedihkan, bahwas bencana bisa saja berdampak pada banyak korban belia. Mitchell dkk. (2008), mengungkapkan kembali laporan Tsunami Evaluation Coalition (TEC) yang difokuskan pada kelompok-kelompok paling terkena dampak, yakni anak-anak di bawah 15 tahun dan perempuan (hlm. 255). Peek mencatat 17 tipe risiko yang sering dihadapi anak-anak saat bencana (Peek 2008: 5).

Hakikat pemberdayaan dalam pendekatan PRBBK mempunyai kapasitas untuk menghapus beberapa aspek penyebab kerentanan, dan dengan itu mengurangi dampak kejadian-kejadian bencana pada masa datang. Disadari bahwa penanggulangan bencana bukanlah suatu pendekatan yang linear yang keberhasilannya dapat dijamin dalam ukuran pencapaian tujuan dan dimensi waktu tertentu.

Secara umum kita pahami bahwa proses-proses partisipatif selalu memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan kalau program dilaksanakan sendiri secara langsung oleh lembaga yang melaksanakan PRBBK. Terlebih lagi, semakin besar konsesi yang diberikan oleh lembaga atau praktisi penanggulangan bencana kepada komunitas, semakin besar pula kemungkinan warga komunitas akan memengaruhi tujuan dan cara-cara mencapainya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa keberlanjutan bisa dijamin oleh PRBBK karena dipenuhi beberapa aspek seperti efisiensi waktu dan biaya, efektivitas, legitimasi, kesetaraan, serta data dan informasi risiko yang lebih simetris dan pengetahuan risiko yang lebih terdistribusikan karena pelibatan pemangku kepentingan lokal yang memadai.

2.4. PERAN MASYARAKAT: TITIK BERAT PRBBK

Definisi bencana yang sering dipakai adalah peristiwa yang terjadi ketika ancaman yang datang melebihi kemampuan komunitas untuk mengatasinya. Pengertian ini tentu sebuah penyederhanaan karena tiap kerugian atau kehilangan baik materi maupun nonmateri, dapat dikategorikan sebagai bencana. Meskipun tidak ada kesepakatan bersama mengenai indikator baku untuk menentukan apakah komunitas mampu mengatasi bencana atau tidak, namun seringkali komunitas yang selamat, misalnya dalam kejadian ekstrem di Aceh dan Nias, menjelaskan secara baik bentuk kapasitas lokal yang tersedia.

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan PRBBK dan Pendekatan PB Konvensional

Aspek	PRBBK	Konvensional
1.Komunikasi risiko bencana	Data dan informasi lebih simetris dan kaya, terjadi pertukaran informasi antar-stakeholder secara lebih cepat	Asimetris,dan hanya berbasis pendapat ahli serta pengetahuan elite. Komunikasi risiko bersifat top-down
2.Transaksi Pengetahuan dan praktik	Terjadi transaksi pengetahuan yang bersifat 'peer-to-peer ' antara komunitas dan ahli/fasilitator. Terjadi cross-fertilisasi pengetahuan antar-stakeholder.	Pengetahuan lokal yang mungkin saja telah diproduksi komunitas dikalahkan oleh pendapat ahli yang tidak sensitif dengan konteks risiko lokal.
3.Efisiensi waktu	Perlu investasi waktu yang lebih banyak di awal, namun dalam jangka panjang, dianggap lebih berkelanjutan.	Jangka pendek lebih menguntungkan namun secara jangka panjang tidak berkelanjutan.
4.Efisiensi biaya	Sumber daya local (modal, pengetahuan, tenaga, keterampilan) diadakan secara maksimum	Lebih banyak biaya tambahan untuk waktu pekerjaan yang lebih panjang
5.Efektivitas	Keterlibatan banyak pihak membuat lebih banyak kader lokal yang terlatih mengurangi risiko lokal setempat.	Sedikit aktor lokal yang terlatih, ketergantungan pada pihak luar (ahli, pemerintah, LSM)
6.Legitimasi	Komunitas memandang program dengan cara yang lebih bersahabat. Akar masalah kerentanan dan risiko seperti ketimpangan jender,umur,dan kelas bisa dikurangi karena partisipasi membuka ruang bagi kaum marjinal.	Partisipasi rendah, membuat tingkat legitimasi juga rendah, karena terjadi peminggiran kaum marjinal yang tinggi kerentanannya.

Aspek	PRBBK	Konvensional
7.Kesetaraan	Kesetaraan adalah harga mati.Tingkat distribusi risiko dan kelompok paling rentan sebagai target.	Minim visi pada pengurangan kelompok rentan dan tidak mampu mengurangi akar masalah kerentanan
8.Keberlanjutan	Secara ideal, bila unsur 1—7 terpenuhi, maka keberlanjutan diasumsikan sangat mungkin tercapai karena terjadi self-mobilization dari masyarakat. Lebih tingginya martabat komunitas meningkatkan kemampuan pengurangan risikonya sendiri.	Keberlanjutan sulit dicapai karena ketergantungan pada pihak luar, tidak mampu menggali kapasitas lokal untuk mengurangi kerentanan dan kapasitas.

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan dan transparansi. Asas keterbukaan mengandung sekurang-kurangnya lima unsur utama yang memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, yaitu:

- Hak untuk mengetahui (*right to know, meeweten*). PRBBK adalah produk publik/umum dan pemenuhan hak untuk aman dari bencana merupakan bagian dari HAM. Hak ini pada dasarnya merupakan hak yang mendasar dalam alam demokrasi. Artinya segala hal yang berkenaan dengan kepentingan publik, maka seyogyanya publik mengetahuinya secara utuh, benar, dan akurat.
- Hak untuk memikirkan (*right to think, meedenken*). Setelah masyarakat mendapat akses informasi tentang apa yang menjadi hak masyarakat untuk mengetahuinya, maka selanjutnya hak masyarakat pula untuk ikut serta terlibat dalam pemikiran, pengkajian, dan penelitian tentang apa yang terbaik bagi semua pihak. Kegiatan pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh masyarakat memberi makna, di satu pihak, adanya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap masalah yang dihadapi; dan di lain pihak, pemerintah pun sesungguhnya "diringankan" dari beban permasalahan yang harus mendapatkan solusinya.

- Hak untuk menyatakan pendapat (*right to speech, meespreken*). Sebagai konsekuensi logis dari adanya hak untuk ikut memikirkan, maka tindak lanjutnya adalah hak untuk berbicara guna menyatakan sesuatu pendapat. Maksudnya adalah bahwa apa yang telah dikaji, diteliti dengan pemikiranyang dalam dan matang, maka masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapatnya tersebut ke hadapan publik lainnya. Pernyataan ini dapat berupa hal-hal yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan individual atau kelompok, termasuk di dalamnya pernyataan tentang sesuatu masalah yang ada pada pemerintah (yang dapat berisi masukan dan atau kritik) maupun masalah yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- Hak untuk memengaruhi pengambilan keputusan (*right to participate in decision making process, meebeslissen*). Substansi yang dinyatakan sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya juga dimaksudkan agar masyarakat dapat mengambil peran dan melibatkan diri dalam batas-batas tertentu secara proporsional untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang. Dengan perkataan lain, substansi dari suatu putusan yang diambil oleh pihak yang berwenang tersebut adalah didasarkan pada pertimbangan masukan dari masyarakat yang patut untuk diakomodasi. Konkretnya, setiap masukan seyogyanya dipertimbangkan secara saksama, dikaji dan diteliti manfaat dan kerugiannya bagi kepentingan dan kebaikan umum (semua pihak). Apabila masukan atau saran tersebut akan ditolak, maka harus dijelaskan alasan dan tujuannya, agar jerih payah usaha masyarakat dalam pemikiran dan pendapatnya itu tetap merasa dihargai. Hak untuk memengaruhi pengambilan keputusan ini sering pula digolongkan ke dalam pengawasan apriori, yakni pengawasan atau kontrol dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu putusan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini, jelas unsur preventif dari maksud pengawasan atau kontrol, yaitu untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan.

- Hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan (*right to monitor in implementing of the decision, meetoezien*). Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat berhak pula untuk mengawasi jalannya putusan yang telah diambil. Pengawasan masyarakat ini merupakan bagian dari hak demokrasi dalam kerangka public control. Pengawasan atau kontrol terhadap jalannya putusan ini atau dapat disebut kontrol aposteriori adalah dimaksudkan untuk tindakan korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

3

KERANGKA HUKUM PRBBK

3.1. PERAN KOMUNITAS DALAM KERANGKA HUKUM

Saat ini telah berkembang sedikitnya dua pemikiran kerangka hukum PRBBK. Pertama, PRBBK merupakan sisi informal dalam praktik penanggulangan bencana. Bukti empirisnya adalah bahwa hampir semua praktik PRBBK di Indonesia maupun dunia lahir dari protokol lokal tak tertulis yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan informal dan secara umum tidak teregulasi (*un-regulated*). Namun argumentasi ini tidak sepenuhnya tepat. Dalam wacana maupun praktik telah terdapat upaya-upaya untuk meregulasi atau memformalkan secara spesifik pengetahuan/praktik PRBBK, misalnya konsep penanggulangan banjir di Belanda yang asalnya bersifat informal dan tanpa inisiatif eksternal yang telah ada sejak tahun 1100 Masehi. Pemikiran kedua, PRBBK adalah pendekatan yang dalam rumusan formal, dapat digunakan dalam komunitas dengan satuan formal seperti desa/dusun.

Pengelolaan Risiko Bencana akan sangat efektif bila kebutuhan-kebutuhan khusus di tingkat lokal dapat dipenuhi. Ketika pemerintah/sektor dan kelembagaan melaksanakan intervensi-intervensi secara terpisah tanpa koordinasi, intervensi-intervensi tersebut seringkali terbukti tidak efisien, tidak efektif, dan tidak berkelanjutan karena sering intervensi tersebut bersifat sporadis dan hanya merespons pada saat krisis. Intervensi-intervensi kedaruratan untuk mengurangi eskalasi dampak, misalnya, cenderung mengabaikan persepsi dan kebutuhan di tingkat lokal dan potensi nilai sumber daya dan kapasitas setempat dalam

proses tersebut. Akibatnya tidak mengherankan jika bantuan tanggap darurat jauh melampaui sumber daya yang telah ditanam untuk mengembangkan kemampuan pengurangan bencana di tingkat lokal.[5]

Peran serta masyarakat adalah sebagai bagian sentral dalam strategi pembangunan yang modern dan demokratis. Peran serta dalam seluruh aspek pembangunan, baik pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan,pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerimaan manfaat, maka dengan demikian asumsinya adalah bahwa tujuan-tujuan pembangunan itu pun seyogyanya akan tercapai pula.

Dalam konteks hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan satu Konvensi Internasional di Aarhus, Denmark, pada 25 Juni 1998 yang diikuti oleh 39 negara dan Masyarakat Eropa dengan menghasilkan The Aarhus Convention yang berisikan 3 (tiga) pilar yang menjamin hak-hak rakyat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yakni:

- Pilar Pertama, akses terhadap informasi, yang pada intinya adalah bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang utuh, akurat, dan mutakhir untuk berbagai tujuan. Akses terhadap informasi ini dibagi ke dalam dua tipe, yaitu a) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari para pejabat publik (*public authorities*) dan kewajiban mereka untuk merespons dan menyediakan informasinya sesuai dengan permintaan masyarakat.Tipe inilah yang disebut hak akses informasi secara pasif; b) Tipe kedua disebut hak informasi secara aktif, yaitu hak masyarakat untuk menerima informasi; dan kewajiban pejabat publik untuk mengumpulkan dan kemudian mendiseminasikan informasi tersebut kepada masyarakat tanpa diminta.
- Pilar Kedua, peran serta dalam pengambilan keputusan, yaitu pilar

[5] UNISDR. 2004. *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives.* Geneva: United Nations Publications

demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pembuatan informasi dan jaminan bahwa partisipasi tersebut benar-benar dijalankan dalam realitasnya atau praktiknya, dan tidak sekadar di atas kertas, dengan melalui akses terhadap penegakan keadilan. Peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dibagi dalam tiga bagian. Pertama adalah hak masyarakat untuk berperan serta dalam memengaruhi pengambilan keputusan bagi kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya. Kedua, berperan serta dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Ketiga, berperan serta dalam mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

- Pilar Ketiga adalah akses terhadap penegakan keadilan, yaitu akses untuk memaksakan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi, untuk kemudian hak ini dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional atau domestik; dan memperkuat penegakan hukum lingkungan nasional atau domestik agar dijalankan dengan benar. Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya suatu mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung.

Dari uraian di atas, maka secara ringkas dapat disimpulkan bahwa hakikat peran serta masyarakat itu dapat terwujud dalam bentuk:

1. Turut memikirkan dan memperjuangkan nasib sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat sebagai alternatif saluran aspirasinya;
2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti kepada pemimpin dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya formal maupun informal;
3. Senantiasa merespons dan menyikapi secara kritis terhadap sesuatu masalah yang dihadapi sebagai buah dari suatu kebijakan publik dengan berbagai konsekuensinya;

4. Keberhasilan peran serta itu sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh, memanfaatkan informasi itu sebagai dasar bagi penguatan posisi daya tawar, dan menjadikannya sebagai pedoman dan arah bagi penentuan peran strategis dalam proses pembangunan;
5. Bagi Pemerintah, peran serta masyarakat itu merupakan sumber dan dasar motivasi dan inspirasi yang menjadi energi kekuatan bagi pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Kotak 4
CONTOH INISIATIF PRBBK DALAM KERANGKA HUKUM LOKAL

Data 2008 menunjukkan desa Haekto memiliki 239 KK terdiri dari laki-laki 443 orang dan perempuan 454 orang. Mata pencarian 90% penduduk adalah petani tradisional, >2% adalah PNS guru dan pegawai kecamatan, dan sisanya berdagang atau tenaga ojek. Hasil PRA Bencana PMPB Kupang menunjukkan bahwa sejak tahun 2000 sampai saat ini, banjir merupakan peristiwa tahunan dan berulang. Akumulasi dampak banjir tahunan, secara tidak langsung, mempengaruhi rendahnya rata-rata tingkat pendapatan yang hanya Rp100.000,00 s/d Rp250.000,00 per-KK per bulan dengan sarana kesehatan rumah tangga (MCK dan sumber air bersih) sangat minim. Kemampuan mengakses pendidikan semakin lama semakin menurun karena lemahnya ekonomi masyarakat. Tahun 2008, terdapat upaya membumikan PRBBK ke dalam kebijakan dan kerangka hukum lokal. Kebijakan atau kerangka hukum lokal yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang diambil oleh jajaran pemerintahan lokal setingkat kepala desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai struktur terendah dalam tata pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah.

Upaya ini tertuang dalam Peraturan Desa Haekto, Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT No. 2 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan di mana secara garis besar terdapat hal-hal yang mendasar dari Perdes ini.

Membaca dengan teliti Perdes ini, maka kita akan menemukan sebuah gambaran besar bahwa Perdes ini telah melakukan identifikasi pentingnya melakukan penyelenggaraan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari hak, pentingnya menangani ancaman terhadap kesehatan masyarakat, dan pentingnya menjaga lingkungan yang sangat berhubungan dengan tingkatkesehatan yang dialami oleh masyarakat desa.Hal mendasar yang tampak dariPerdes ini adalah bahwa UU PB,UU Lingkungan Hidup,dan UU Wabah PenyakitMenular menjadi referensi dalam bagian menimbangnya, selain UU lainnya.Bahkan saat ini Pemerintah Desa Haekto juga tengah membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pemeliharaan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di mana dalam draft-nya tertulis bahwa Rancangan Perdes ini bertujuan untuk melakukan upaya Pengurangan Risiko Bencana.
Sumber: PMPB Kupang & Ivan

4

KARAKTERISTIK DAN KECIRIAN PRBBK

4.1. PARTISIPASI KOMUNITAS DALAM PRB

Partisipasi komunitas merupakan suatu proses pemberian atau pembagian wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan termasuk bencana. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan komunitas dalam kegiatan tersebut. Partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara lebih baik, dengan memberi peran komunitas agar memberikan kontribusi sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, efesien, dan berkelanjutan. Partisipasi komunitas dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pembuatan konsep, konstruksi,operasional-pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan.

Tingkat partisipasi komunitas dalam kegiatan penanggulangan bencana bisa digambarkan dalam metafora tangga, yang dimodifikasikan dari Arnstein (1969) dan Hart (1999). Gambar tersebut memaklumi bahwa partisipasi sering dimulai dari tahapan manipulatif. Pada contoh itu, pemerintah atau LSM menggunakan suara masyarakat demi kepentingan mereka dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Dalam konteks partisipasi metafora anak tangga nomor 1 menggambarkan bahwa suara anak-anak digunakan demi kepentingan orang dewasa tanpa sepengetahuan anak-anak. Simbol laki-laki dan perempuan adalah tambahan untuk menggambarkan bahwa tanpa kesetaraaan jender, tangga partisipasi hanya milik jender tertentu (dalam hal ini laki-laki dewasa). Dalam

banyak kasus, partisipasi memang bersifat manipulatif yang dilakukan laki-laki. Untuk menaiki setiap tangga, diperlukan "*window of opportunity*" (Hart,1999), yakni perubahan paradigma dari pemegang proyek PRB (pemerintah, LSM, swasta dalam wajah CSR). Sebagai upaya awal, partisipasi yang manipulatif dan terapi yang bersifat top-down. Untuk kedua langkah awal ini, Arnstein (1969) menyebutnya sebagai "non partisipatif " yang tidak menghargai harkat dan martabat komunitas.

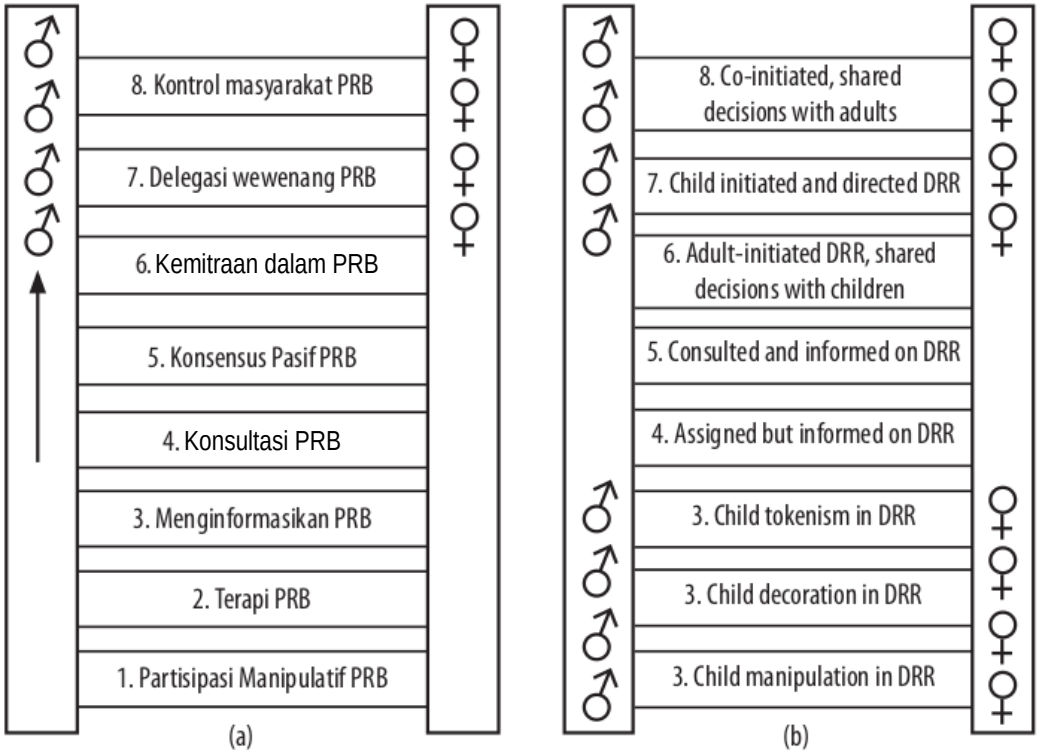

Gambar 2.1: Tingkat partisipasi rakyat (Modifikasi Arnstein (1969) dan Hart (1999))

Gambar kanan sengaja dikembangkan sebagai metafora yang menggambarkan tahapan tahapan pengarusutamaan anak dalam kegiatan Penanggulangan bencana. Gambar kiri khusus untuk tangga 3—5, menginformasikan sosialisasi satu arah *top-down*, konsultasi dan konsensus pasif komunitas berkaitan PRB adalah sekadar tokenisme, yakni pelibatan komunitas yang minimal atau ala kadar saja.

Para praktisi PRB umumnya sepakat untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas, dalam hal ini PRBBK. Komunitas yang rentan itu sendiri didorong terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama.

Meskipun para praktisi PRB umumnya sepakat untuk lebih memberikan penekanan pada program-program pengelolaan risiko bencana oleh komunitas, dalam hal ini PRBBK, agar komunitas yang rentan itu sendiri yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas tingkat lokal, provinsi, dan nasional dalam bentuk kerja sama. Tujuan pengelolaan dan pengurangan risiko bencana oleh komunitas adalah mengurangi kerentanan dan memperkuat kapasitas komunitas untuk menghadapi risiko bencana yang mereka hadapi. Keterlibatan langsung komunitas dalam melaksanakan tindakan-tindakan pengurangan risiko di tingkat lokal adalah suatu keharusan.

Program PB dan PRB yang bersifat top-down yakni yang anti-PRBBK kerap gagal untuk mencakup kebutuhan setempat, khususnya dari komunitas yang rentan, mengabaikan potensi sumber daya dan kapasitas setempat, dan mungkin dalam beberapa kasus bahkan meningkatkan ketergantungan sekaligus kerentanan komunitas. Sebagai contoh, seberapa banyak permukiman hasil rehabilitasi dan rekontruksi di Aceh dan Nias 'merana', membahayakan dan ditinggalkan warga karena tidak dikelola?

Di tingkat lebih tinggi, partisipasi secara tegas ditekankan oleh UU 24/2007 pada saat rekonstruksi pasca bencana.[6] Meskipun demikian, partisipasi masyarakat sipil dalam analisis dan penilaian risiko bencana juga dikuatkan dalam Pasal 87PP No.

[6] Terminologi "partisipasi" dalam UU PB terlihat dalam 5 bab yakni bab 4, 26, 59, 60, dan 69. Bab 59,60 dan 69 tentang kebijakan rekonstruksi.

21/2008 dengan judul "Partisipasi dan Peran Serta Lembaga/ OrganisasiKemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat" —Pertama, untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah yang lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana; dan kedua, melalui upaya "kampanye peduli bencana, mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan di antara masyarakat sipil dan dunia usaha"; dan ketiga, mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan kesiagaan menghadapi bencana

Praktik PRBBK dicirikan oleh beberapa hal yang mendasar dan prinsip yakni:

- Kekuasaan tertinggi pengelolaan risiko dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berada di tangan kelembagaan berbasis masyarakat yang dimandatkan.
- Diagnosis akar masalah bencana secara tepat, strategi mitigasi dan pemulihan dilakukan secara tepat karena partisipasi penuh menjamin representasi kepentingan nyata masyarakat.
- Eksistensi kelembagaan di komunitas yang dimandatkan untuk penangananbencana mengandalkan respons yang cepat/tepat pada masa darurat.
- Intervensi: bersifat multisektor, lintas sektor, lintas ancaman (banjir dan kekeringan; darurat dan pemulihan).
- Meliputi seluruh elemen perencanaan/siklus penanganan bencana. Sumberdaya utama adalah masyarakat sendiri didukung pengetahuan dan keahlian lokal.
- Input eksternal sedikit, hasil pengelolaan bencana maksimal.
- Masyarakat berdaulat terhadap bencana dengan indikator ketergantungan pada pihak luar dikurangi hingga titik 0 (secara teoretis).

Tentunya, dalam irisannya dengan pengetahuan modern, PRBBK mengalami modifikasi dan pengayaan. Pengayaannya yang coba dihadirkan dalam bentuk

esensi atau kecirian mendasar dari PRBBK itu sendiri. Yakni upaya inisiatif pengelolaan risiko bencana yang bersifat "*home grown*" meskipun dengan input ataupun dukungan eksternal.

Dalam dimensi yang lain, PRBBK bermetamorforsis juga sebagai sebuah wilayah pengetahuan yang memiliki setting pengetahuan, penelitian, kebenaran empiris, pengembangan ilmu, salah satu cabang dari kajian kebencanaan yang mungkin bersumber pada studi antropologi/sosiologi bencana. Implikasinya adalah lahirnya para profesional yang memiliki keterampilan dan spesialisasi dalam PRBBK.

Praktisi PRBBK selanjutnya dikonstruksikan sebagai "orang luar", yang mungkin saja berasal dari bagian masyarkat berisiko, yang menfasilitasi komunitas berisiko dalam melaksanakan penanggulangan bencana, di mana pekerjaannya didefinisikan oleh dimensi ruang dan waktu yang terbatas. Dalam dimensi proyek, ini berdampak pada keharusan para praktisi untuk memiliki strategi masuk (*entry strategy*) dan strategi keluar (*exit strategy*).

Selanjutnya, PRBBK sebagai sebuah wilayah kerja yang juga menuntut profesionalisme, maka PRBBK secara konseptual berkembang menjadi sebuah '*body of knowledge*' yang dikonstruksikan secara sistematis yang mengandung pengertian bahwa PRBBK bukanlah suatu rangkaian dari kebetulan (*serendipitous*), berdasarkan sekadar pada naluri, kedermawanan, atau pun ibadah.

PRBBK adalah proses-proses tertata dan terencana, dan mengikuti prosedur-prosedur yang kurang lebih baku. Dengan demikian, PRBBK adalah pekerjaan yang dapat ditilik oleh orang lain dan oleh komunitas itu sendiri, dilaksanakan penuh disiplin dan dengan senantiasa bertanggung jawab, serta akuntabel.

Dengan input sumber daya maksimum yang berasal dari komunitas yang unsur-unsurnya dapat digunakan untuk membedakan apakah praktik PRBBK itu

sistematis atau tidak adalah sebagai berikut:

- Disiplin: praktisi PRBBK mematuhi pola pikir, langkah, dan tindakan yang sesuai dengan kerangka kerja yang telah disepakati sebagai "*body of knowledge*" (kecirian, proses-proses dan tahapan, keterampilan dasar, dan pengetahuan) bersama di antara para praktisi PRBBK, berdasarkan suatu kesepakatan. Ini berkaitan dengan misalnya cara mengenali masalah atau isu, urutan kerja, pola hubungan dengan komunitas, pemerintah dan sistem sumber daya, dsb. Tanpa disiplin semacam ini maka setiap praktisi PRBBK dapat menyelenggarakan tugasnya sesuka hati dan akibatnya tidak ada jaminan kualitas bahwa praktik itu akan berhasil guna.
- Berkesadaran: semua langkah yang diambil dan kegiatan yang dilaksanakan oleh praktisi PRBBK berpijak pada proses kesadaran yang terencana. Dengan kata lain, idealnya tidak ada kegiatan PRBBK yang bersifat 'kebetulan' ataupun reaksi impulsif melainkan semua adalah terencana.Tindakan besar atau kecil dalam PRBBK adalah bagian dari kerangka besar yang disusun secara terencana.
- Akuntabel: bagian tidak terpisahkan dari suatu praktik yang sistematis adalah adanya kesadaran bahwa langkah dan kegiatan praktisi PRBBK harus selalu transparan terutama terhadap komunitas yang bersangkutan dan dengan sejawat praktisi PRBBK. Dengan transparansi ini maka kita dapat mengukur kesesuaian antara praktik tersebut dengan kaidah-kaidah praktik PRBBK, dengan kesesuaian antara tujuan awal dengan pencapaian kegiatan. Tanpa akuntabilitas ini maka praktisi PRBBK lagi-lagi dapat menyelenggarakan tindakan dan langkah sesuka hatinya dan tidak ada jaminan bahwa yang diselenggarakannya itu memang sungguh bermanfaat.
- *Auditable:* Bahwa kinerja PRBBK dapat diaudit secara partisipatif oleh komunitas, dengan kriteria-kriteria dasar yang fleksibel tetapi juga telah dikembangkan oleh inisiatif-inisiatif seperti Kerangka Aksi Hyogo dalam mengukur tingkat kapasitas dan resilience komunitas.

Pengalaman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian komunitas akan merujuk pada: (1) melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas mampu mengelola risiko bencana secara mandiri; (2) menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar; (3) penanggulangan risiko bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana; (4) pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya (Paripurno, 2006b).

4.2. KECIRIAN UMUM PRBBK

Secara umum ciri-ciri PRBBK adalah:

- Visi penyelamatan hidup dan penghidupan berkelanjutan: Disaster Risk Management (DRM) sebagai "*public goods*" dan hak-hak asasi manusia.
- Misi reduksi kerentanan, *multi-hazards management*, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memonitor, adaptasi, respons, mitigasi, persiapan, peringatan dini, dan seluruh aspek perencanaan bencana.
- Partisipasi adalah dimensi spiritual namun faktual, harga mati. Masyarakatsebagai penggerak utama, sebagai poros. Bukan partisipasi sesaat karena faktor donor atau pihak eksternal.
- Sensitif jender: keterlibatan penuh laki-laki dan perempuan.
- Sensitif dengan kerentanan: pioritas berdasarkan tingkat distribusi kerentanan sektoral dan kelompok/pihak/stakeholder yang paling rentan.
- Mengenali kapasitas dan sumber daya lokal (mekanisme adaptasi lokal dan strategi *coping*).
- Perangkat keras alias mandat kelembagaan di komunitas yang memonitor, mengomunikasikan risiko bencana secara reguler dan melakukan penanganan sebelum, ketika, dan setelah peristiwa darurat kemanusiaan [*plan-do-chek-re-act*] atau [POAC: *plan-organizing-action-coordination*]

atau [*assessment-plan-implement-monitor-evaluate*]

- Memiliki perangkat lunak (aturan/kebiasaan/protokol/mekanisme).
- Pihak luar diposisikan sebagai fasilitator dan pendukung.
- Transformasi "*collective memory*" atas bencana menuju aksi kolektif untuk reduksi bencana.
- Komunikasi risiko bencana secara berkelanjutan (melalui kombinasi media: budaya dan bahasa lokal, simbol, meunasah/surau, struktur mukim, warung kopi, buku/komik, syair, lagu daerah, pantun, sekolah, radio komunitas, VCD, milis (*mailing list*), internet, khotbah Jum'at, Risma).
- Pendekatan tetap harus inklusif (anti pendekatan eksklusif).
- Pengkaderan fasilitator/pendamping/organisator PRBBK yang berasal dari komunitas lokal, dari pengorganisasian menuju mobilisasi.
- Pelembagaan PRBBK demi keberlanjutan. Skenario keberlanjutan PRBBK harus terumuskan secara jelas.
- Terciptanya komunitas yang mempunyai kemampuan 'adaptif' dan kenyal (*resilience*) yakni "kemampuan di tiap tingkatan untuk mendeteksi, mencegah, minimalisasi, dan bila perlu menangani dan pulih dari kejadian *ekstrem*" (Medd dan Marvin, 2005: 45).
- Perencanaan kontijensi di level komunitas yang secara reguler disimulasikan: demi melahirkan komunitas yang sadar akan ancaman terhadap kampungnya;tahu bagaimana dan terampil melindungi diri mereka, keluarga, aset-aset penghidupan dari ancaman alam; Agar mampu mengelola kedaruratan akibat ancaman, tidak terjadi eskalasi ke tingkat bencana yang lebih kompleks.
- Integrasi PRBBK ke Musrenbangdes /kecamatan/kabupaten/(Lihat gambar di bawah). Hal ini memenuhi maksud yang terkandung di dalam UU No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang ini menjadi landasan yang mampu menghubungkan sinergi antara PRBBK, perencanaan pembangunan desa dan kabupaten serta nasional yang sensitif bencana.

Sebagai sebuah pendekatan, tentunya desa tidak tidak tepat dikatakan sebagai domain tunggal PRBBK. PRBBK bisa diterapkan secara makro maupun mikro.

5
SISTEMATIKA PRBBK

5.1. SISTEMATIKA

Sebagai sebuah proses, PRBBK memiliki tiga tahapan utama yang paralel, yakni: masukan (*input*), proses-proses (*throughput*), serta luaran (*output*). Berikut adalah enam tahapan dengan sub-sub tahapan proses pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Enam tahapan ini kemudian diakomodasi sebagai standar prosedur kegiatan PRBBK secara berkelanjutan dalam konteks proyek/program, yang diakhiri oleh tahapan *exit strategy* dan audit PRBBK yang berbasis komunitas.

Keseluruhan tahapan ini dibahas secara mendalam dalam buku ini. Tahapan kerja yang telah disusun sebelumnya dalam berbagai publikasi tidak secara cukup jelas membahas prosedur keluar dan masuk —tentunya bergantung pada sejarah, pengalaman, dan karakter organisasi yang bersangkutan. Bagi komunitas komunitas yang berbasis kerelawanan atau *community based organization* (CBOs) seperti organisasi petani, maka exit sesungguhnya tidak terjadi secara tegas, karenanya *exit strategy* lebih relevan dengan organisasi-organisasi yang berbasis proyek dan berkarakter LSM/donor. Komunitas-komunitas relawan seperti Kappala di Yogyakarta atau pun organisasi berbasis keagamaan di Timor atau organisasi masyarakat adat di Aceh seperti JKMA, bekerja tanpa diikat oleh konsepsi waktu masuk dan keluar, dan telah berusia puluhan tahun.

5.2. TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja PRBBK dari berbagai pengalaman[7], dapat dilakukan sebagai berikut:

- **Memilih Komunitas Sasaran**. Ini merupakan proses memilih komunitas yang paling rentan untuk kemungkinan mendapatkan dukungan program pengelolaan peredaman risiko dengan menggunakan serrangkaian kriteria yang ditetapkan. Pada dasarnya ini merupakan tahapan membangun hubungan dan kepercayaan dengan komunitas setempat. Tahap ini merupakan tahap kunci untuk mewujudkan "kita menjadi bagian dari mereka". Tahap ini merupakan tahap pencitraan awal atas rencana PRBBK.

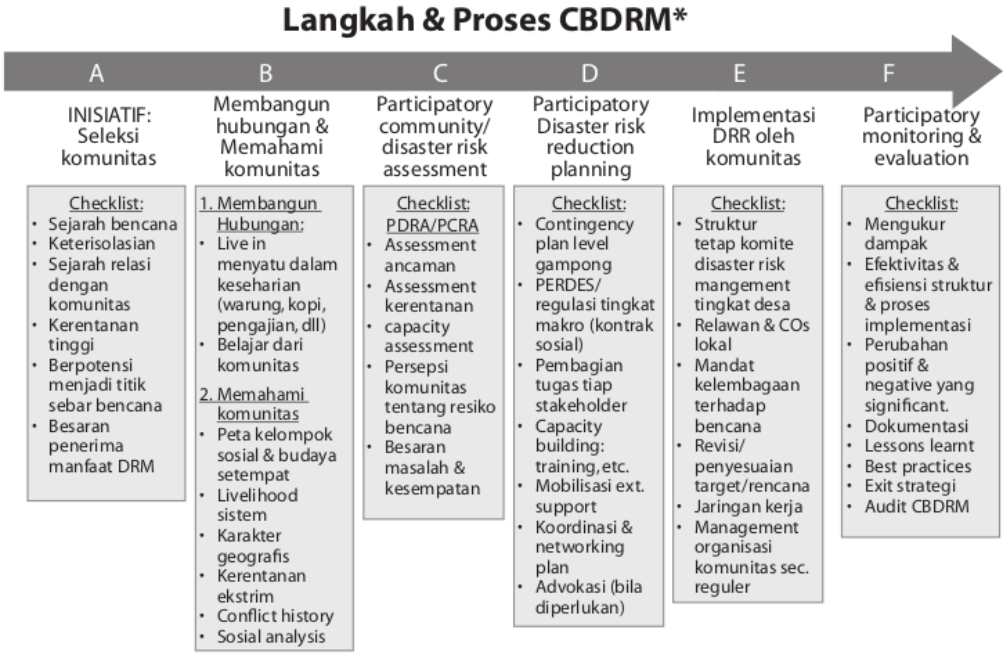

Gambar 5.1. Proses PRBBK

- **Membangun Hubungan dan Memahami Komunitas**. Pada dasarnya ini merupakan tahapan membangun hubungan dan kepercayaan dengan komunitas setempat. Setelah hubungan terbangun, dipahami posisi umum komunitas dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman lebih

[7] Mengacu pada hasil KN PRBBK IV 2008 dan KN RBBK V 2009

mendalam mengenai dinamika komunitas akan terjadi kemudian, ketika dilakukan penjajakan risiko secara partisipatif.

- **Penjajakan Risiko Bencana secara Partisipatif (***Participatory Disaster Risk Assessment/***PDRA)**. Ini merupakan proses diagnostik untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi komunitas dan bagaimana mereka mengatasi risiko-risiko tersebut. Tahap ini dilakukan untuk memprakirakan kebutuhan penanggulangan bencana. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Ini merupakan pengkajian yang menyeluruh mengenai keterpaparan komunitas terhadap bahaya dan analisis mengenai kerentanan mereka serta kapasitas mereka merupakan dasar dalam semua aktivitas, proyek dan program untuk meredam risiko bencana. Penjajakan risiko bencana merupakan proses partisipatif dalam menentukan sifat, cakupan, dan besarnya dampak negatif dari bahaya terhadap komunitas dan rumah tangga di dalamnya dalam suatu periode waktu yang dapat diramalkan. Penjajakan risiko bencana komunitas juga memfasilitasi suatu proses menentukan dampak negatif yang mungkin atau cenderung terjadi (kerusakan dan kerugian) pada aset penghidupan yang berisiko. Pengkajian bersama tingkat risiko di masyarakat meliputi: persepsi masyarakat atas risiko, pemetaan (karakter) bahaya, pemetaan kerentanan, pemetaan kapasitas dalam menangani bahaya, pemetaan kapasitas dalam menangani kerentanan, identifikasi risiko, evaluasi dan penilaian risiko, pemeraan potensi sumberdaya yang tersedia dan mobilsasi sumberdaya, serta analisis dan pelaporan bersama ke komunitas. Analisis situasi ini dapat mulai dengan menyusun profil komunitas untuk memahami risiko bencana melalui riset partisipatif tentang: informasi historis kebencanaan, ciri-ciri geoklimat, fisik, keruangan, tatanan sosiopolitik dan budaya, kegiatan-kegiatan ekonomi serta kelompok-kelompok rentan.
- **Perencanaan program dan memformulasikan rencana.** Tahapan ini dilakukan setelah analisis hasil-hasil penjajakan risiko secara partisipatif.

Komunitas sendiri yang mengidentifikasi tindakan-tindakan peredamanrisiko yang akan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas. Tindakan-tindakan peredaman risiko tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam rencana pengelolaan bencana komunitas (meningkatkan kapasitas & mengurangi kerentanan untuk meningkatkan kemampuan mencegah, memitigasi dan menyiapkan diri), manfaat dan hasil (mengurangi risiko), merencanakan kegiatan penting, mengidentifikasikan dan mencari dukungan finansial, memformulasikan rencana kegiatan.

- **Pelaksanaan program yang Dikelola Komunitas**. Tahapan ini hampir selalu ditempatkan sebagai puncak upaya peredaman risiko bencana. Tahapan ini adalah menjalankan kesepakatan perencanaan yang telah diformulasikan yang dianggap mampu meredam risiko. Dalam tahapan ini terdapat serangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengorganisasian pelaksana kegiatan, memobilisasi sumberdaya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pemantauan kegiatan dan menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki rencana peredaman risiko yang dilaksanakan. PRBBK harus menuju pada pelaksanaan rencana komunitas dan mendorong anggota-anggota komunitas lainnya untuk mendukung aktivitas-aktivitas dalam rencana tersebut. Tindakan peredaman risiko secara partisipatif. Tahapan ini hampir selalu ditempatkan sebagai puncak upaya peredaman risiko bencana.Tahapan ini adalah menjalankan kesepakatan perencanaan yang telah diformulasikan yang dianggap mampu meredam risiko. Dalam tahapan ini terdapat serangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengorganisasian pelaksana kegiatan, memobilisasi sumber daya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, melakukan pemantauan kegiatan dan menggunakan hasil pemantauan untuk memperbaiki rencana peredaman risiko yang dilaksanakan.

- **Monitoring dan Evaluasi secara Partisipatif**. Ini merupakan sebuah sistem komunikasi di mana informasi mengalir antarsemua orang yang terlibat dalam proyek: komunitas, staf pelaksana dan lembaga pendukung, lembaga pemerintah dan donor terkait. Penilaian dan memberikan umpan balik cenderung jarang dilakukan. Menilai hasil kegiatan yang disesuaikan dengan hasil yang diharapkan untuk meredam bencana diharapkan dapat digunakan untuk sejak dini mengetahui efektivitas usaha yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya menggunakan hasil evaluasi untuk pemberdayaan komunitas lain dalam meningkatkan kemampuan peredaman bencana.

Berbagai pendapat baik praktisi maupun ahli dalam komunitas MPBI sepakat bahwa pelembagaan merupakan syarat PRBBK yang berkelanjutan. PRBBK merupakan kegiatan tanpa akhir. Namun dalam konteks proyek/program yang menginginkan keberlanjutan praktik di tingkat akar rumput, akhir dari proses input eksternal adalah mengagendakan kelembagaan peredaman bencana yang bertumpu pada komunitas (mendorong pembentukan organisasi dan aturan komunitas dalam penanggulangan risiko bencana) untuk menjaga keberlanjutan, penyebarluasan, dan pengintegrasian. Pada tahap ini pula dibangun mekanisme konsultatif antara organisasi rakyat dengan aktor lain. Hal ini penting dilakukan karena proses intervensi peredaman risiko bencana yang melibatkan pihak lain pada umumnya bersifat ”sebagian” dari upaya peredaman seluruh risiko. Dalam posisi ini tentunya komunitas secara mandiri yang harus melanjutkan upaya-upaya peredaman tersebut. Pelembagaan ini pada dasarnya merupakan sebuahpemastian bahwa upaya peredaman risiko bencana tidak berhenti.

Seperti telah dikemukakan di atas, penanggulangan risiko bencana oleh komunitas merupakan proses untuk mendorong komunitas di kawasan rawan bencana agar mampu secara mandiri menangani ancaman yang ada di lingkungannya dan kerentanan yang ada pada dirinya. Oleh sebab itu, komunitas

yangmenghadapi risiko perlu terlibat secara aktif dalam identifikasi, analisis, tindakan, pemantauan, dan evaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ini berarti bahwa komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko bencana. Apabila PRBBK tidak hanya dilihat sebagai proyek, tetapi juga sebuah proses pengorganisasian komunitas, maka keberlanjutan pengelolaan risiko oleh komunitas dengan organ kelembagaan yang dimilikinya sendiri menjadi sebuah kebutuhan.

Hal lain yang tidak boleh terlewat sebagai sebuah proses PRBBK adalah upaya-upaya (1) pendokumentasian, (2) penilaian dan umpan balik, (3) penyebarluasan dan pengintregasian, serta (4) pelembagaan dan konsultatif. Upaya tersebut memungkinkan PRBBK dapat bekerja dengan baik, dan bermakna bagi komunitas sekitar sebagai sebuah pembelajaran (Paripurno, 2006b).

- **Pendokumentasian** merupakan bagian integral dari monitoring dan evaluasi. Di sisi lain, dilakukan pendokumentasian proses pembelajaran dan penyebarluasan praktik-praktik sukses ke komunitas dan wilayah lain menjadi proses penting agar sebanyak mungkin mengurangi tumpang tindih tindakan dalam peredaman risiko bencana yang sama. Penyebarluasan ini bukan hanya dari sisi geografis, tetapi sekaligus penyebarluasan secara sektoral yang sekaligus juga mengupayakan pengintegrasian usaha-usaha peredaman risiko bencana pada aspek pembangunan dan perikehidupan lainnya dan untuk pembudayaan usaha-usaha
- **Penilaian dan umpan balik.** Penilaian dan memberikan umpan balik cenderung jarang dilakukan. Menilai hasil kegiatan yang disesuaikan dengan hasil yang diharapkan untuk meredam bencana diharapkan dapat digunakan untuk sejak dini mengetahui efektifitas usaha yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya menggunakan hasil evaluasi untuk pemberdayaan komunitas lain dalam meningkatkan kemampuan peredaman bencana.

- **Penyebarluasan dan pengintegrasian**. Mendokumentasikan proses pembelajaran dan penyebarluasan praktik-praktik sukses ke masyarakat dan wilayah lain menjadi proses penting agar sebanyakmungkin mengurang tumpang tindih tindakan dalam peredaman risiko bencana yang sama. Penyebarluasan ini bukan hanya dari sisi geografis, tetapi sekaligus penyebarluasan secara sektoral yang sekaligus juga mengupayakan pengintegrasian usaha-usaha peredaman risiko bencana pada aspek pembangunan dan perikehidupan lainnya dan untuk pembudayaan usaha-usaha peredaman risiko bencana.
- **Pelembagaan dan konsultatif**. Akhir dari proses ini adalah melengkapi kelembagaan peredaman bencana yang bertumpu pada komunitas (mendorong pembentukan organisasi rakyat dalam penanggulangan risiko bencana) untuk menjaga keberlanjutan, penyebarluasan dan pengintegrasian. Pada tahap ini pula dibangun mekanisme konsultatif antara organisasi rakyat dengan aktorlain. Hal in penting dilakukan karena proses intervensi peredaman risiko bencana yang melibatkan pihak lain pada umumnya bersifat ”sebagaian” dari upaya peredaman seluruh risiko. Dalam posisi ini tentunya komunitas secara mandiri yang harus melanjutkan upaya-upaya peredaman tersebut. Pelembagaan ini pada dasarnya merupakan sebuah pemastian bahwa upaya peredaman risiko bencana tidak berhenti.

Pada tahapan pengelolan risiko bencana dapat dilakukan adaptasi terhadap kerangka manajemen risiko (ISO 3100) sebagai berikut:

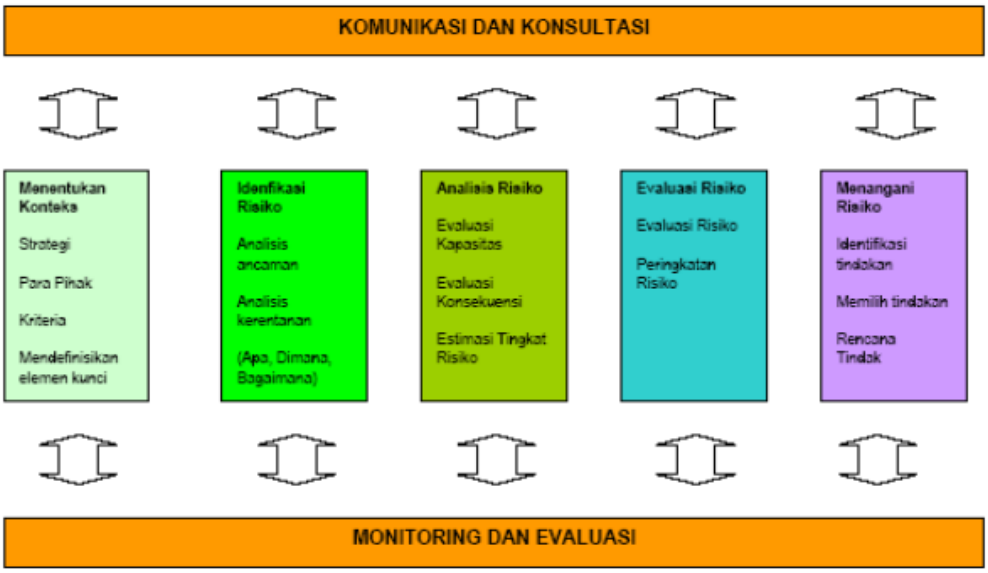

Gambar 5.2. Proses Manajemen Risiko

5.3. KEBERLANJUTAN PRBBK

Faktor Faktor Kesuksesan PRBBK.

- Aplikasikan"*best practice* atau "*good practice* dalam pengembangan PRBBK.
- Keseimbangan antara partisipasi (*bottom-up*) dan input eksternal (*top-down*).
- Mengadopsi struktur organisasi tradisional (masyarakat adat atau lokal) dan mekanisme pengambilan keputusan (formal dan informal).
- Kegiatan pengembangan kapasitas (komunitas dan CO).
- Ragam bentuk dan saluran atau media penyadaran dan pendidikan masyarakat dengan memperhatikan dialek, nilai, dan budaya.
- Kemitraan multipihak. Masyarakat adalah aktor utama, pihak eksternal dan CO hanyalah sebagai fasilitator
- Visi kebencanaan komunitas,kepemilikan komunitas, partisipasi riil komunitas
- Penguatan kapasitas (pelatihan atau workshop) dalam keseluruhan siklus proyek atau program—meliputi aspekteknis dan non-teknis.
- Pendampingan komunitas (*community organizing*) dengan visi perubahan

sosial).

- Pemeliharaan visi PRBBK oleh CO dan komunitas.

Beberapa prinsip keberlanjutan PRBBK adalah:

- Rakyat, manusia, komunitas yang membuat proses PRBBK berkelanjutan.
- Keberlanjutan partisipasi rakyat atau komunitas bergantung pada "*link and match*" antara kegiatan reduksi bencana dan proyek atau program dengan kebutuhan seketika (strategis atau praktis),
- Terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses studi dan pengambilan keputusan dalam identifikasi solusi realistis, kesiapan yang mampu dilakukan, dan solusi-solusi mitigasi,
- Relevansi keterlibatan menciptakan kepemilikan bahkan ketika capaian yang dihasilkan tidak besar, maka keberlanjutan kegiatan PRBBK bisa dipastikan,
- Kesatuan atau kohesivitas rakyat, komuntias, orang, atau masyarakat dalam komitmen reduksi bencana dilanggengkan oleh praktik PRBBK,
- Faktor kelembagaan tetap/menetap yang ada di komunitas (seperti di Mukim Imajiner) mampu melanggengkan proses-proses PRBBK yang bertujuan melindungi penghidupan dan kehidupan rakyat secara berkelanjutan,
- Proses dan partisipasi membangun kepercayaan diri di tingkat komunitas; kebanggaan atas 'berdaulatnya' mereka dalam menggunakan sumber daya lokal dalam meminimalisasi dampak bencana di tingkat lokal (*self-empowerment*),
- Keterlibatan dalam kajian partisipatif menjamin perasaan memiliki, komitmen mobilisasi sumber daya untuk aksi bersama atau individu dalam mitigasi bencana,
- Sikap percaya dan mendukung proses peningkatan kapasitas dalam solusi mitigasi yang 'tepat' dan dapat dilakukan,
- Meskipun makan waktu, tetapi efektif secara dana, dan mandiri.

6

PRBBK DI INDONESIA

6.1. PELEMBAGAAN PRBBK DI INDONESIA

Debat internal di komunitas dan anggota MPBI adalah bagaimana membuat skenario kelembagaan dan pelembagaan PRBBK di berbagai level, baik makro, meso, dan mikro. Di level makro, dibayangkan skenario menciptakan enabling condition atau enabling environment di mana PRBBK dikenali sebagai instrumen penting dalam agenda PRB di level pemerintah maupun LSM/Swasta. Sebagaimana digambarkan di gambar 1, PRBBK dianggap sebagai pilar utama dari kegiatan PRB di Indonesia, yang tanpanya, kinerja PRB akan menjadi timpang.

Debat-debat tentang konsep "desa tangguh" dan komunitas diskusi serta forum "desa siaga,""desa tangguh," dan sejumlah atribut desa yang sensitif bencana merupakan bentuk sekaligus proses-proses menuju pelembagaan.

Simposium PRBBK yang dilakukan secara tahunan dalam empat tahun terakhir merupakan upaya-upaya pelembagaan PRBBK. Masuknya perguruan tinggi dan pusat-pusat riset yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia dalam mendiskusikan dan mendebat bentuk-bentuk PRRBK merupakan tanda positif pelembagaan PRBBK sesuai konteks wilayah dan risiko masing-masing. Sedangkan persepsi berbagai pengambil kebijakan, khususnya Bappeda provinsi dan kabupaten, sering dibayangkan bagaimana PRBBK diintegrasikan ke dalam bagian atau tahapan penyelenggaraan proses Musyawarah Perencanaan.

Masuknya agenda Adaptasi Perubahan Iklim (API) sebagai bagian integral dalam PRBBK atau sebaliknya PRBBK sebagai instrumen utama dalam API, semakin memosisikan PRBBK sebagai alat sekaligus proses dan kerangka kerja (dari sekadar alternatif) utama dalam pengurangan risiko bencana. Untuk itu, sudah saatnya ke depan, di Indonesia, komunitas praktisi selain membangun PRBBK sebagai sebuah "*body of knowledge*" yang didukung oleh fakta-faktaempiris dan studi-studi serta riset sosial dan interdisiplin, perlu diupayakan agar komunitas diberikan draft Kode Etik Praktisi PRBBK dengan nilai-nilai yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diutarakan pada Gambar1.1 dari buku ini.

Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional.

↑	5-Musrenbang Nasional
↑	Paska Musrenbang Provinsi
↑	4-Musrenbang Provinsi
↑	Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus)
↑	Forum SKPD Provinsi
↑	Paska Musrenbang Kabupaten/Kota
↑	3-Musrenbang Kabupaten/Kota
↑	Forum SKPD Kabupaten/Kota
↑	2-Musrenbang Kecamatan
↑	1-Musrenbang Desa/Kelurahan
↑	Musyawarah Dusun, Pokmas (petani, peternak, nelayan, komite sekolah, dsb.)

Proses pelembagaan PRBBK sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, dan praktiknya selalu mendahului sains. Secara historis, proses ini telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Kini setting pelembagaan tanpa disadari telah memasuki tahun ke-5 dalam wajah Simposium PRBBK V di tahun 2009 di mana buku ini nantinya harus direvisi lagi. Proses revisi itu sendiri sebenarnya bagian dari pelembagaan PRBBK. Melihat lebih dari 20-an versi buku tentang PRBBK, dengan perbedaan pada fokus kegiatan dan konteks risiko lokal, PRBBK sekali lagi menunjukan dirinya sebagai kerangka kerja yang bersifat alternatif, yang potensial menjadi arus utama dalam pengelolaan risiko.

6.2. NILAI DAN PRINSIP

Pada Simposium Nasional PRBBK Kedua di Jakarta pada tahun 2006, para praktisi merumuskan prinsip-prinsip PRBBK sebagai berikut.

- Melakukan upaya pengurangan risiko bencana bersama komunitas di kawasan rawan bencana, agar selanjutnya komunitas itu sendiri mampu mengelola risiko bencana secara mandiri.
- Menghindari munculnya kerentanan baru dan ketergantungan komunitas di kawasan rawan bencana pada pihak luar/lain.
- Penanggulangan bencana merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam untuk pemberlanjutan kehidupan komunitas di kawasan rawan bencana.
- Pendekatan multisektor, multidisiplin, dan multibudaya.
- Pendekatan yang holistik (melalui keseluruhan tahapan manajemen bencana) dan integratif (menautkan program dan kebutuhan lain).
- Partisipatif sejak perencanaan hingga pengakhiran program (strata, kelompok, gender).
- Pemberdayaan, bukan sekadar"kembali ke normal"agar bila ancaman yang sama datang lagi, bencana yang sama tidak kembali terjadi.
- Tidak merusak sistem yang sudah ada, termasuk kepercayaan atau tradisi setempat.
- Melakukan kemitraan lokal, maka program akan berlanjut, dalam memilih wilayah yang membutuhkan intervensi pihak luar.
- Membuka diri untuk memfasilitasi lembaga yang lain.
- Kerja kemanusiaan bukan budi baik tapi harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, jadi harus ada prinsip akuntabilitas.
- Mengutamakan peran dan partisipasi masyarakat (lokal) dalam menghadapi bencana.
- Menekankan keterlibatan dalam program edukasi ke masyarakat
- Transparan.

- Membangun kepercayaan dan hubungan timbal balik.

6.3. KODE ETIK PRAKTISI

Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan kode etik adalah kumpulan azas atau nilai moral (Bertens 2005, hlm. 6).

Praktisi PRBBK sebagai sebuah komunitas profesional, hendaknya mempunyai suatu acuan kode etik profesionalisme untuk mencegah moral hazard. Kode etik semacam itu tentunya harus konsisten dan menjadi suatu kesatuan tak terpisahkan dengan latar belakang filosofis dan ideologis yang telah dikupas pada bagian terdahulu. Dalam kaitannya itu, etika ini dibunyikan sebagai suatu kode etik yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku moral para praktisi PRBBK melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan juga akan dipegang teguh oleh sesama praktisi.

Akuntabilitas pertama yang paling tinggi adalah terhadap komunitas di mana PRBBK itu diselenggarakan. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ia sungguh bermanfaat dalam mengurangi risiko bencana. Meskipun PRBBK adalah upaya tanpa akhir, karena risiko tidak mungkin absen, namun risiko bencana diharapkan untuk berkurang ketimbang sebelum dilaksanakannya PRBBK.Tujuan lainnya adalah mencegah dan menekan sekecil mungkin kemungkinan di mana praktik PRBBK justru meningkatkan risiko-risiko baru dan kerentanan-kerentanan baru yang melampaui kapasitas komunitas.

Dalam konteks program/proyek, PRBBK memiliki aspek legal, karena ia dilaksanakan dalam kerangka kelembagaan. Praktik yang dilaksanakan oleh perorangan tidak dipayungi sanksi formal dan oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pemikiran ini maka para praktisi

mempunyai akuntabilitas formal administratif dan prosedural terhadap lembaga yang mempekerjakannya. Mengingat dalam beberapa kesempatan, inisiatif individu yang menjadi drivers of change belajar dari konsep *social entrepreuner* yang dipromosikan Ashoka Foundation, maka individu-individu yang berinisiatif dalam melakukan PRBBK harus bertanggung jawab langsung kepada komunitas dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam banyak konteks di Indonesia, komunitas hidup dalam konteks kerangka pemerintahan yang formal (institusi dan organisasi formal) maupun dalam konteks informal (institusi adat dan agama). Di Aceh, kedua sistem tersebut berjalan paralel—unit komunitas yang formal adalah desa atau kelurahan atau kecamatan, sedangkan yang bersifat adat adalah *gampong* atau *mukim*. Di Flores, NTT, paralel satuan desa kadang paralel atau beririsan dengan satuan-satuan wilayah administrasi gereja.

Dalam konteks itu maka praktik PRBBK tidak bekerja dalam situasi hampa dan harus meletakkan dirinya dan praktik PRBBK dalam suasana akuntabilitas legal pluralisme. Dalam konteks di mana pemerintah adalah unsur struktural yang tunggal, maka aksi sosial yang antikemapanan, pun pemerintah tetap harus dipandang sebagai konteks akuntabilitas.

Seorang praktisi PRBBK sendiri adalah bagian dari komunitas praktisi dan oleh karenanya mempunyai kewajiban dan loyalitas dengan sesama pelaku PRBBK. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk rasa tanggung jawab untuk membuka pekerjaannya, untuk dilihat oleh praktisi lainnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan ikut terus menumbuh-kembangkan PRBBK sebagai suatu lapangan praktik.

Ada banyak sekali prinsip-prinsip yang dapat menjadi panduan perilaku bagi para pelaku PRBBK. Sebagai salah satu contoh, Netting, Kettner dan McMurty (1993:

57—60) mengutip Kapp (1987) menyebutkan tiga nilai etika dalam bekerja dengan komunitas:

- Azas kemandirian (*autonomy*) adalah sikap menempatkan hak dan kebebasan komunitas untuk menentukan jalan hidup sendiri sebagai cerminan dari hak dasar setiap orang terhadap kebebasan menentukan hidup mereka sendiri. Dalam kaitan ini, dalam setiap rencana dan langkah seorang praktisi atau lembaga pelaku PRBBK tetap menghargai hak dasar ini dan memosisikan diri untuk memberikan masukan dan memfasilitasi dipertimbangkannya semua konsekuensi dari pilihan-pilihan.Tetapi pada dasarnya, tetap komunitas itulah yang berhak untuk memutuskan langkah mana yang akan ditempuh.
- Azas manfaat (*beneficence*) adalah cerminan dari semangat altruisme untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi kemaslahatan komunitas. Di samping memotivasi pekerja PRBBK untuk bekerja dengan komunitas, azas ini juga seyogyanya menjadi peringatan agar kita berhati-hati untuk tidak menumbuhkan hubungan yang paternalistik dan pada akhirnya melanggar azas yang pertama tadi, dan lebih buruk lagi, menimbulkan ketergantungan komunitas terhadap pelaku PRBBK atau pihak-pihak lain.
- Azas keadilan (*justice*) adalah semangat untuk memberikan apa yang menjadi hak seseorang atau komunitas. Dalam kaitan ini azas sama-rata-sama-rasa kurang relevan, melainkan bagaimana ”memberikan lebih kepada mereka yang berkekurangan”. Pada intinya, setiap rencana dan langkah pelaku PRBBK harus memastikan bahwa manfaat yang didapatkan dari kegiatan penanggulangan bencana sungguh dibagikan kepada yang berhak secara berkeadilan.

6.4. STRATEGI PENGAKHIRAN (*EXIT STRATEGY*) PRBBK

Pada bagian awal buku ini, PRBBK memiliki tiga tahapan utama yang paralel yakni: entry (*input*), proses-proses (*throughput*), serta exit (*outputs /outcomes*). Dalam konteks proyek, diperlukan strategi pengakhiran (*exit strategy*) yang menjamin

keberlanjutan PRBBK/CBDRM. Strategi pengakhiran suatu program PRBBK bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dampak dan kegiatan setelah program berakhir. Oleh sebab itu, strategi pengakhiran PRBBK merupakan bagian penting dari suatu program.

Menurut Rogers and Macias (2004: 8) strategi pengakhiran (*exit strategy*) suatu program adalah rencana khusus yang menggambarkan bagaimana suatu program akan ditarik dari suatu wilayah sementara pencapaian tujuan pembangunan dapat dipastikan tidak akan terganggu dan perkembangan tujuan lebih lanjut akan dicapai. Tiga jenis strategi pengakhiran suatu program, yaitu fase penurunan (*phasedown*), fase pengalihan (*phaseover*), dan fase penghentian (*phaseout*). Fase penurunan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengurangan aktivitas program secara bertahap dalam rangka persiapan *phaseover* atau *phase-out*. Sedangkan fase pengalihan maksudnya adalah tahap penyerahan tanggung jawab kegiatan atau pengelolaan program kepada lembaga atau individu yang berada di wilayah pelaksanaan program. Sementara itu, fase penghentian adalah kegiatan menarik atau menghentikan sumber daya sebuah program tanpa menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga atau kelompok lain. [8]

Pemilihan strategi pengakhiran program yang akan diterapkan tergantung pada tujuan dan karakteristik suatu program. Jika tujuan dan perubahan yang ingin dicapai oleh sebuah program bersifat permanen dan berkelanjutan (*self-sustaining*), serta keberlanjutan dampaknya tidak memerlukan program atau kegiatan lainnya, maka pendekatan strategi pengakhiran yang dapat diterapkan adalah pendekatan phaseout. Contohnya adalah program yang menghasilkan perubahan perilaku dan pembangunan infrastruktur. Sementara strategi lainnya, yaitu *phasedown* dan *phaseover*, mensyaratkan adanya keterlibatan komponen masyarakat, individu, atau pemerintah dalam menjamin keberlangsungan dampak

[8] "Strategi Mengakhiri Program: Pengalaman Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", Sri Kusumastuti Rahayu dan Rizki Fillaili, Newsletter Yayasan Semeru.

dari sebuah program.[9]

Merujuk pada konsep strategi pengakhiran Rogers di atas, maka program PRBBK lebih tepat bila strategi pengakhirannya menggunakan pendekatan pertama (*phasedown*) dan pendekatan kedua (*phaseover*). Pilihan ini didasarkan pada alasan bahwa kegiatan-kegiatan PRBBK harus dilakukan secara berkesinambungan. Ada atau tidak ada dana, selama ancaman masih mengelilingi suatu komunitas, maka kegiatan PRBBK harus tetap berlangsung.Alasan lain adalah bahwa kegiatan PRBBK mensyaratkan adanya keterlibatan komunitas, di mana mereka sebagai pelaku utama yang akan menentukan arah bagaimana PRBBK dilakukan. Dengan kata lain, pihak mana pun sebagai aktor luar yang mengerjakan PRBBK di suatu wilayah secara perlahan harus menyerahkan sepenuhnya pengelolaan risiko kepada komunitas setempat. Ini juga sejalan dengan prinsip bahwa pihak luar dalam hal ini posisinya tidak lebih dari sebagai fasilitator semata.

6.5. AUDIT PRBBK: INPUT DARI HFA

Salah satu tantangan dalam PRBBK adalah untuk menerapkan dalam metode evaluasi yang partisipatif, diperlukan fasilitator yang memahami ukuran ketahanan komunitas dari *Hyogo Framework for Action*. Tentunya dengan proses fasilitasi yang menggunakan sumber daya lokal dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dalam proses pemeringkatan dari tiap kriteria yang dipilih, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan proksi. Sebagai misal, aspek perencanaan kesiapsiagaan dan perlindungan fasilitas-fasilitas publik serta perspektif jender dan pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial merupakan faktor yang perlu diprioritaskan dalam PRB. Sedangkan perencanaan desa serta semangat kesukarelaan merupakan aspek-aspek yang perlu dipertahankan.

Penggunaan HFA indikator kemajuan dari implementasi PRB yang baru saja dilakukan oleh survei *Views from the Frontline* yang dilakukan oleh Yakkum

[9] *Ibid*

Emergency Unit (YEU) dengan melibatkan multiaktor seperti pemerintah lokal, LSM, dan masyarakat pada tahun 2009 merupakan salah satu bentuk latihan menggunakan kriteria dari indikator HFA, dalam mengukur skala PRB nasional.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, masyarakat atau komunitas lokal merupakan agen yang informatif, yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan dari upaya-upaya PRB dan PRBBK. Sebagai sebuah metode, pengalaman yang kaya tentang audit program berbasis komunitas adalah yang juga diinisiasi oleh *Humanitarian Accountability Partnership* (HAP) yang telah melakukan banyak sekali evaluasi pasca—intervensi bencana, baik di Asia maupun Afrika.

PANDUAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

BUKU
2
TEKNIK DAN ALAT PRBBK

Editor ahli:
Eko Teguh Paripurno & Ninil Miftahul Jannah

Penyusun / Kontributor:
Jonathan Lassa, Eko Teguh Paripurno, Ninil Miftahul Jannah, Puji Pujiono, Amin Magatani, Juni Pristianto, Catur Sudira, & Hening Parlan

Editor bahasa: Theresia Wuryantari

Tata Letak: Koko Sudarmo @1942

Panduan ini disusun dan diterbitkan oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan dukungan PSMB, Lingkar, dan UNDP-SCDRR. Panduan versi bahasa Inggris diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia dengan dukungan APADM dan Planas

2014

1

TEKNIK FASILITASI

PRB yang efektif menuntut terpenuhinya prasyarat adanya kemauan baik dan kemampuan pemangku kepentingan yang terlibat di PRB. Apabila para pemangku kepentingan tidak berpartisipasi dalam mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan tidak menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan PRB, dalam pelaksanaannya paling-paling akan setengah hati, mungkin disalahartikan, dan kemungkinan besar justru akan gagal. Fasilitasi memiliki tingkatan (gambar 1.1) mulai dari tingkat kelompok kecil, hingga pada pelibatan para pemangku kepentingan banyak pihak.

Kedua prasyarat tersebut berimplikasi pada pentingnya upaya-upaya penciptaan kondisi di mana para pemangku kepentingan dapat:

- Mengidentifikasi dan memecahkan masalah
- Mencari pemecahan atas konflik mereka sendiri
- Membuat keputusan kolektif
- Merencanakan bersama
- Cepat melihat apa yang salah
- Mengelola diri mereka sendiri

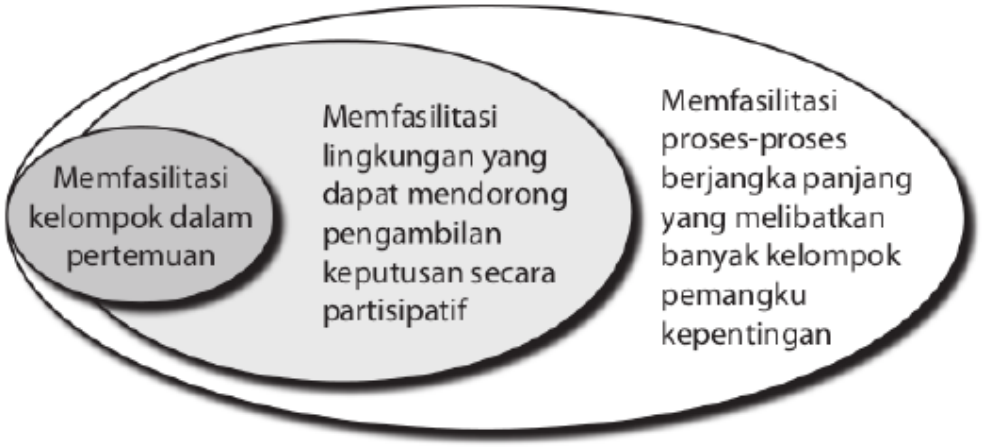

Gambar 1.1 Tingkat fasilitasi

Di sinilah letak pentingnya proses fasilitasi dalam konteks PRB. Fasilitasi diperlukan pada beberapa tingkat dalam PRB yang meliputi pemberian dukungan kepada proses partisipatif yang kompleks dan berjangka panjang yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan yang beragam sampai memfasilitasi satu kali pertemuan saja dengan kelompok kecil (lihat ilustrasi berikut ini).

1.1. ARTI FASILITASI

Fasilitasi dapat dirumuskan dalam beberapa cara. Misalnya fasilitasi dapat berarti bersifat memungkinkan atau membuat mudah atau membantu orang agar dapat memberdayakan diri mereka sendiri hanya hadir di sana, mendengarkan dan menjawab kebutuhan orang-orang, atau memberikan dukungan kepada orang, kelompok, dan organisasi selama proses partisipasi.

Istilah "memfasilitasi/memandu" sudah dipakai dalam berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda. Istilah tersebut digunakan untuk diartikan sebagai suatu peranan tertentu dalam sebuah kelompok, yang diasosiasikan dengan nilai-nilai tertentu pula. Dalam pembahasan ini, akan didefinisikan apa yang disebut dengan "*facilitation*" (memfasilitasi) dan akan diidentifikasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang menyertainya.

Memfasilitasi/fasilitasi berasal dari kata bahasa Inggris "*to facilitate/facilitation*" yang akar katanya berasal dari bahasa Latin "*facilis*" yang mempunyai arti "membuat sesuatu menjadi mudah". Oxford Dictionary mengartikan "*to facilitate*" sebagai: *"to render easier, to promote, to help forward; to free from difficulties and obstacles"*. Secara umum, pengertian fasilitasi dapat diartikan sebagai suatu proses "mempermudah" sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Dapat pula diartikan sebagai "melayani dan memperlancar aktivitas belajar peserta pelatihan untuk mencapai tujuan berdasarkan pengalaman. "Sedangkan orang yang "mempermudah" disebut dengan "fasilitator" (pemandu).

1.2. NILAI-NILAI DASAR FASILITASI

- Demokrasi: Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut ambil bagian dalam proses belajar di mana ia menjadi peserta tanpa prasangka; perencanaan untuk pertemuan apa saja terbuka luas dan dilakukan secara bersama-sama oleh fasilitator dan para peserta; agenda dirancang untuk memenuhi kebutuhan para peserta dan terbuka terhadap perubahan-perubahan para peserta; dan untuk jangka waktu selama fasilitator bekerja dengan mereka,tidak ada struktrur organisasi secara hierarkis yang berfungsi.
- Tanggung Jawab: Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya masing-masing, pengalaman-pengalaman dan tingkah lakunya sendiri. Hal ini mencakup pula pada tanggung jawab atas partisipasi seseorang di dalam sebuah pertemuan atau pelatihan. Sebagai fasilitator, bertanggung jawab terhadap rencana yang sudah dibuat, apa yang dilakukan, dan bagaimana hal ini membawa pengaruh pada isi, partisipasi, dan proses pada pembahasan itu. Fasilitator juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan apa yang terjadi pada fasilitator. Fasilitator harus sensitif terhadap bagaimana dan seberapa besar para peserta bersedia dan mampu memikul tanggung jawab pada setiap pertemuan atau pelatihan. Melalui pengalaman, para peserta dapat belajar memikul tanggung jawab yang semakin besar.

- Kerja sama: Fasilitator dan para peserta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama mereka. Orang mungkin akan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang terhadap sebuah kelompok. Sedangkan fasilitasi/memandu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang bersama dengan sebuah kelompok.
- Kejujuran: Fasilitator mewakili secara jujur nilai-nilai dirinya sendiri, perasaan, keprihatinan, dan prioritas dalam bekerja bersama seluruh peserta pelatihan, dan fasilitator seharusnya menentukan suasana bagi suatu harapan akan kejujuran dari seluruh peserta. Ini juga berarti bahwa fasilitator harus jujur dengan dan terhadap peserta dan terhadap dirinya sendiri menyangkut apa saja yang menjadi kemampuan fasilitator. Fasilitator harus mewakili dirinya sendiri secara adil dan tidak berusaha untuk berbuat terlalu jauh melampaui kemampuannya sendiri dalam peranan sebagai fasilitator.
- Kesamaan derajat: Setiap anggota mempunyai sesuatu yang dapat disumbangkan kepada peserta pelatihan dan perlu diberikan kesempatan yang adil untuk melakukan hal itu. Fasilitator menyadari bahwa dia dapat belajar dari para peserta sebesar apa yang mereka bisa pelajari dari fasilitator. Pada saat yang sama, setiap peserta mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan untuk tidak ikut ambil bagian pada pokok bahasan tertentu dalam suatu pertemuan atau pelatihan.

1.3. TUJUAN FASILITASI

- Menciptakan suasana pertemuan yang konstruktif dan interaktif. Fasilitasi yang baik menciptakan suasana pertemuan yang mendorong peserta untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya secara bebas berbasis saling menghormati, di mana masing-masing peserta berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah. Fasilitasi menghilangkan hambatan atau kendala dan menciptakan suasana informal yang diperlukan untuk membangun kesepahaman dan mencapai kesepakatan.
- Meningkatkan partisipasi dan produktivitas konsultasi. Fasilitasi menjamin

terselenggaranya pertemuan dan konsultasi yang fokus, terstruktur baik dalam kaitan dengan pencapaian tujuan pertemuan, sehingga partisipasi stakeholder menjadi optimal.

1.4. PRINSIP-PRINSIP FASILITASI

- Setiap partisipan memiliki legitimasi untuk mengekspresikan dan menegosiasikan aspirasi dan kepentingannya.
- Perlu ada *logical framework*. Fasilitasi perlu dilandasi logical framework yang merujuk pada proses pengambilan keputusan strategis, untuk memastikan diskusi yang fokus dan terdapatnya hasil-hasil yang nyata dari pertemuan. Untuk itu, fasilitator perlu memastikan diskusi tetap berada pada jalur pembahasan serta efisien dan efektif dalam penggunaan waktu atau manajemen waktu.
- Fasilitator mempunyai peranan untuk memastikan bahwa proses dan mekanisme partisipatif menghasilkan keluaran yang diharapkan.
- Fasilitator idealnya memiliki pengetahuan dan pengalaman memberikan fasilitasi dan kemampuan untuk mengaplikasikan teknik fasilitasi pada substansi yang dibahas.
- Fasilitator mampu mengidentifikasi *"technical tools"* yang tepat (seperti ruang pertemuan yang memenuhi syarat, penyusunan agenda pertemuan, program kegiatan, persiapan makalah, materi, logistik, alat peraga, *meta plan, flip charts*, dan alat lain yang diperlukan).

1.5. LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

- Tetapkan secara jelas maksud dan tujuan pertemuan, apa keluaran utama yang harus dihasilkan dan proses yang diperlukan. Untuk ini dapat disiapkan Kerangka Acuan pertemuan.
- Gunakan teknis visualisasi dan moderasi yang efektif untuk mengorganisasikan pendapat, prakarsa, atau gagasan secara partisipatif.
- Berusaha mendengar semua kontribusi pemikiran peserta dan mencoba menyimpulkan atau mengorganisasikan pendapat dan gagasan yang

dikemukakan.

- Siapkan struktur logis diskusi untuk memastikan fokus pembahasan dan terdapatnya hasil yang nyata dari pertemuan.
- Ciptakan suasana yang menyenangkan dan informal untuk mendorong terwujudnya interaksi yang bebas di antara peserta pertemuan.
- Usahakan agar setiap partisipan berbicara dan memberikan kontribusi dengan memberikan apresiasi atas apa yang dikemukakan dan dukungan emosional.
- Ciptakan dialog yang positif dan konstruktif.
- Konsolidasikan hasil pembahasan ke arah pencapaian kesepakatan.
- Ciptakan kondisi kondusif untuk menciptakan komitmen pada akhir pertemuan untuk menindaklanjuti atau mengimplementasikan hasil pertemuan. Partisipan perlu mengetahui secara jelas apa tindakan selanjutnya yang akan dilakukan. Untuk itu, perlu disusun naskah kesepakatan yang ditandatangani seluruh partisipan. Selain itu, fasilitator perlu memastikan adanya pencatatan nama, alamat, dan kontak partisipan agar memudahkan pada saat akan dilakukan tindak lanjut atau implementasi hasil pertemuan.

1.6. SYARAT UNTUK MENJADI FASILITATOR

Fasilitator harus dapat melihat perbedaan antara guru dan fasilitator, memahami prinsip-prinsip dasar fasilitator dan melaksanakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator.

Ada perbedaan penerapan dalam antara seorang guru, pelatih dan fasilitator. Guru/pelatih mengunakan pendekatan *paedagogy* (konvensional). Guru cenderung menggukan komunikasi satu arah. Dalam menyampaikan informasi atau pengetahuan tidak perlu sintesa. Guru telah memiliki pengetahuan lebih. Oleh karenanya murid ibarat kertas yg harus ditulisi atau gelas yang harus diisi (air). Hal ini menciptakan kapasitas seorang guru cenderung statis, dan murid yang

dinamis. Fasilitator menggunakan pendekatan *andragogy* (orang dewasa). Dalam prosesnya fasilitor menggunakan komunikasi dua arah dan selama proses menggali informasi dan pengetahuan dari peserta dan membuat sintesa, sehingga tidak harus lebih pandai dari peserta.

Dalam melakukan fasilitasi, fasilitator hendaknya merlakukan peserta sebagai orang dewasa yang memiliki pengetahuan dan pengalaman selama perjalanan hidupnya. Oleh karenanya perlu memilih bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta, sopan dan jelas. Biarkan peserta melakukan dinamika diskusi dan komunisi dengan fasilitator bertindak sebagai "pengatur lalulintas" . Membantu peserta untuk menyimpulkan suatu diskusi bukan membuat runyam diskusi Fasilitator harus membantu terjadinya proses pembelajaran bersama sehingga bersama-sama menjadi tambah pandai. Oleh karenanya faslitator harus memberi perhatian sebanyak banyaknya dan merata kepada seluruh peserta dengan memberikan tatapan mata secara adil dan periodik, memberikan wajah manis anda. Oleh karenanya hindari sebanyak mungkin utk membelakangi peserta saat menerangkan atau atau membaca pada tayangan terus menerus.

Dalam melakukan fasilitasi fasilitator tidak boleh:

- Merasa lebih pandai dari peserta.
- Menggurui atau memerankan diri sebagai atasan.
- Mendominasi pembicaraan kecuali pada saat menyampaikan hal-hal baru atau memberikan tugas.
- Defensif atau mempertahankan argumen pribadi.
- Memberi komentar yang membuat peserta merasa dikecilkan atau dilecehkan.
- Mengejek atas kondisi fisik atau pembawaan seseorang.
- Mencemooh jawaban atau presentasi yang dilakukan oleh peserta.

Persiapan sebelum memfasilitasi

- Mengerti tujuan lokakarya / seminar / pelatihan.

- Membuat silabus
- Mengerti jenis lokakarya / seminar / pelatihan.
- Mengerti situasi dan kondisi
- Kenali karakter peserta
- Lembar kehadiran
- Yakinkan pembagian sesi cukup berimbang.
- Siapkan modul atau rencana fasilitasi.
- Siapkan bahan yang dibutuhkan
- Siapkan alat-alat
- Siapkan fisik dan mental
- Bentuk tim fasilitator
- Diskusi dengan kolega atau tim fasilitator.
- Cek peralatan.
- Cek tayangan.
- Cek tata suara, gema, dll.
- Cek tata ruang.

Pada saat fasilitasi

- Usahakan fasilitator hadir sebelum peserta hadir atau paling tidak 15 menit sebelum jadwal.
- Siapkan materi.
- Pastikan peserta telah hadir (dan duduk ditempat yang telah ditentukan)
- Pastikan peserta telah mengisi daftar hadir yang telah disiapkan
- Sampaikan bahwa acara segera dimulai dan tanyakan apakah semua siap?
- Ucapkan salam (pagi / siang / malam)

Pada saat fasilitasi

- Jangan lupa perkenalkan diri kalau baru pertama kali
- Jelaskan topik sesi
- Ingat selalu tips “apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang fasilitator” yang dibahas diawal sesi ini.

- Kendali waktu.
- Cek tujuan sesi.
- Ucapkan terima kasih.

Setelah sesi

- Bereskan kertas-kertas, flipchart dan juga alat-alat yang tidak dibutuhkan sehingga mempermudah proses selanjutnya
- Catatan-catatan penting baik tentang proses maupun hasil harus dikumpulkan dan disimpan dengan baik.
- Istirahat sejenak sebelum memulai sesi berikut.
- Kalau mungkin lakukan secara selang-seling dengan tim fasilitator yang lain agar tidak terlalu capai dan sekaligus mencegah kemungkinan timbulnya rasa bosan peserta
- Demikian beberapa tips menjadi fasilitator yang baik

2

ALAT-ALAT RISET PARTISIPATIF

2.1. PENGANTAR

Dalam bekerja bersama dengan komunitas, disadari atau tidak, ada beberapa alat penelitian sosial yang lazim digunakan oleh berbagai komunitas praktisi PRBBK di Indonesia. Seorang calon fasilitator menyadari alat-alat PRBBK yang dipinjam dari berbagai alat riset studi sosial. Alat-alat yang digunakan bisa merupakan serangkaian kombinasi ataupun aktivitas terpisah, bergantung pada tujuan yang dirumuskan ataupun kegiatan PRBBK yang ingin lakukan. LSM atau praktisi umumnya dengan mudah mengritisi BPS atau data-data Kabupaten Dalam Angka tanpa bisa memberikan data-data bandingan dalam skala mikro. Sikap seorang peneliti PRBBK perlu membebaskan diri dari sikap antipati terhadap data yang dikeluarkan pemerintah.

Selalu saja ada perdebatan tentang pendekatan yang sebaiknya dipilih dalam melakukan penelitian, pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Dalam hubungannya dengan perdebatan kuantitatif versus kualitatif, Kanbur Ed., (2001)[1] yang mengutip Carvalho & White (1997), mendefinisikan: Pendekatan kuantitatif, untuk mengukur dan menganalisis kemiskinan adalah suatu survai yang dilakukan secara acak serta wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data-terutama data-data yang bisa dikuantifikasikan dan analisis yang menggunakan statistik. Sebaliknya, pendekatan kualitatif didefinisikan sebagai penggunaan sampling

[1] Lihat http://unstats.un.org/unsd/methods/poverty/QQZ.pdf [akses terakhir 4 Desember 2011]

tertentu dan wawancara semi-terstruktur atau wawancara interaktif demi pengumpulan data terutama data yang berelasi erat dengan penilaian (*judgements*), sikap (*attitudes*), preferensi, prioritas, dan/atau persepsi terhadap risiko bencana.

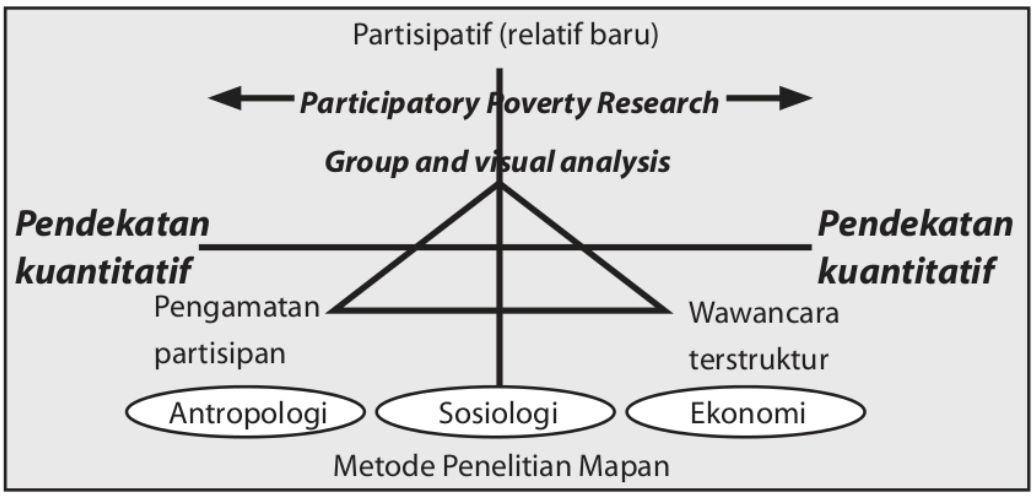

Gambar 2.1 Ilustrasi Dimensi dan Hasil Interaksi Kualitatif-Kuantitatif. Jonathan, Workshop FLMS-PMPB 2004, diolah dari Kanbur (ed.), 2001

Terdapat beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh fasilitator PRBBK. Daftar detail dari keterampilan dimaksud adalah berbagai kombinasi dari penguasaan alat seperti *Rapid Rural Appraisal* (RRA), *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Particiatory Learning Action* (PLA), dan berbagai alat tambahan lain yang khas alat-alat dasar managemen bencana yang partisipatif. Dalam praktiknya, sering fasilitator pemula untuk PRBBK tidak memiliki keterampilan dasar seperti PRA, atau pun kalau memiliki pengetahuan tentang RRA dan PRA, maka alat-alat yang dimiliki belumlah sensitif dengan bencana. Cara atau alat-alat yang sering digunakan untuk pengumpulan data dan informasi serta analisis PRBBK (Lihat Boli, dkk., 2004, dan ET Paripurno, 2006).

Dalam konteks praktik PRBBK di Indonesia, terdapat berberapa alat PRBBK yang baru diciptakan, tidak secara sengaja maupun sengaja. Sebagai contoh, program PRBBK Muhammadyah Disaster Management Center (MDMC) Muhammadyah di

Garut dan Padang, tanpa sengaja menciptakan model *peer-review.* Peta risiko bencana diinisiasi oleh anak-anak sekolah dasar yang kemudian dikoreksi oleh pemuda dan kalangan dewasa. Hasilnya kemudian didistribusikan ke tingkat rumah tangga untuk menciptakan kesadaran baru dari para orang tua terhadap risiko-risiko bencana yang mungkin bakal dihadapi.

Dalam konteks program-program PRBBK yang mencoba melakukan pengarusutamaan hak anak dalam PRBBK,dengan permainan-permainan dan alat seperti *mind-mapping* (peta pikiran) menunjukkan bahwa anak-anak merupakan agen potensial yang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai contoh, anak-anak SMA lebih sensitif dengan isu perubahan iklim karena mempelajari pelajaran Geografi di sekolah. Alat seperti *mind-mapping* memberikan ilustrasi tentang jaringan antarrisiko bencana, analisis sebab akibat dan membantu mengisi gap alat-alat PRA/RRA yang sebelumnya dipakai untuk memetakan risiko, ancaman, dan kerentanan di dalam konteks penanggulangan bencana.

Tabel 2.1. Keterampilan dasar untuk fasilitator PRBBK

RRA – *Rapid rural appraisal*	**PRA/PLA –** *Participatory rural appraisal/participatory learning and action*	**CBDRM –** *Participatory disaster risk management*
• Data sekunder (cari • dan review) • Mencari 'ahli' di kampung • Wawancara semi • terstruktur (cheklist tertulis yang terbuka pada daftar • pertanyaan baru/tak terduga) • Observasi partispatif	• Pemetaan sumber daya • Sejarah kampung • Wealth ranking • (rangking • kesejahteraan keluarga) • Analisis mata pencarian • Analisis tren • Profil aktivitas harian perempuan dan laki-laki • Kalender musim	• Kombinasi PRA, RRA • Peta ancaman dan kalender ancaman • Peta kerentanan /kapasitas • Kombinasi kerentanan, kapasitas dan ancaman • Peta perkembangan kerentanan • Peta Pentagon Aset • Inventaris kapasitas bertahan

RRA – *Rapid rural appraisal*	**PRA/PLA –** *Participatory rural appraisal/participatory learning and action*	**CBDRM –** *Participatory disaster risk management*
• Rentetan analisis: fokus ke kelompok khusus/spesialis • Cerita – case study • Transek	• Diagram Venn (peta kelembagaan) • Peta sebab-akibat • Rangking dan scoring • Peta mobilitas • Pohon masalah	• Indeks persepsi risiko (identifikasi dan rangking) • MSC (most significant change – evaluasi berbasis cerita) • Sejarah lisan khusus bencana • Diskusi kelompok terfokus • Matriks PAR • Mindmapping • HCVA • Institutional game • Survei rumah tangga • Peer-review antar-pelaku PRBBK di desa

Sumber: Modifikasi dari Lassa, Nakmofa dan Ramli, 2007

2.2. PEMETAAN

Secara umum peta dipahami sebagai proyeksi yang memperlihatkan kondisi bio-fisik bagian bumi, dengan lebih mengedepankan cerminan dua dimensi luasan (panjang – lebar). Peta merupakan suatu sumber informasi yang umum dikenal, misalnya:

- peta topografi (memaparkan bentuk permukaan suatu wilayah),
- peta geologi (memaparkan susunan dan jenis batuan penyusun bumi),
- peta kadastral (memaparkan luas dan status tanah),
- peta hidrologi (memaparkan kondisi keairan suatu wilayah).

Dalam metode pengkajian partisipatif, pemetaan merupakan perangkat yang digunakan untuk menggambarkan dan mengkaji kondisi wilayah dan lingkungan dalam dimensi luasan. Pemetaan dilakukan dengan plotting berbagai informasi ke dalam media yang tersedia. Peta menggambarkan keadaan sumber daya umum lingkungan desa, keadaan masyarakat desa secara lebih rinci dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya, sesuai tema-tema yang dipilih. Peta juga dapat

memberikan gambaran mengenai masalah-masalah serta harapan-harapan masyarakat, yang sesuai dengan ruang lingkup dan tema yang akan dibahas. Bagi kegiatan pengembangan masyarakat, pemetaan partisipatif, boleh dikatakan, peta merupakan kunci pertama sebagai sajian informasi. Dalam penanggulangan bencana peta dapat memberikan gambaran parsial tentang kondisi area tertentu; fasilitas keluarga maupun masyarakat yang rentan terhadap ancaman tertentu; lokasi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kesiapan, mitigasi maupun respons darurat. Pemetaan membuat suatu ringkasan ruang tempat-tempat utama. Peta melancarkan komunikasi dan merangsang diskusi mengenai isu penting dalam komunitas. Peta dapat menggambarkan banyak topik antara lain posisi ancaman terhadap aset-aset berisiko maupun posisi sumber daya yang dimiliki komunitas.

Gambar 2.2: Peta Partisipatif Kawasan Longsor Sijeruk
(Sumber: Bambang Sasongko, Laporan PRA Sijeruk, 2008)

Semua informasi ini dapat digambarkan dengan peta dan model, di tanah maupun di kertas. Pemetaan diatas tanah dapat dikerjakan oleh banyak orang secara

cepat dan mudah. Apabila terdapat kesalahan informasi dapat dengan mudah dibenarkan. Cara ini disukai oleh penduduk desa, terutama oleh orang-orang tua, wanita dan anak-anak. Metode ini sederhana karena dikerjakan di atas tanah, yaitu membuat gambar keadaan desa dengan menggores tanah menggunakan tongkat kayu kemudian menandai bagian-bagian penting di desa dengan menggunakan biji-bijian, daun-daunan, dan ranting. Repotnya, selesai diskusi harus menggambar lagi ke kertas untuk mendapatkan dokumentasinya.

Sisi menguntungkan pemetaan di atas kertas terletak pada hasil peta yang dibuat bisa langsung dibawa atau ditinggalkan pada penduduk desa sebagai dokumentasi yang dapat disimpan. Kelemahannya terletak pada luas kertas yang terbatas sehingga menyulitkan dalam menggambar keterangan yang lebih rinci. Selain itu partisipasi masyarakat desa tidak sebesar pada pemetaan di atas tanah, karena jumlah orang yang terlibat tidak sebanyak pemetaan diatas tanah. Pemetaan di atas kertas biasanya dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat desa yang lebih berpendidikan, atau orang-orang muda.

Pembuatan maket merupakan pengembangan dari pemetaan di atas tanah yang dilakukan secara tiga dimensi dan bisa menunjukkan ketelitian yang lebih baik tentang keadaan yang ada. Boleh dibilang, pemodelan adalah “membuat” desa yang sebenarnya menjadi bentuk yang lebih kecil. Oleh karenanya pemberikan “judul” model sebagaimana dalam pemetaan kurang lazim dilakukan. Kelebihan model ini adalah adanya partisipasi yang lebih baik dibandingkan dengan pemetaan di atas tanah. Kekurangan dari cara ini adalah membutuhkan lebih banyak persiapan dan bahan (lumpur, arang, abu, debu, pasir, ranting, rumput, dan apa saja sebagai replika desa), serta tidak dapat dipindahkan informasinya kecuali dengan foto atau digambar di kertas. Selain itu cara ini membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pada kegiatan bertemakan manajemen sumberdaya, maka tema peta dipertajam ke arah itu, misalnya peta: ekologis, akses ekonomi, suberdaya air, dan banyak lagi. Kelompok yang berbeda (misalnya atas dasar kelamin atau umur)

memungkinkan menghasilkan peta yang berbeda walaupun tema dan lokasinya sama. Peta yang dihasilkan adalah cermin dari problem yang diidentifikasikan dan didiskusikan masalahnya oleh kelompok tersebut. Peta-peta tersebut akhirnya dapat dikompilasikan seluruhnya atau sebagian sesuai dengan kebutuhan.

Dalam perspektif manajemen bencana, pemetaan desa secara umum bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk secara bersama memperhatikan kembali sumber daya dan ancaman yang ada, serta menilai kembali kapasitas dan kerentanan desa.

Manfaat pemetaan maupun pemodelan bagi masyarakat / komunitas, pemetaan merupakan usaha untuk memahami "lingkungan sendiri", mencermati "diri sendiri" secara lebih rinci. Manfaat-manfaat tersebut antara lain :

- Masyarakat dapat melakukan identifikasi kritis mengenai letak, besaran, sebaran atas komponen penting kapasitas, kerentanan, sumber daya dan sumber ancaman.
- Masyarakat dapat menarik hubungan antara berbagai sumber daya dan ancaman yang telah teridentifikasi pada posisi keruangan. Hasilnya adalah terpetakannya nilai kapasitas dan kerentanan untuk masing-masing zona pada posisi keruangan, misalnya zona aman / rawan longsor, zona aman / rawan banjir, zona aman / rawan aliran awan panas, zona aman / rawan polusi limbah beracun, jalur pengungsian alternatif.
- Bagi orang luar, pemetaan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang kondisi wilayah, termasuk berbagai kejadian, masalah, hambatan, sumber ancaman dan sumber daya yang ada.
- Manfaat pemetaan lainnya, Pemetaan bersama masyarakat dapat membangun partisipasi yang baik, karena kegiatan ini cukup mudah dilakukan dan relatif menyenangkan.
- Hasil pemetaan umumnya dapat dipakai menjadi dasar penggalian informasi dalam menggunakan teknik-teknik pengkajian partisipatif yang lainnya (misalnya transek, wawancara, ranking).

- Model dan peta dapat dikembangkan untuk menggali informasi perubahan ekologis (sebagai suatu peningkatan ancaman) dari waktu ke waktu yang terjadi di kawasan pemetaan. Perubahan ini dapat disampaikan dalam satu atau beberapa peta.

Model dan peta dapat dikembangkan pada imajinasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi pada beberapa (20 misalnya) tahun yang akan datang. Imajinasi ini secara tidak langsung mencerminkan "cita-cita" masyarakat terhadap desanya, baik berupa rencana pembangunan maupun rencana penyelesaian masalah. (Untuk kawasan rawan bencana misalnya terencanakan lokasi dam penahan sedimen, pos P3K, bunker, jalur alternatif). Imajinasi juga dapat dilakukan mundur ke beberapa tahun (10 misalnya) yang lalu. Dari sisi manajemen bencana bahkan dapat diimajinasikan (bahkan dipraktekkan) dengan lebih baik jika bencana (mendadak atau perlahan-lahan) datang ke sebagian wilayah model ini.

Imajinasi ini bisa dihubungkan dengan hubungan sebab dan akibat yang terjadi. Misalnya bagaimana daerah ini jika hutannya dipangkasi. Maka akibatnya, boleh jadi, akan datang banjir maupun kekeringan tahunan. Imajinasi atas hal yang lebih spesifik juga dilakukan. Misalnya, perubahan apa yang terjadi 20 tahun mendatang atas kawasan pantai ini, jika seluruhnya dialihgunakan menjadi tambak. Dan masih banyak lainnya.

2.3. ALUR SEJARAH

Teknik ini merupakan perangkat serba guna untuk mengurutkan berbagai hal yang diprioritaskan. Teknik ini dapat digunakan cermat dibanding dengan sebelumnya, misalnya teknik "meranking" hubungan kelembagaan desa. Kegunaan teknik ini untuk mengatur beberapa (berbagai) informasi ke dalam susunan yang teratur dengan cara membanding-bandingkan, sehingga masyarakat desa dapat menilai dan membuat prioritas. Oleh karenanya teknik ini boleh dibilang merupakan cara menganalisis informasi yang terkumpul.

Bagi masyarakat, metode ini bertujuan untuk memahami kembali kejadian-kejadian lokal, regional, nasional maupun intenasional yang berpengaruh terhadap "dirinya", sehingga menimbulkan perubahan yang berarti. Masyarakat secara bersama dapat mencari hubungan sebab akibat yang terjadi pada dirinya, serta mencermati (baik maupun buruk) akar penyebab perubahan, sehingga kondisi sekarang terjadi. Metoda ini sekaligus dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan keberadaan dirinya, juga mendorong penghargaan anak muda atas upaya para pendahulunya.

Bagi orang luar, metoda ini akan memberikan wawasan tentang masyarakat tersebut, baik sejarah maupun cara pandang atas perubahan tersebut. Diskusi ini merupakan proses belajar dari pengalaman, sehingga jika terdapat sebab yang mengakibatkan baik dapat dikembangkan lebih lanjut, dan sebab yang mengakibatkan buruk dihindari. Oleh karena itu pula, jika terdapat program (penanganan bencana) akan dikembangkan, semestinya memperhatikan kilas balik tersebut.

Informasi dapat bias karena pemujaan masyarakat yang berlebihan terhadap suatu peristiwa, sehingga kadang-kadang menjadi sulit membedakan peristiwa dengan atau legenda atau mitos. Pembatasan waktu awal menjadi cukup efektif untuk menghindari bias tersebut. Obyektivitas masyarakat dapat bias jika menyangkut pribadi-pribadi. Oleh karena itu dipandu tidak membahas pribadi tetapi kejadian. Kadang-kadang bias saat membahas suatu kejadian buruk yang peran masyarakat secara komunal sangat kuat, sehingga sering aib tersebut disembunyikan; atau juga jika peran oknum pemerintah lokal sangat kuat (karena takut). Ini perlu kiat pemandu agar masyarakat berani jujur untuk upaya lebih baik. Masyarakat dapat sulit menentukan waktu kejadian secara tepat. Untuk itu pemandu perlu menggali ingatan masyarakat agar dapat meletakkan waktu kejadian setidaknya di tepat antara dua kejadian lainnya.

Tabel 2.2. Sejarah Pangan Dusun Ngemplak Parangtritis
(Sumber: KAPPALA - PRA Dusun Ngemplak, 2003)

Periode	Kejadian
1942	Zaman penjajahan Jepang. Bagi masyarakat yang memiliki sawah luas, hasil panen disimpan dan tidak dijual. Hasil petani hanya cukup untuk 3–6 bulan. Pemenuhan kebutuhan pangan bulan berikutnya dari kerja serabutan. Upah kerja berupa beras. Bekerja setengah hari di upah beras 2 batok atau sekitar 1/3 ukuran batok kelapa. Hasil tersebut hanya mencukupi satu kali makan. Bila tidak ada beras, maka masyarakat makan tiwul, garut, singkong, jagung, bonggol pisang klutuk. Masyarakat umumnya makan dua kali, pagi dan sore.
1943	Terjadi banjir besar. Namun tidak ada pengaruh terhadap hasil pertanian karena jenis padi lokal yang ditanam saat itu tahan banjir. Sistem barter masih berlaku karena masyarakat belum memiliki uang. Pemerintah saat itu membagikan uang baru, setiap KK mendapat 4 ketip, 1 ketip cukup untuk membeli 1 batok beras.

2.4. KALENDER MUSIM

Kegiatan kehidupan pada masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh daur musim. Kegiatan ini merupakan salah satu teknik dalam penggalian informasi yang berhubungan dengan "rutinitas" (siklus) dalam jangka waktu "tertentu". Kalender musim dalam pengkajian partisipatif membantu mengkaji data secara kuantitatif dari berbagai informasi dengan berpatokan pada jangka waktu tertentu tersebut, misalnya tiap sepasang musim kemarau - penghujan (ternyata, tidak harus 12 bulan).

Dalam pemetaan sumber daya, kalender musim dapat dikaitkan dengan peta perubahan kemampuan kawasan (secara ekologis) dari waktu ke waktu, berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya. Misalnya, siklus burung tertentu, siklus tumbuhan obat tertentu, siklus air, siklus bambu, dan lainnya. Komponen yang dapat teridentifikasi pada kalender musim ini sangat baik jika dikaitkan dengan komponen sumber daya yang telah dipetakan dalam transek.

Dalam manajemen bencana, teknik ini juga dapat digunakan untuk membandingkan siklus kegiatan yang terjadi dalam masyarakat dengan peristiwa-peristiwa bencana yang umumnya terjadi. Informasi penting yang dapat digali dan pendekatan dengan wawasan manajemen bencana alam misalnya:

- Keadaan iklim, curah hujan, ketersediaan air (kedatangan banjir, risiko longsor, risiko kekeringan),
- Panen (ketersediaan pangan, ketidak-amanan pangan, paceklik),
- Tenaga kerja (kekurangan penggarap di desa, perburuhan ke kota),
- Serangan hama (ketersediaan pangan),
- Serangan penyakit (wabah),
- Ketersediaan pakan ternak,
- Variasi produksi pertanian / peternakan,
- Penghasilan dan sebagainya.

Informasi didapatkan melalui kelompok masyarakat. Bila masyarakat berasal dari beberapa tempat yang berbeda keadaan wilayahnya maka dapat dibentuk kelompok campuran. Perbedaan ini dapat dijelaskan dalam kalender musim, dan akan memperkaya informasi yang diperoleh. Sebaiknya ada warga yang dapat menjelaskan informasi yang dikumpulkan.

Bagi masyarakat, kalendar musim membantu untuk mengkaji pola kegiatan masyarakat sepanjang musim, sehingga terlihat pola pemanfaatan waktu. Dari perspektif manajemen bencana dapat dikaji pola kapasitas dan kerentanan masyarakat, potensi sumber daya dan risiko yang muncul di masyarakat sepanjang tahun.

Kalender musim tersebut bermanfaat dalam upaya memunculkan berbagai pemikiran baru dalam upaya meningkatkan kapasitas dan memperkecil kerentanan masyarakat. Terutama yang perlu dilakukan dalam mengatasi masa kritis (banjir, kekeringan panjang, dan lainnya). Berdasarkan kajian itu pula, strategi terbaik untuk mengelola sumber daya sekaligus bencana dalam waktu sepanjang musim dapat disusun. Cara ini sekaligus juga dapat digunakan untuk merancang program-program baru yang tepat, guna mendukung pengelolaan sumber daya dan bencana yang ada di masyarakat.

Kalender musim tidak harus dilakukan dengan penanggalan masehi. Bisa juga dengan penanggalan tradisional, misalnya bulan satu untuk Januari, bulan dua untuk Februari, dan seterusnya. Lainnya dengan menggunakan penanggalan Arab seperti Syawal, Dzulhijah dan seterusnya, atau Rejeb, Ruwah, dan seterusnya. Bahkan dapat dilakukan dengan pembagian lain, misalnya pada beberapa daerah, menggunakan kalender waktu yang tidak lazim, misalnya dengan wuku dan mongso (*pranotomongso*)

2.5. WAWANCARA

Wawancara merupakan penggalian informasi dari berbagai perspektif yang berbeda (di antara masyarakat, pemangku kepentingan lokal yang lain, pakar eksternal) mengenai peristiwa dan kecenderungan yang menyebabkan stres, kerentanan diferensial, dan efektivitas dari perilaku yang adaptif. Diskusi informal ini dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk mendapatkan informasi umum maupun khusus, untuk menganalisis masalah dan peluang, mendiskusikan rencana, dll. Jenis wawancara semi-terstruktur ini antara lain: wawancara kelompok, diskusi kelompok terfokus, wawancara individual, dan wawancara dengan informan kunci.

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Metode ini merupakan metode yang paling umum di lingkungan ilmuan. Wawancara semi terstruktur dapat dilakukan terhadap perseorangan, keluarga maupun kelompok. Wawancara perseorangan dapat dilakukan terhadap informan kunci atau perorangan pilihan. Informan kunci adalah seseorang yang harus diwawancarai karena dianggap memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman “lebih banyak” dibanding masyarakat lainnya, dan bicara atas pengetahuannya. Perorangan pilihan adalah seseorang “model” / “profil” penduduk yang dianggap bisa mewakili kelompok masyarakat tertentu. Wawancara keluarga dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek kehidupan masyarakat ditingkat keluarga. Keluarga yang diwawancarai merupakan “profil” keluarga yang bisa mewakili kelompok masyarakat tertentu. Wawancara kelompok bolehlah jika disebut sebagai “menjawab pertanyaan

bersama-sama". Diskusi kelompok akan dilakukan untuk mencari kesepakatan pendapat guna menjawab permasalahan / pertanyaan yang ditentukan. Untuk mendinamisasikan keadaan, masyarakat lokal dapat dilatih sebagai pewawancara, sementara dia juga bagian dari kelompok itu yang diwawancarai juga.

Bagi masyarakat lokal, wawancara ini merupakan proses belajar dari orang luar yang langsung berkunjung ke rumah. Kunjungan ke rumah, bagi sebagian masyarakat desa (kota juga?) merupakan penghargaan, yang sekaligus media berbagi informasi. Bagi orang luar, perangkat ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya triangulasi, terutama untuk menangkap hal-hal "kecil", mengenai berbagai aspek kehidupan tingkat keluarga (suatu rumah tangga) petani, yang mungkin sulit tergali pada pertemuan / diskusi kelompok.

Karena sifat wawancara ini "semi terstruktur" maka sebelumnya perlu disusun "pedoman wawancara". Persiapkan permasalahan ringan yang nantinya akan digunakan sebagai pembuka wawancara utama. Siapkan daftar pertanyaan terbuka yang sesuai dengan tema. Jika diterapkan pada wacana manajemen bencana alam, maka"pedoman wawancara" yang dibuat "didesain" untuk keperluan tersebut. Misalnya, topik-topik yang didiskusikan diharapkan bisa digunakan untuk menggali (dan menguatkan) wawasan manajemen bencana yang diterapkan praktek-praktek pengelolaan sumber daya, keadaan rumah tangga, pandangan terhadap permasalahan di desa, dan usulan pemecahannya.

Memilih informan kunci / perorangan pilihan, keluarga maupun kelompok yang akan diwawancarai. Pemilihan ini disesuaikan dengan tema dan tujuan wawancara. Upayakan terbentuk keanekaan umur, jenis kelamin, latar belakang.

Dalam melakukan wawancara sebenarnya tidak ada resep khusus. Namun setidaknya yang harus dibentuk adalah suasana kekeluargaan dan santai. Pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga tidak nampak tersusun memaksa . Hihindari wawancara "gaya" interogasi atau wartawan mengejar berita. Anda

dapat menyampaikan tipe-tipe pertanyaan sebagai berikut:

- Pertanyaan deskriptif, mencari informasi tentang rincian aktifitasnya, misalnya: "Apa yang terjadi setelah air tanah di kawasan ini diambil secara besar-besaran?"
- Pertanyaan struktural, mencari kepastian tentang cara informan memahami situasi dan mengorganisir pengetahuannya, misalnya: "Awan panas terlihat tidak merobohkan seluruh rumah di lokasi tersebut. Mengapa demikian?"
- Pertanyaan kontras, mencari jawaban perbandingan antara dua hal yang jelas-jelas berbeda, misalnya: "Apakah perbedaan cara masyarakat mengelola hutan, sekarang dengan sepuluh tahun yang lalu?"
- Pertanyaan masalah, memberi kesempatan pada informan untuk menganalisis masalah dan melakukan repleksi kasus yang merupakan situasi khusus, misalnya: "Mengapa tiga tahun terakhir ini banjir bandang selalu terjadi di desa ini? Bagaimana cara mengatasinya?"

Cara ini selain mempunyai kelebihan yang bisa dimanfaatkan, mempunyai pembatas yang perlu dihindari, antara lain:

- Dapat menjelaskan pendapat dengan emosi yang detil.
- Dapat digunakan untuk melakukan recek dengan mudah.
- Dapat memunculkan pendapat masyarakat yang pasif (introvert) saat melakukan diskusi kelompok.
- Memerlukan waktu lama.

Beda pewawancara memungkinkan berbeda hasil. Hal ini terjadi karena bias pemanduan oleh pewawancara, sehingga masyarakat memberikan jawaban sesuai yang diinginkan pewawancara. Memungkinkan bias pendapat pribadi, jika pendapat pemberi informasi mewakili kelompok masyarakat tertentu.

Tipe-tipe masyarakat yang berbeda mempunyai kemampuan yang berbeda. Jika sebuah pertanyaan disampaikan ke anak-anak, perempuan, laki-laki, orang tua,

berpendidikan kurang dan lainnya, maka akan didapatkan jawaban yang berbeda-beda. Tipe pengetahuan seseorang akan berhubungan dengan umur, jenis kelamin, pembagian kerja dalam kelompok atau lingkungannya, status ekonomi, lingkungan, sejarah, dan pengalaman.

2.6. ANALISIS MATA PENCAHARIAN

Apakah jenis mata pencaharian berhubungan dengan tingkat kapasitas maupun kerentanan masyarakat terhadap bencana? Jika jawabnya: ya, memahami jenis mata pencaharian dan tingkat pendapatan menjadi suatu bagian penting dalam manajemen bencana. Ini bermakna bahwa tiap perbedaan mata pencaharian dalam masyarakat akan memberikan perbedaan tingkat kapasitas kerentanan.

Hubungan jenis mata pencaharian dengan kapasitas maupun kerentanan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung. Kerentanan langsung misalnya, terjadi pada masyarakat peternak di kaki Gunung Merapi. Di musim kemarau mereka akan mempunyai tingkat kerentanan terhadap bencana awan panas yang lebih tinggi, karena harus mencari rumput mendekati puncak. Kerentanan tidak langsung misalnya, terjadi pada masyarakat petani lahan gambut di Rawa Pulo, kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di kawasan ini akan terjadi penyempitan tabelan (lahan apung) karena adanya perubahan "kebiasaan" menanam padi, dari padi lokal ke padi biasa.

Kegiatan ini merupakan satu teknik penggalian informasi mengenai jenis kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan uang dalam jangka waktu tertentu. Analisis pendapatan dalam pengkajian partisipatif mengkaji tingkat kerentanan maupun kapasitas yang melekat pada jenis kegiatan, yang dilakukan secara kuantitatif dari berbagai informasi. Informasi didapatkan melalui kelompok masyarakat. Bila masyarakat berasal dari beberapa tempat yang berbeda keadaan wilayahnya maka dapat dibentuk kelompok campuran. Perbedaan ini dapat dijelaskan dalam analisis pendapatan, dan akan memperkaya informasi yang diperoleh. Sebaiknya ada warga yang dapat menjelaskan informasi

yang dikumpulkan.

Analisis mata pencaharian dapat dikaitkan dengan peta perubahan kemampuan kawasan dan pola adaptasi masyarakat dari waktu ke waktu, berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya. Misalnya, siklus burung tertentu, siklus tumbuhan obat tertentu, siklus air, siklus bambu, siklus banjir, siklus pasang surut, dan lainnya. Komponen yang dapat teridentifikasi pada analisis pendapatan ini sangat baik jika dikaitkan dengan komponen sumber daya yang telah dipetakan dalam transek.

Didalam manajemen bencana, teknik ini digunakan untuk melakukan analisis risiko dan manfaat berbagai kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya diharapkan masyarakat dapat memilih jenis kegiatan yang sesuai, sehingga bisa memperoleh pendapatan maksimum dengan risiko minimum.

Gambar 2.3. Kalender penghasilan masyarakat (Sumber: Paripurno, PRBBK untuk RAK)

Bagi masyarakat, analisis pendapatan tersebut bermanfaat dalam upaya memunculkan berbagai pemikiran baru dalam upaya meningkatkan kapasitas dan memperkecil kerentanan masyarakat. Terutama dalam upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi masa kritis (banjir, kekeringan panjang, dan lainnya).

Berdasarkan kajian itu pula, strategi terbaik untuk mengelola sumber daya sekaligus bencana dalam waktu sepanjang musim dapat disusun. Cara ini sekaligus juga dapat digunakan untuk merancang program-program baru yang tepat, guna mendukung peningkatan pendapatan sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan bencana.

2.7. SKETSA KEBUN

Sketsa kebun dalam pengkajian partisipatif merupakan penggambaran yang lebih jelas cara yang dilakukan masyarakat dalam mengelola lahan kebun / halaman rumahnya. Sketsa kebun dari beberapa lokasi yang berbeda akan dapat menunjukkan variasi dari luas lahan yang dimiliki, jenis tumbuhan yang ditanam, pola tanam dan pengelolaannya. Keputusan tentang gambaran sketsa kebun yang diambil oleh sebagian besar masyarakat desa dapat mencerminkan/merupakan gambaran umum dari taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif manajemen bencana, sketsa kebun secara umum bertujuan menfasilitasi masyarakat untuk mengkaji kembali sumber daya dan ancaman yang ada di tingkat keluarga secara lebih rinci, serta menilai kembali kapasitas dan kerentanan keluarga.

Teknik sketsa kebun ini bagi orang luar secara tidak langsung dapat dimanfaatkan untuk membaca kecenderungan masyarakat lokal dalam memahami manajemen sumber daya. Di beberapa keluarga, ladang pekarangan merupakan gudang makanan hidup. Di pekarangan ini ditanam berbagai buah-buahan dan sayuran yang secara periodik dapat menyelamatkan kebutuhan pangan sehari-hari. Kondisi potensi dan ketahanan masyarakat dalam keamanan pangan tercermin

melalui pemanfaatan lahan, misalnya penggunaan kebun untuk:

- Tanaman pangan alternatif (ketela, ubi, jagung dan lainnya)
- Tanaman sayur (ketela, ubi, pepaya, nangka, turi, beluntas, dan lainnya)
- Tanaman buah (nangka, jambu, pepaya dan lainnya)
- Tanaman obat dan bumbu (jahe, lengkuas, kunyit, pace dan lainnya)

Ketahanan dan potensi masyarakat atas manajemen bencana tercermin dalam pengelolaan ruang, yang sekaligus digunakan untuk menerapkan strategi penyesuaiannya tercermin dalam pengelolaan pemanfaatan ruang khusus, misalnya untuk yang bernuansa bencana alam:

- Kamar tidur sekaligus bunker, ruang aman, ruang ibu hamil dan jompo.
- Bale-bale, dingklik panjang untuk evakuasi ibu hamil dan jompo.
- Bak kamar mandi untuk pelindung awan panas.
- Kolong meja besar, bale-bale, tempat tidur untuk berlindung dari gempa.
- Loteng, lesung untuk menyiasati banjir.

Bagi orang dalam, pembuatan sketsa kebun ini merupakan upaya berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan orang lain. Proses ini secara tidak langsung merupakan upaya penyadaran diri. Petani juga berkesempatan untuk mengkaji kembali "tatanan" kebunnya agar bisa bermanfaat lebih besar.

2.8. AKTIVITAS KELUARGA

Teknik ini digunakan untuk mengkaji penggunaan waktu masyarakat sehari-hari. Dilakukan untuk mendapatkan pola (kecenderungan) kegiatan laki-laki, perempuan, anak-anak dalam suatu keluarga atau kelompok masyarakat. Kajian aktifitas keseharian berhubungan dengan perubahan alamiah tingkat peran serta posisi individu terhadap akses sumber daya, yang berkenaan dengan kapasitas dan kerentanannya terhadap bencana. Penting dicermati dalam analisis aktifitas keseharian ini adalah pola hubungan ketergantungan dan ketidakseimbangan dalam akses sumber daya; terutama berkenaan dengan kapasitas masing-masing anggota keluarga.

Teknik ini (dengan menggabungkan data wawancara, pemetaan, aktifitas) dapat digunakan untuk menelusuri kapasitas dan kerentanan masing-masing anggota keluarga dalam ruang dan waktu tertentu. Jika aktifitas ini dirincikan dalam waktu siklus penanganan bencana, maka kapasitas masing-masing anggota keluarga dalam masing-masing siklus penanganan bencana dapat terpetakan.

Bagi masyarakat diskusi ini akan memunculkan kesadaran masyarakat (diri mereka) sebagai pelaku dalam siklus penanganan bencana dalam sehari-hari. Diskusi ini akan memunculkan pemikiran-pemikiran untuk meningkatkan kapasitas maupun mengurangi kerentanan melalui merubah alokasi waktu keseharian.

Bagi orang luar, informasi yang terkumpul dalam, kegiatan ini menunjukkan adanya manajemen waktu yang dilakukan tiap komunitas. Masing-masing komunitas yang khas akan mempunyai pola manajemen waktu yang berbeda, misalnya komunitas pedagang, nelayan, petani dan petambak. Manajemen waktu ini menjadi penting guna menghitung ketersediaan waktu untuk melancarkan program. Perubahan alokasi waktu sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, jika memungkinkan perlu dilakukan perbandingan aktifitas keseharian dengan beberapa tahun yang lalu, misalnya dikaitkan dengan sebelum dan sesudah perubahan-perubahan penting.

2.9. MATRIKS PEMERINGKATAN

Teknik ini merupakan perangkat serba guna untuk mengurutkan berbagai hal yang diprioritaskan. Teknik ini dapat digunakan cermat dibanding dengan sebelumnya, misalnya teknik “meranking” hubungan kelembagaan desa. Kegunaan teknik ini untuk mengatur beberapa (berbagai) informasi ke dalam susunan yang teratur dengan cara membanding-bandingkan, sehingga masyarakat desa dapat menilai dan membuat prioritas. Oleh karenanya teknik ini boleh dibilang merupakan cara menganalisis informasi yang terkumpul.

Perangkat ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan kegiatan yang paling

tepat, sesuai dengan kondisi lingkungannya, kapasitas dan kerentanannya. Cara ini memungkinkan program dapat berjalan dengan baik. Pemeringkatan dilakukan dengan membuat kriteria yang ditentukan / disepakati.

Pengurutan bisa berdasarkan pada (misalnya) kekayaan, tingkat keuntungan, tingkat kebutuhan, urutan produktifitas, tingkat kerentanan, kesesuaian lahan, kapasitas lahan, penyebab ketidaknyamanan, pemberi informasi dini dan hubungan yang mungkin ada diantara masalah-masalah tersebut. Prioritas dapat berubah setiap waktu, tergantung kebutuhan dan tujuan masyarakat. Oleh karena itu, biarkan masyarakat mengaturnya sendiri.

Variasi ranking dalam manajemen bencana misalnya, dapat dilakukan dengan mencari hubungan tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas kawasan berdasarkan batas area / wilayah masyarakat (berdasarkan jenis tanah, kemiringan lereng, lokasi terhadap sungai). Matrik ranking juga dapat dibuat dengan keterangan tambahan yang diperlukan menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pemecahan masalah yang diidentifikasi.

Alat ini sebenarnya lebih tepat sebagai cara untuk memutuskan atau menentukan pilihan. Berbagai jenis kajian yang dilakukan antara lain :

- Memilih teknologi yang diterapkan (misalnya menentukan pilihan teknologi bendung: dari bambu, atau kayu, beton, tanah, batu?; teknologi bunker: bentuk vertikal atau lateral?; bahan papan, kayu, beton atau bambu?)
- Memilih prioritas masalah utama yang akan diatasi, misal: penanganan kesehatan, infrastruktur atau pemukiman
- Memilih prioritas / peringkat pendapatan
- Cara meranking dengan memilih sebagian ini dapat digunakan untuk membantu membuat peringkat cara sebelumnya telah dilakukan, tetapi mempunyai nilai yang sama.
- Pemeringkatan masalah ini akan lebih baik jika diikuti dengan analisis sebab akibat dengan menggunakan diagram pohon.

2.10. TRANSEK

Secara harfiah, transek adalah penampang / irisan / profil muka bumi. Dalam pengkajian partisipatif, transek merupakan kegiatan pengamatan sekaligus langsung membuat profil kawasan sekaligus melakukan pengamatan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara berjalan menelusuri / memotong suatu wilayah yang telah disepakati, yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan. Transek dikenal sebagai perangkat pengkajian partisipatif yang pokok dan representatif jika diterapkan pada manajemen bencana. Perangkat ini tidak hanya memberikan informasi situasi kawasan dari sisi dimensi panjang dan tinggi, tetapi juga hal-hal lain sebagai penjelas peta / model yang dibuat. Hasil pengamatan atas lintasan tersebut dituangkan ke dalam bagan atau penampang untuk didiskusikan lebih lanjut.

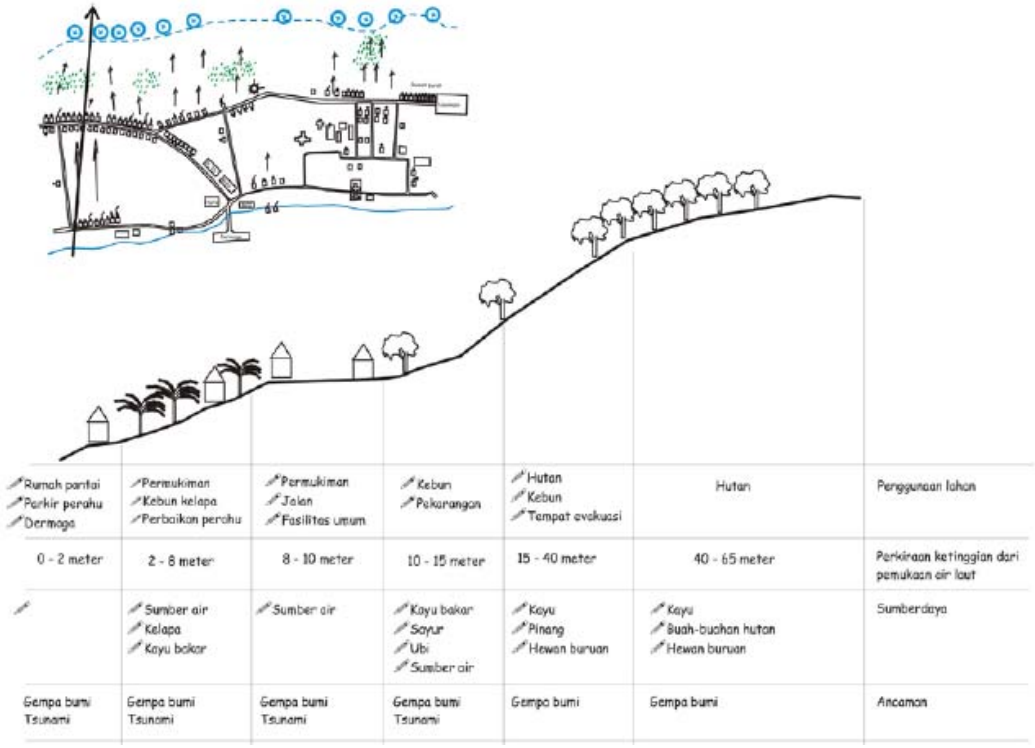

Rumah pantai Parkir perahu Dermaga	Permukiman Kebun kelapa Perbaikan perahu	Permukiman Jalan Fasilitas umum	Kebun Pekarangan	Hutan Kebun Tempat evakuasi	Hutan	Penggunaan lahan
0 - 2 meter	2 - 8 meter	8 - 10 meter	10 - 15 meter	15 - 40 meter	40 - 65 meter	Perkiraan ketinggian dari permukaan air laut
	Sumber air Kelapa Kayu bakar	Sumber air	Kayu bakar Sayur Ubi Sumber air	Kayu Pinang Hewan buruan	Kayu Buah-buahan hutan Hewan buruan	Sumberdaya
Gempa bumi Tsunami	Gempa bumi Tsunami	Gempa bumi Tsunami	Gempa bumi Tsunami	Gempa bumi	Gempa bumi	Ancaman

Gambar 2.4 : Transek Kampung Marsinam
(Sumber: Sigit Purwanto, 2009)

Transek dapat dilakukan dengan melintang ("lurus"/potong kompas, lurus melintasi desa) dari ketinggian ke rendahan dan kembali ke ketinggian, sehingga

ekspresi morfologi / profil terlihat jelas. Selain transek dapat dilakukan secara membujur (menelusuri alur sungai, jalan, batas desa / hutan, aliran lahar, jalan baru, jalan setapak dan sebagainya). Alternatif lainnya, transek dapat dilakukan dengan melingkar, bolak-balik maupun zig-zag. Dalam suatu kegiatan, transek dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda dapat melakukan transek dengan lintasan yang berbeda.

Transek dapat dilakukan dengan memperhatikan pokok permasalahan (tematis). Maksudnya, komponen informasi yang digali ditekankan pada hal-hal penting yang sesuai dengan permasalahan / tema itu. Oleh karena itu, selain transek sumber daya desa (umum), dapat pula dilakukan transek sumber daya alam, transek ekologis, transek (untuk menilai) dampak bencana dan lainnya. Prinsipnya, transek menjelaskan makna dan komponen yang ditemui, dan dikaitkan dengan tema-tema yang dipilih, jika tema itu terbuka, maka penjelasnya akan sangat luas (maksudnya, menjadi panjang dan lebar).

Dalam perspektif manajemen bencana, transek / penelusuran desa secara umum bertujuan memfasilitasi masyarakat untuk melihat kembali sumber daya dan ancaman yang ada secara lebih rinci, serta menilai kembali kapasitas dan kerentanan desa. Untuk kebutuhan itu maka dalam pelaksanaan transek sekaligus didiskusikan:

- Masalah - masalah manajemen sumber daya: hama dan penyakit tanaman, berkurangnya kesuburan tanah, berkurangnya volume air di musim kemarau, ketinggian air pasang, tingkat erosi, penggundulan hutan dan lainnya.
- Potensi desa yang tersedia namun belum dikelola dengan baik untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan: tanaman obat, bunker morfologi, sistem pengelolaan air.
- Pandangan dan harapan-harapan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan kawasan.

Bagi masyarakat dalam, transek bermanfaat sebagai media "berbagi rasa", karena mereka bisa mengenal secara langsung segala permasalahan yang ada kepada orang luar. Dalam manajemen bencana misalnya, transek untuk merencanakan program penanggulangan bencana akan sekaligus dapat berfungsi sebagai upaya membangkitkan semangat "hidup".

Kegiatan ini akan membantu orang luar (tim pengkajian partisipatif) mengamati langsung keadaan lapangan serta melengkapi informasi yang sudah didapat. Masyarakat lokal akan menjelaskan berbagai aspek geografis maupun aspek sosial selama kegiatan perjalanan. Diskusi akan terbangun selama perjalanan, terutama pada lokasi-lokasi penting, yang berlanjut pada saat penyusunan hasil perjalanan.

Dalam perencanaan program, transek dapat digunakan sebagai observasi langsung bagi kegiatan penjajagan kebutuhan dan potensi, sedang pada evaluasi program dapat digunakan untuk melihat perubahan yang terjadi.

Transek dapat dikembangkan untuk menggali informasi perubahan ekologis (sebagai suatu peningkatan ancaman) dari waktu ke waktu yang terjadi. Perubahan ini dapat disampaikan dalam beberapa penampang. Transek dapat dikembangkan pada imajinasi masyarakat terhadap perubahan yang terjadi pada beberapa (20 misalnya) tahun yang akan datang. Imajinasi ini secara tidak langsung mencerminkan "cita-cita" masyarakat terhadap desanya, baik berupa rencana pembangunan maupun rencana penyelesaian masalah. (Untuk kawasan rawan bencana misalnya terencanakan lokasi dam penahan sedimen, pos P3K, bunker, jalur alternatif). Imajinasi juga dapat dilakukan mundur beberapa tahun (10 misalnya) yang lalu. Dari sisi manajemen bencana bahkan dapat diimajinasikan (bahkan dipratekkan) dengan lebih baik jika bencana (mendadak atau perlahan-lahan) datang ke sebagian wilayah model ini. Imajinasi ini bisa menghubungkan sebab dan akibat yang terjadi. Misalnya, bagaimana daerah ini jika hutannya dipangkasi. Maka akibatnya, boleh jadi, akan datang banjir tahunan dan kekerinan tahunan. Imajinasi atas hal yang lebih spesifik juga bisa dilakukan.

Misalnya, perubahan apa yang terjadi 20 tahun mendatang atas kawasan pantai ini, jika seluruhnya dialihgunakan menjadi tambak. Dan masih banyak lagi.

Dalam melaksanakan transek, terdapat beberapa hal yang baik dilakukan:

- Sebaiknya senantiasa bertanya dan berdiskusi dengan anggota tim (terutama masyarakat) tentang hal-hal yang diamati. Jangan menyela keterangan warga masyarakat dan menunjukkan sikap tidak percaya pada informasi yang diberikan. Luangkan waktu yang cukup untuk berjalan dan untuk diskusi selama dan setelah perjalanan. Jangan melakukan kegiatan dengan terburu-buru.
- Mencatat semua keterangan masyarakat, baik yang ikut dalam tim maupun yang dijumpai di jalan, terutama yang berhubungan dengan pokok bahasan yang tengah dikumpulkan informasinya (misalnya masalah-masalah, usulan pemecahan dsb).
- Jika membawa kamera foto / video, abadikan objek-objek yang relevan dengan tema untuk dipakai sebagai penggerak diskusi bersama masyarakat pada waktu-waktu mendatang.
- Yang menjadi masalah kadang-kadang adalah pelaksanaan transek yang harus siang hari, cuaca baik (tidak hujan), dan waktu lama. Waktu lama di siang hari merupakan hambatan yang serius untuk transek karena masyarakat pada umumnya mempunyai kegiatan sendiri pada siang hari sehingga sulit untuk melakukan kegiatan sehari penuh. Oleh karena itu, jika sangat terpaksa, transek dapat dilakukan dalam ruangan. Perlakuannya serupa dengan pemetaan, yang secara imajinasi. Mengingat masyarakat sangat mengerti seluk-beluk desa, hal ini masih mungkin untuk dilakukan, tetapi informasi yang didapat jelas jauh lebih sedikit dibanding dengan perjalanan ke luar.

2.11. ANALISIS PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

Kerangka Penghidupan Berkelanjutan (PSL) juga digunakan untuk memahami berbagai aspek kehidupan pedesaan dengan fokus sebagai berikut: (1) pola

(patterns) penghidupan dan strategi penghidupan individu, kepala keluarga (KK), dan komunitas desa dan perubahan penghidupan sepanjang waktu tertentu; (2) mencermati dan mengamati kecirian dan hambatan-hambatan pada kelompok-kelompok rentan/miskin/marjinal yang dibedakan daripada mereka yang dianggap lebih baik; (3) konteks kelembagaan hidup dan penghidupan pedesaan dengan tekanan pada faktor-faktor penghambat/rintangan ketimbang pada upaya fasilitasi pilihan penghidupan komunitas; (4) Sumber Daya Alam (SDA) masyarakat dan interaksi dengan strategi penghidupan dan akses kaum miskin/marjinal atas sumber daya yang tersedia.

Definisi PRB dalam paradigma Penghidupan Berkelanjutan menunjukkan bahwa bencana sebagai "kejadian" tetapi juga "proses" terjadinya kehilangan atau kerusakan aset-aset penghidupan. PRB selanjutnnya dipahami sebagai sebuah upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mengurangi atau mencegah terjadinya risiko kehilangan aset penghidupan (manusia, aset sosial, tanah/air/udara, fisik/ infrastruktur, finansial, dsb.) dengan penekanan pada saat prabencana.

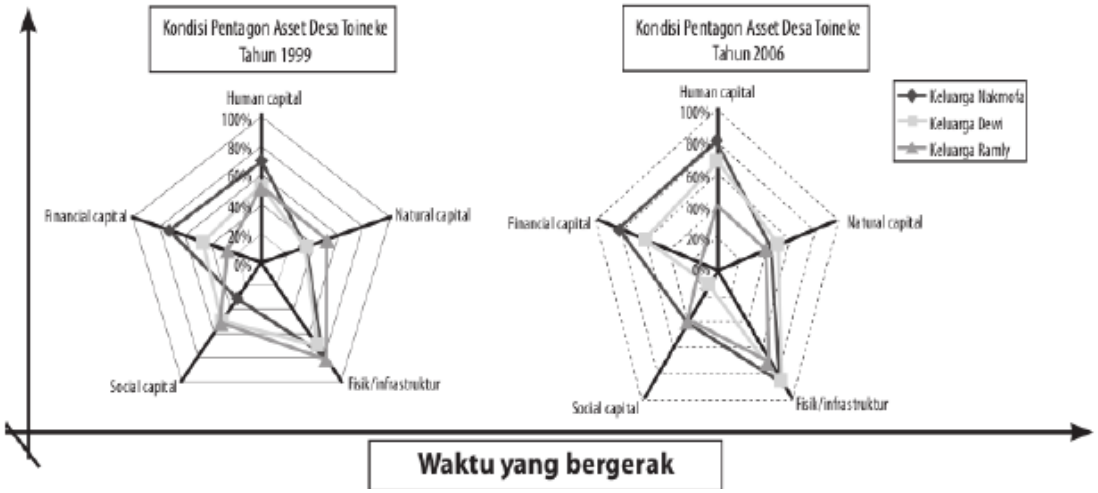

Gambar 2.5. Ilustrasi Tren Perubahan Aset dalam 5 Tahun Terakhir di Desa Toineke (PMPB 2007 dalam Saragih, Lassa dan Ramli, 2007)- diubah untuk konteks pra & pascabencana.

Gambar 2.6 memberikan ilustrasi bahwa suatu unit keluarga atau komunitas tertentu melangsungkan hidup dan penghidupannya dengan bertumpu pada berbagai aset yang dimilikinya atau yang secara material dan imaterial melekat pada unit dimaksud. Aset tersebut meliputi modal sosial, modal manusia (SDM), modal finansial ekonomi, modal sumber daya alam dan lingkungan, serta modal fisik infrastruktur. Tetapi akses pada modal-modal tersebut kerap dimodifikasi oleh peran relasi sosial (seperti jender, kelas ekonomi, umur, etnisitas, agama/ ras), pengaruh kelembagaan (aturan, adat, kebiasaan, pasar), dan organisasi (seperti LSM/INGOs, administratur dan pemerintah dalam arti luas, lembaga agama seperti mesjid dan gereja, dan organisasi keagamaan dalam arti luas) yang berada dalam konteks kerentanan (meliputi kejutan seperti bencana alam dan perang/konflik, maupun tren seperti krisis ekonomi, harga yang fluktuatif, pertumbuhan penduduk dan masalah kependudukan,serta perubahan teknologi dan kebijakan makro).

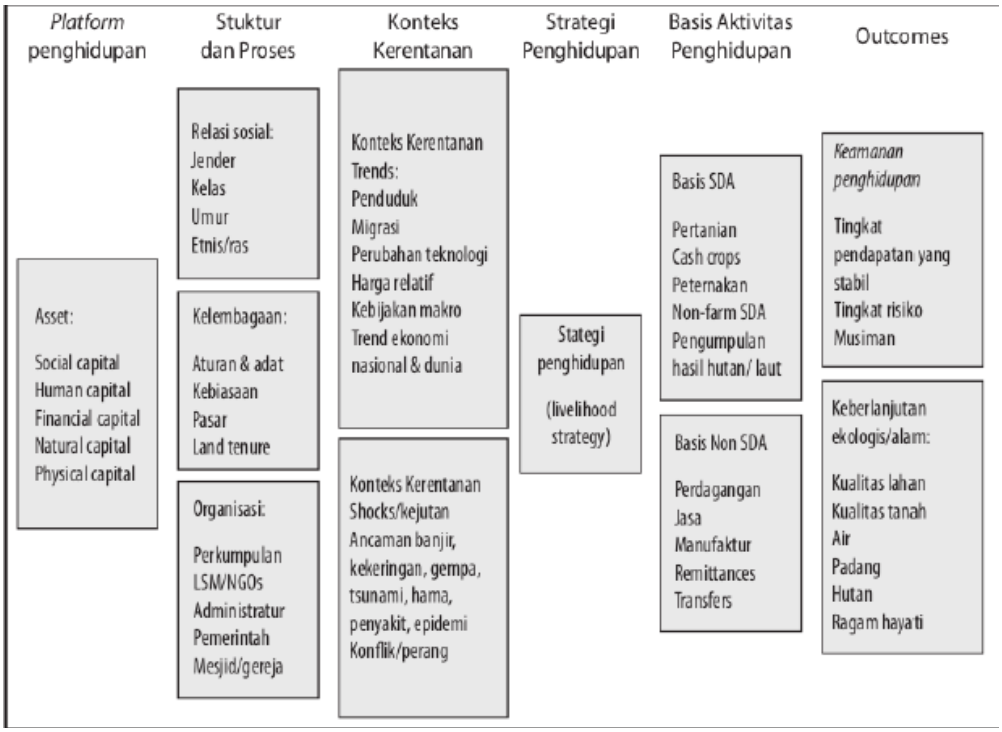

Gambar 2.6 Daftar Periksa Penelusuran Sistem Penghidupan Masyarakat
Sumber: Ellis (2000) dalam Saragih, Lassa dan Ramli (2007)

Berawal dari konteks tersebut, strategi penghidupan suatu unit keluarga atau unit komunitas terdiri dari berbagai aktivitas yang dibagi dalam dua kategorisasi yakni aktivitas penghidupan berbasis sumber daya alam dan non suberdaya alam. Termasuk sumberdaya alam misalnya pertanian, peternakan, perikanan, komoditas, hasil hutan nonkayu dan berbagai tanaman lainnya. Non sumberdaya alam misalnya perdagangan, jasa, industri dan manufaktur, bantuan dan kiriman. Hal ini menjadikan pada capaian keamanan penghidupan seperti tingkat pendapatan yang stabil, risiko yang berkurang dan capaian keberlanjutan ekologis yakni kualitas tanah, hutan, air, serta keragaman hayati yang terpelihara.

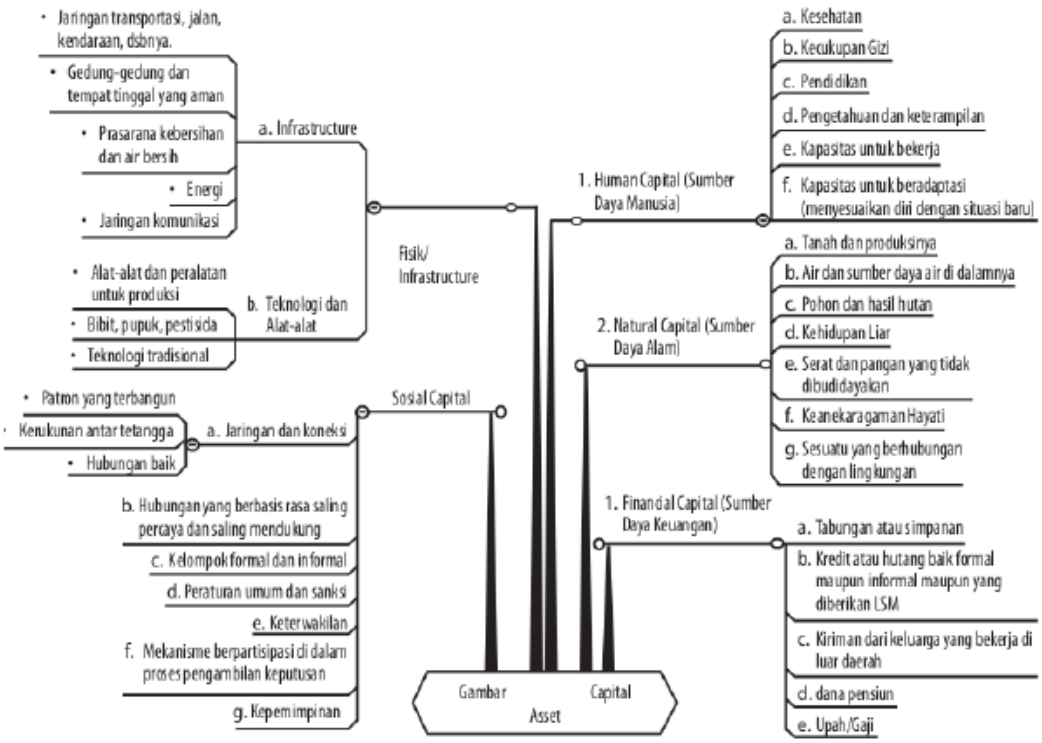

Gambar 2.7. Capital Asset yang berpotensi hilang atau bertambah sebelum, ketika, dan setelah bencana (Gambar dikutip dari Saragih, Lassa dan Ramli, 2007).

2.12. ANALISIS PELAKU

Analisis pelaku (*stakeholder analysis*) pertama kali digunakan dalam ilmu manajemen sebagai metode yang mengidentifikasi atau melayani kepentingan

berbagai pemangku kepentingan dalam bisnis. Analisis ini berakar pada studi ekonomi politik, beserta arena studi yang berdekatan seperti analisis manfaat-biaya dan ekonomi lingkungan serta berkaitan dengan teori pengambilan keputusan, multi-criteria analysis, AMDAL, PRA dan Resolusi Konflik (Grimble dan Wellard, 1996; ADPC 2003 dalam Lassa, Nakmofa dan Ramli, 2007).

Analisis pemangku kepentingan juga digunakan sebagai prosedur dalam mengidentifikasi dan memahami orang/kelompok kunci yang memiliki kepentingan dalam sebuah proyek (contoh: CBDRM), isu, atau sistem. Dengan metode ini maka pihak yang secara positif dan/atau negatif dipengaruhi oleh intervensi luar, proyek, kebijakan, perubahan, dan/atau bencana dapat dianalisis/ diidentifikasi. Sering digunakan dalam PRA/RRA.

Analisis pelaku / aktor merupakan salah satu strategi untuk mengetahui orang kunci dan pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi bencana di kampung, desa, atau komunitas. Pemetaan pelaku-pelaku kunci beserta pihak-pihak yang mau, bisa, dapat mengelola bencana harus dan perlu terlibat (dilibatkan) dalam komunitas harus dilakukan oleh parapihak yang berisiko. Mereka pula yang memberikan rekomendasi strategis dan berbagai kegiatan yang mendorong melanggengkan partisipasi para pemangku kepentingan utama.

Tabel 2.3. Pemetaan Stakeholder PRBBK di Desa X

Pihak yang dapat mendukung PRBBK	
Pihak yang diperkirakan menolak rencana PRBBK	
Status hubungan dengan komunitas	
Kepentingan dan harapan tiap pihak	
Pengaruh kekuasaan (power)	
Peran dalam PRBBK	
Aksi PRBBK yang diperlukan	

Alat PRA yang sering digunakan untuk menghubungkan faktor kelembagaan dalam

hubungan dengan masyarakat adalah Diagram Venn (tidak dibahas dalam buku ini). Akan tetapi ilustrasi penting bisa dilihat di atas merupakan alat sederhana yang bisa dipakai di tingkat komunitas untuk melalukan pemetaan kelembagan dengan sumbu horizontal menggambarkan tingkat pengaruh yang merugikan semakin ke kanan, titik tengah adalah netral sedangkan semakin mendekati titik nol secara horizontal adalah lembaga-lembaga yang menguntungkan bagi komunitas desa. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat kuasa yang dimiliki.

Sebagai contoh, di Aceh, *keucik* (kepala desa) di sebuah desa imajiner memiliki kuasa yang besar tapi selalu ada kemungkinan bahwa ia bersama dengan lembaga lain seperti kelompok mantan milisi tertentu merupakan faktor penghambat pembangunan desa.Tentunya ini hanyalah sebuah contoh imajiner. Sedangkan seorang janda miskin, berada di kuadran menguntungkan (bagian dari kaum miskin) tetapi dengan skala kuasa yang rendah.

Di Wolodhesa, Sikka, Flores, NTT, anak-anak sekolah memosisikan kepala Pustu dan kelompok sebagai pihak yang dalam kenyataan merugikan meskipun dengan level pengaruh yang sedang.Sedangkan pihak loggers diposisikan setara dengan kepala dusun serta bidan desa namun berada diposisi merugikan. Menurut anak-anak tersebut, seorang pastor memiliki kuasa yang paing tinggi di desanya melebihi kepala desa, namun pada saat yang bersamaan merupakan pihak yang merugikan.

PRBBK yang berkelanjutan mengandaikan naiknya peran janda dan kaum buruh, anak-anak laki-laki dan perempuan, dan para pemangku kepentingan lainnya meningkatkan kuasanya lewat partisipasi aktif (pikiran dan tenaga) sebagai pemangku kepentingan yang utama dalam pembangunan desa, bersama dengan tokoh pihak-pihak terkait lainnya, dan berbagai pemangku kepentingan *status quo* pemegang kuasa. Semua aktor yang berposisi merugikan perlu ditemu-kenali untuk ditransformasi menjadi pihak yang menguntungkan kegiatan PRBBK, di mana kuasa pengambilan keputusan lebih simetris.

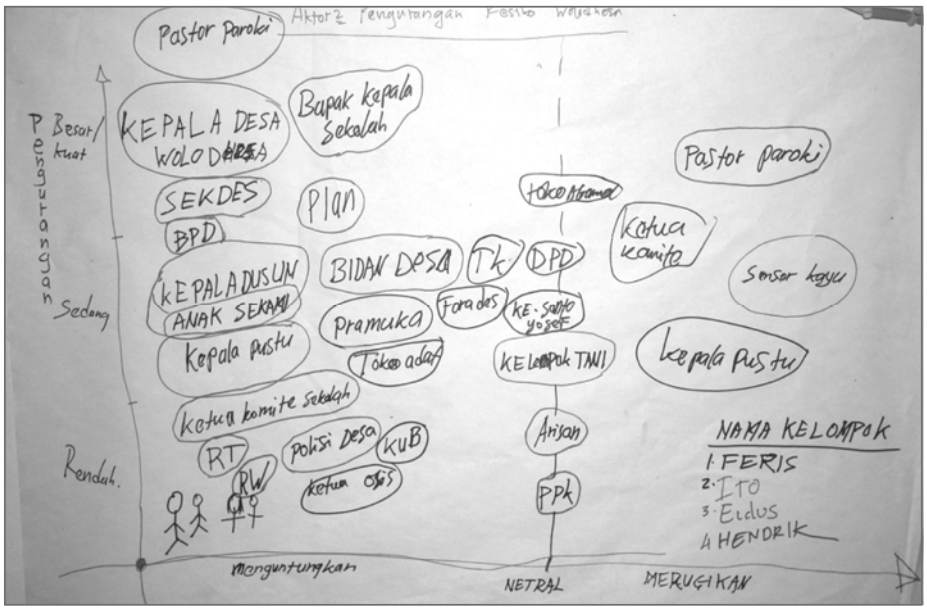

Gambar 2.8: Pengaruh dan Dampak Kuasa
(Sumber: Avianto Amri/Vanda Lengkong-Plan Indonesia, 2008)

2.13. ANALISIS SUMBER DAYA

Secara ringkas, analisis sumber daya yang dibutuhkan untuk PRBBK adalah: Sumber daya apa saja yang diperlukan? Sumber daya yang tersedia? Bila tersedia, apakah dapat diakses? Ya? Tidak? Mengapa tidak? Sumber daya apa yang perlu dihasilkan? Strategi untuk menghasilkan dan memobilisasi sumber daya: dapat diakses dan ditelurkan oleh pihak lain?

Tabel 2.4. Contoh Matrik Analisis Sumber Daya PRBBK

Aktivitas kunci reduksi risiko bencana di kampung	Sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut	Waktu yang diperlukan	Sumber daya yang tersedia, lokasi, kepemilikan, kontrol		Aksi dan intervensi untuk mengakses sumber daya yang tersedia	Cara untuk mengakses *gap*/celah sumber daya untuk PRBBK
			Yang dapat diakses	Yang tidak dapat diakses dan kenapa?		

Tabel 2.5. Contoh Matrik Modal dasar PRBBK

Modal dasar PRBBK		Sumber daya pendukung
Komponen	Materi	
Individu	Pikiran, tenaga, keterampilan, uang, dan waktu yang bisa diberikan?	• Sumber daya manusia: tenaga kerja, keterampilan, pengetahuan dan teknologi • Materi dan pengadaan seperti P3K, HP, material bangunan, aset cair lainnya • Peralatan: komunikasi dan transportasi, radio, TV, HP, truk, traktor, dsb. • Fasilitas: gudang, rumah besar yang bisa dipakai untuk evakuasi, surau, bangunan sekolah/pemerintah • Kepemimpinan dan organisasi • Uang
Kelompok	Aset-aset kelompok yang tersedia dan bisa digunakan/disumbangkan	
Institusi lokal	LSM/NGOs, sekolah, Puskesmas, dan aset-aset yang bisa disumbangkan untuk reduksi bencana di kampung	
Pemerintah desa	Perdes, program desa, serta aset desa yang bisa digunakan untuk reduksi bencana di desa	
SDA dan kondisi fisik geografis	Tanah desa, air, topografi yang tinggi relatif terhadap genangan banjir dan tsunami, kondisi jalan, SDA terbarukan (biogas), dsb.	

2.14. PETA PIKIRAN

adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak, metode ini adalah cara mencatat ang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran kita. Metode ini adalah metode yang sederhana. Manfaatnya adalah membantu fasilitator untuk berkomunikasi secara cepat, menjadi lebih kreatif, menghemat waktu, menyelesaikan masalah, memusatkan pikiran, menyusun dan menjelaskan pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar lebih cepat dan efisien, fokus pada satu pokok bahasan dan membantu untuk menunjukkan hubungan bagian informasi yang saling terpisah dan memungkinkan fasilitator mengelompokkan konsep dan membandingkannya.

Pada analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas, perangkat peta pikiran ini dapat digunakan di awal kegiatan untuk membangun hubungan dan menciptakan suasana antara fasilitator dan para peserta, dan untuk mengetahui latar belakang, pengalaman dalam bencana, dan informasi lainnya. Peta pikiran ini dapat digunakan untuk semua tahapan umur.

Gambar 2.9. Peta pikiran
(Sumber: Avianto Amri/Vanda Lengkong – Plan Indonesia 2008.)

Salah satu contoh dari peta pikiran adalah yang bertujuan untuk mengeksplorasi informasi mengenai nama dan umur peserta, pekerjaan orang tua, kegiatan sehari-hari, hal yang paling ditakuti dan mengapa, pengalaman menghadapi bencana, jumlah anggota keluarga, serta pendidikan terakhir.

Berdasarkan pengalaman, bila melibatkan anak-anak, maka akan menarik untuk menggunakan alat ini. Umumnya, anak-anak di atas umur 10 tahun, sudah mampu menggunakan alat ini.

2.15. ANALISIS BAHAYA, KERENTANAN, DAN KAPASITAS (ABKK)

Kerentanan disebabkan oleh banyak faktor dan ada ragam definisi tentang kerentanan. Di buku ini, kerentanan bisa dipahami sebagai kelemahan terhadap ”external shocks”, derajat kehilangan, atau kerusakan yang mungkin terjadi ketika kejadian ekstrem terjadi, tidak berfungsinya fungsi-fungsi normal berkaitan dengan bencana, karakteristik orang/kelompok dalam hal kapasitas mereka dalam mengantisipasi, menghadapi, atau melawan dampak bencana alam dan tekanan non-alam lainnya.Tetapi bisa juga dipahami sebagai ketidakmampuan suatu unit keluarga atau masyarakat untuk menanggulangi korban jiwa, kerugian, kerusakan, dan gangguan yang timbul akibat terjadinya

suatu ancaman yang terjadi secara periodik, siklikal, mendadak, perlahan, maupun jangka pendek/panjang.

Bila risiko bencana adalah komposit atau gabungan dari aspek kerentanan, kapasitas, dan ancaman (*hazard*) maka selanjutnya yang diperlukan adalah pemetaan persepsi komunitas tentang risiko. Latihan ini dikenal dengan nama rangking risiko (*risk ranking*) yang dilakukan oleh komunitas dengan pemandu fasilitator PRBBK.

Tabel 2.6. Contoh Matriks Analisis Ancaman

Jenis Ancaman (contoh)	Faktor Pendorong	Tanda peringatan	Peringatan Awal	Kecepatan terjadi	Frekuensi	Kapan	Durasi
Banjir							
Kekeringan							
Gempa bumi							
Konflik							
Longsor							
Polusi							
Wabah penyakit							

Tabel 2.7.Tingkat Risiko dengan Basis Ancaman (Desa Ie Rhop)

Ancaman	Frekuensi	Keluasan Masalah	Besaran Dampak	Nilai/ Peringkat
Banjir	5	5	4	14 / I
Diare	5	3	3	11 / II
Konflik	2	4	5	11 / II
Gatal-gatal	5	2	3	10 / III
Tsunami	1	3	5	9 / IV
Gelombang Pasang	5	2	2	9 / IV

Identifikasi dari Tabel 2.6, selanjutnya diturunkan dalam bentuk tingkat

kuantitatif dengan skala 1—5. Caranya bisa dengan menggunakan batu-batu kecil atau daun. Contoh, bila banjir adalah masalah yang dari sisi keberulangan dan keluasan masalah sangat tinggi, maka pembobotan diberikan nilai 5. Menariknya adalah, masalah-masalah keseharian seperti gatal-gatal menjadi lebih krusial ketimbang tsunami sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.7.

Hasil Tabel 2.7 memberikan indikasi tegas bahwa skala prioritas risiko komunitas akar rumput seringkali berbeda dengan prioritas risiko yang dikenal secara formal oleh organisasi formal baik pemerintah maupun LSM. Gambar 2.10 mengilustrasikan secara cermat bahwa kejadian ekstrem tapi tidak sering seperti tsunami seringkali tidak menjadi prioritas dalam daftar kebutuhan dengan skala prioritas yang kecil yang dihadapi dalam keseharian komunitas. Karenanya, mengenali skala prioritas komunitas akar rumput menjadi penting dan menjadi keharusan dalam PRBBK.

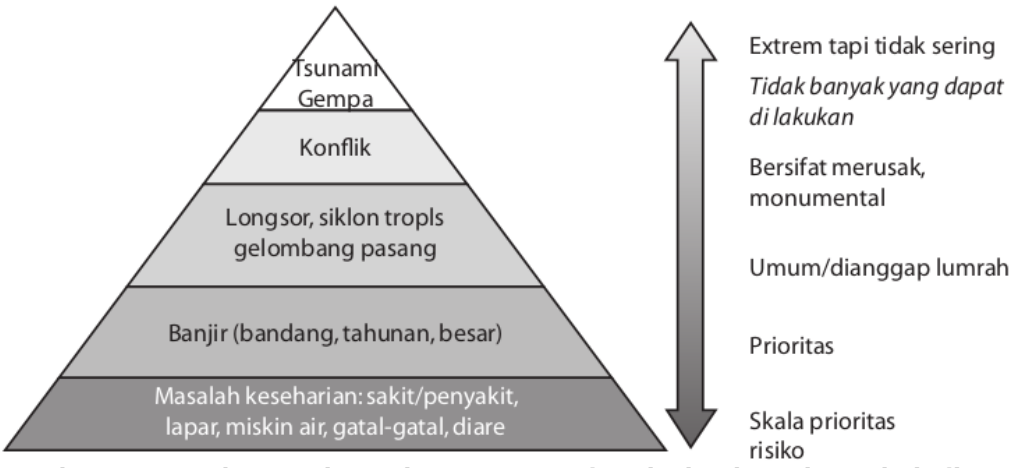

Gambar 2.10. Hubungan intensitas ancaman dan tingkat keseringan kejadian

Penelusuran kerentanan bisa kurang terlihat karena gejala-gejala jangka panjang. Ketika menyelidiki gejala-gejala ini, perlu dibedakan faktor-faktor yang cenderung berubah (baik arah maupun intensitasnya), dari yang tampaknya tidak berubah, sehingga penyesuaian sistem penghidupan lokal dapat dilakukan. Misalnya, banyak gejala-gejala ekonomi, seperti turunnya harga-harga riil

berbagai komoditas pertanian tropis dalam jangka panjang, relatif bisa diramalkan. Tetapi, gejala lainnya, bisa terimbas oleh perubahan yang tiba-tiba. Kita juga perlu mengetahui perbedaan-perbedaan antara gejala-gejala 'lokal' dengan gejala-gejala nasional atau yang lebih global.

	Kerentanan (*vulnerability*)		**Kapasitas (*capacity*)**	
	Perempuan ♀	Laki-laki ♂	Perempuan ♀	Laki-laki ♂
Fisik/material				
Sosial/kelembagaan				
Motivasi/sikap				

Gambar 2.11. Kerentanan Berbasis Gender, Sumber: Anderson dan Woodrow (1998: 12)

Kerangka analisis seperti VCA (Capacity and Vulnerability Analysis) membagi kerentanan dalam tiga bagian, yakni: pertama, kerentanan secara material (uang kontan, tanah, alat, makanan, pekerjaan, akses ke kredit/pinjaman uang), kerentanan secara sosial kelembagaan (jaringan sosial, relasi kekeluargaan, lembaga kesejahteraan setempat dan nasional), dan kerentanan sikap/motivasi (rasa percaya diri, mengendalikan, kekuasaan, kemampuan). Gambar 2.11 memberikan ilustrasi tentang bagaimana melihat kerentanan berbasis jender sedangkan gambar 2.12 merupakan matriks yang membantu melihat secara tegas tingkat kerentanan komunitas dari tingkat atau kelas ekonomi.

	Kerentanan *(Vulnerability)*			Kapasitas *(Capacity)*		
	Kaya	Sedang	Miskin	Kaya	Sedang	Miskin
Fisik/material						
Sosial/kelembagaan						
Motivasi/sikap						

Gambar 2.12. Kerentanan Berbasis Klas, Sumber: Anderson dan Woodrow (1998: 12),

Analisis kerentanan meliputi analisis sosial dalam pengertian klasik, saat kelompok-kelompok sosial tertentu serta hubungannya dengan faktor-faktor dalam konteks kerentanan bisa diidentifikasi. Meskipun mempersempit wilayah analisis adalah penting, kita perlu juga perlu berpikir secara luas tentang faktor-faktor dalam konteks kerentanan yang memengaruhi masyarakat setempat, sehingga masalah-masalah yang tidak tampak jelas tidak terabaikan. Sebagai contoh, ketika kita berpikir tentang seasonality, kita perlu memperhatikan efek-efeknya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Konteks merentankan menunjuk pada seasonality, gejala-gejala, dan kejadian-kejadian yang mengejutkan dan memengaruhi aspek penghidupan masyarakat. Ciri khas dari konteks ini adalah ia tidak bisa dikendalikan oleh masyarakat setempat, paling tidak dalam jangka pendek dan menengah. Oleh karena itu, penting mengidentifikasi cara-cara tidak langsung dengan mana efek-efek negatif dari konteks merentankan bisa diminimalkan, termasuk membangun ketahanan yang lebih baik dan meningkatkan keamanan penghidupan secara keseluruhan.

Langkah ini terutama penting bagi warga miskin, karena respons umum pada *seasonality* dan kejadian-kejadian bencana yang merugikan adalah mengamankan aset. Tetapi masyarakat yang marginal/miskin seringkali tidak mempunyai aset yang bisa dijual. Tidak adanya aset bagi mereka berarti bahwa mereka seringkali kurang mampu untuk melakukan tindakan-tindakan positif saat terjadi kejadian merugikan dibandingkan orang-orang kaya. Yang juga perlu diingat adalah bahwa kerentanan adalah fungsi waktu. Kerentanan masyarakat pada konteks tertentu berbeda pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kondisi yang terus berubah.

2.16. ALAT-ALAT LAIN:

- Tinjauan data sekunder: Mengumpulkan data yang relevan dengan masyarakat dari sumber yang dipublikasikan maupun tidak (peta, kliping, laporan-laporan, dll.) untuk mendapatkan gambaran awal tentang situasi

dan konteks.

- Drama, bermain peran, dan simulasi: memperagakan siapa yang terkena dampak, apa yang rusak pada saat bencana, atau bagaimana masyarakat mempersiapkan diri dan merespons ancaman tertentu.
- Diagram dan visualisasi: diagram dan visualisasi adalah representasi simbolik dari informasi dan merupakan elemen inti dalam analisis berbasis komunitas. Peta, model, diagram, matriks adalah perlengkapan belajar dalam membuat analisis, membuat perbandingan, membangun hubungan-hubungan serta kecenderungan.
- Matriks keuntungan berbasis gender: menunjukkan perbedaan akses dan kontrol terhadap keuntungan produksi berbasis gender. Peran memperlihatkan sumber-sumber dan kemampuan lokal, dan perbedaan jender dalam akses dan kontrol terhadap sumber-sumber tersebut, terutama pada kemampuan dan sumber lokal yang tersedia pada waktu bencana; serta sumber-sumber yang mudah terkena bencana.
- Sebab-akibat: aktivitas ini terutama dilakukan untuk mengetahui hubungan penyebab dan akibatnya. Diagram arah yang memperlihatkan hubungan antar berbagai aspek. Masalah kapasitas dan kerentanan merupakan masalah pokok aktivitas ini
- Lagu rakyat, cerita rakyat, dan puisi: mendapatkan informasi tentang pengetahuan, kepercayaan, dan kebiasaan dari lagu, cerita, dongeng, dan puisi.

3

PENGORGANISASIAN

3.1. PENGORGANISASIAN KOMUNITAS

Pengorganisasian komunitas atau masyarakat (*community organizing*/CO) pada dasarnya adalah serangkaian upaya membangun komunitas untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adil dari sebelumnya dengan mengacu pada harkat dan martabat kemanusiaan seutuhnya. Intisari pemikiran dalam pengorganisasian komunitas antara lain

- Komunitas memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri.
- Komunitas memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami.
- Upaya pembangunan komunitas akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen komunitas sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan.
- Komunitas memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran pembangunan mereka.

Secara umum pengorganisasian komunitas didefinisikan sebagai: "Proses membangun kekuatan dengan melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses menemukenali ancaman yang ada secara bersama-sama, menemukenali penyelesaian-penyelesaian yang diinginkan terhadap ancaman-ancaman yang ada; menemu-kenali orang dan struktur, birokrasi, perangkat/jajaran pemerintahan

yang ada agar proses penyelesaian yang dipilih menjadi mungkin dilakukan, menyusun sasaran yang harus dicapai, dan membangun sebuah institusi yang secara demokratis diawasi oleh seluruh konstituen sehingga mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada." (Dave Beckwith dan Cristina Lopez, 1997: 2-4.)

Tabel 3.1. Pokok-pokok pikiran dalam pengorganisasisan komunitas[2]

Strategi dan pendekatan pengorganisasian.	• Menggunakan pendekatan proses yang partisipatif. • Pendampingan yang intensif dan berkelanjutan. • Mengembangkan media komunikasi yang murah, mudah, dan bisa dimanfaatkan. • Penguatan simpul belajar untuk mengembangkan masyarakat sipil yang dinamis. • Mengutamakan potensi komunitas setempat.
Kriteria proses pengorganisasian	• Berakar pada sosial budaya. • Perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring bersama dengan komunitas secara partisipatif. • Adanya penghormatan/pengakuan hak-hak martabat orang kampung. • Fungsi dan manfaat sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan bencana. • Mengutamakan prakarsa komunitas untuk transformasi. • Upaya bertahap dan konsisten.
Prinsip dasar pengorganisasian	• Berpihak dan mementingkan komunitas. • Pendekatan holistik dan bukan kasuistik. • Bersikap independen dan mengembangkan rasa empati. • Adanya pertanggungjawaban pada rakyat. • Ada proses saling belajar. • Kesetaraan dan antikekerasan. • Mendorong komunitas untuk berinisiatif. • Musyawarah sebagai media komunikasi pengambilan keputusan dan menghindari intervensi. • Berwawasan ekosistem dan pengurangan bencana. • Praxis.

[2] Simpul Belajar Pengorganisasi Masyarakat. Catatan Pertama Pengalaman Belajar Praktik Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar. Bogor: Yayasan Puter, 2001, hlm. 28–30.

Tahapan kegiatan dalam proses pengorganisasian komunitas	• Melebur dengan komunitas (informasi awal; membangun contact person; menjalin pertemanan; memberitahukan kedatangan; terlibat sebagai pendengar; terlibat aktif dalam diskusi; ikut bekerja bersama-sama; monitoring dan evaluasi) • Penyidikan sosial (survei data primer dan sekunder; analisis sosial; dokumentasi and publikasi; monitoring dan evaluasi) • Merancang kegiatan awal (mengumpulkan isu; musyawarah bersama; identifikasi masalah dan potensi; menentukan agenda bersama; dokumentasi proses; monitoring dan evaluasi). • Implementasi kegiatan (sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah pada • tahap sebelumnya, contoh: dialog, pelatihan, negosiasi, unjuk rasa, dll.). • Pembentukan organisasi rakyat. • Monitoring dan evaluasi menyeluruh • Refleksiaksi.

3.2. PRBBK SEBAGAI PERENCANAAN SOSIAL

Pada tahun 1970 Rothman dan rekan (Rothman dkk.,1995) membahas tentang pekerjaan dengan komunitas dan menyandingkan tiga pendekatan yaitu pengembangan komunitas, perencanaan sosial, dan aksi sosial. Bagian ini akan membahas Perencanaan Sosial yang digambarkan oleh Rothman. Kita akan menggunakan argumen-argumen penanggulangan bencana dengan menggunakan kerangka kerja perencanaan sosial untuk membangun bayangan batin tentang PRBBK.

Sementara akar masalah dari bencana mungkin saja berupa kondisi permasalahan komunitas yang komprehensif dan/atau struktur kekuasaan yang tidak adil, tetapi fokus pekerjaan penanggulangan bencana adalah bencana itu sendiri, yaitu adanya ancaman, tingginya kerentanan dan kurangnya kapasitas komunitas. Maka ditinjau dari segi tujuannya, pekerjaan penanggulangan bencana lebih merupakan proses pemecahan masalah, yaitu ancaman dan dampak bencana, ketimbang pembangunan komunitas secara keseluruhan atau perubahan struktur kekuasaan dalam komunitas.

Tabel 3.2. Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (Rothman dkk., 1995)

No	*Variabel praktik*	*Perencanaan Sosial*
1	Kategori tujuan kegiatan komunitas	Pengurangan dan penanganan dampak bencana demi kelanjutan hidup dan tumbuh-kembang.
2	Asumsi tentang struktur komunitas dan kondisi masalah	Karakteristik tertentu kehidupan komunitas (kemiskinan, lokasi geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi) yang membuat mereka terpapar ancaman/bahaya bencana sementara kapasitas penanggulangan tidak memadai.
3	Strategi dasar perubahan	Mengumpulkan data tentang ancaman, kerentanan, dan kekurangan kapasitas dan membuat keputusan sesuai pilihan-pilihan tindak yang paling logis.
4	Karakteristik teknik dan taktik perubahan	Kebanyakan membangun konsensus, baik di antara segmen komunitas maupun dengan pihak swasta atau pemerintah yang memegang kekuasaan atau, apabila diperlukan, konflik.
5	Peran utama praktisi PRBBK	Pengumpul dan analis fakta, pelaksana atau pemacu program.
6	Medium perubahan	Memandu organisasi formal dan mengolah data ke arah penyusunan program penanggulangan bencana.
7	Sikap terhadap struktur kekuasaan	Pemerintah sebagai pemanggul tanggung jawab utama dan sponsor program penanggulangan bencana yang disusun oleh komunitas.
8	Pendefinisian batas dari sistem penerima manfaat	Segmen komunitas yang paling terpapar bencana dan/atau pemegang kekuasan dan kepentingan komunitas, dan pada situasi tertentu melibatkan keseluruhan komunitas.
9	Asumsi tentang intensitas sub-bagian komunitas	Orang-perorangan dan segmen-segmen komunitas mempunyai jejaring kepentingan yang dapat dipertemukan atau, pada saat tidak dicapai konsensus, konflik.
10	Cara pandang terhadap penerima manfaat	Pemerlu dan pengguna manfaat penanggulangan bencana.
11	Cara pandang terhadap peran benefisiari	Pihak yang rentan terhadap bencana tetapi tetap berpotensi menjadi pelaku perubahan.
12	Pemberdayaan	Mempelajari kondisi bencana: menginformasikan kepada komunitas tentang pilihan-pilihan strategi pengurangan dan penanggulangan dampak bencana yang tersedia.

Pekerja PRBBK lebih banyak menggunakan strategi pengumpulan data tentang bencana dan membantu para pelaku utama komunitas yang relevan dengan penanggulangan bencana untuk membuat keputusan-keputusan sesuai dengan pilihan tindak yang paling logis. Pada situasi-situasi tertentu saja pekerja PRBBK akan menggunakan proses-proses sosial untuk mencapai konsensus dengan keseluruhan segmen komunitas dan hanya dalam keadaan ekstrem saja mereka menggunakan strategi penggerakan massa untuk melawan struktur kekuasaan. Dalam proses penanggulangan bencana ini pelaku PRBBK memosisikan diri sebagai seorang "pakar" dan sekaligus pendamping yang memiliki kelebihan dan keterampilan khusus dalam hal pengumpulan dan analisis informasi yang dapat menjadi semacam konsultan bagi komunitas dalam penyusunan,pelaksanaan,atau percepatan program-program pengurangan atau penanganan dampak bencana.

Dinamika hubungan kekuasaan dalam PRBBK didasarkan pada asumsi bahwa negara adalah pemikul tanggung jawab (*duty bearer*) utama dalam penanggulangan bencana sementara komunitas adalah adalah pemilik hak (*right bearer*), pengguna dan pemerlu pelayanan sekaligus pelaku utamanya. Pada akhirnya harus disadari bahwa semua hasil dari perencanaan penanggulangan bencana oleh komunitas harus dijadikan upaya-upaya penanggulangan bencana yang perlu diprogramkan dalam rencana-rencana pembangunan dan didanai secara formal melalui APBD/APBN pemerintah atau pemerintah daerah.

Pihak-pihak yang dilibatkan kemungkinan besar adalah segmen-segmen khusus komunitas yang paling terkait dengan bencana yang dihadapi. Misalnya, kelompok warga yang paling rentan terpapar pada bencana, para pembentuk opini seperti pendidik, tokoh agama, adat, dan masyarakat, dan hanya pada situasi tertentu saja seperti pada saat kampanye informasi atau gladi bahwa keseluruhan komunitas dan masyarakat dilibatkan.

PRBBK memosisikan komunitas sebagai pemerlu dan pengguna penanggulangan bencana yang meskipun (justru karena) rentan maka mereka berpotensi

diberdayakan melalui proses-proses termasuk pendidikan tentang hubungan tanggung jawab pemerintah dan hak komunitas, keterampilan untuk mengelola informasi, pengambilan keputusan, dan pemrograman kegiatan penanggulangan bencana.

Pada titik ini, kita telah mengupas PRBBK sebagai suatu pendekatan dan model yang cukup berbeda dari pendekatan pengembangan komunitas, aksi sosial, ataupun pelayanan lapangan. Seharusnya sekarang kita sudah lebih awas dalam menggunakan istilah "berbasis komunitas" karena di dalamnya tersirat sikap mental, persepsi, strategi, dan taktik yang juga konsisten dengan ideologi PRBBK. Bagian berikutnya akan mengupas lebih dalam tentang proses-proses di mana aspek-aspek praktis itu akan diberdaya-gunakan.

3.3. PRBBK UNTUK RENCANA AKSI KOMUNITAS

Rencana Aksi Komunitas (RAK) berkembang dari usaha-usaha menjawab permasalahan dalam perencanaan pembangunan yang cenderung mengabaikan peran serta komunitas. RAK diarahkan untuk dapat menjawab kegelisahan adanya kecenderungan bahwa arus utama pembangunan yang cenderung beorientasi top-down dan tidak menjawab permasalahan-permasalahan yang mendasar berada di komunitas, dan bahkan membentuk ketimpangan dan ketidakadilan baru.

Kita ketahui bersama bahwa RAK merupakan alur proses partisipatif yang dilakukan untuk mendorong komunitas dalam melakukan rencana dan aksi. RAK merupakan proses perencanaan partisipatif yang yangat terstruktur. RAK secara konseptual mendorong komunitas untuk terlibat dalam setiap perencanaan pembangunan.

Tiga tahapan pokok dalam RAK yang kita ketahui adalah Pre-RAK, Lokakarya RAK dan Pasca-RAK. Pre-RAK lazimnya terdiri dari (1) tindakan-tindakan pengkajian partisipatif secara cepat untuk menggali persepsi komunitas atas permasalahan yang ada, (2) pengumpulan berbagai informasi untuk penyusunan dokumen profil

desa, (3) penyusunan peta desa dengan mengemukakan hasil pengkajian, (4) pertemuan Pre-RAK untuk pengagendaan Lokakarya RAK, (5) persiapan pematangan pelaksanaan Lokakarya RAK. Lokakarya RAK lazimnya terdiri dari (1) inventarisasi masalah-masalah yang terjadi di komunitas, (2) mengkaji dampak masalah bagi komunitas (3) penyusunan prioritas masalah dan tindakan penyelesaian masalah jangka pendek dan jangka panjang, (4) perencanaan tindak lanjut, (5) identifikasi tindak lanjut, (6) dan rencana aksi peredaman risiko. Pasca-RAK lazimnya terdiri dari (1) pelaksanaan dan perawatan (2) pendokumentasian, pengawasan dan penilaian serta (3) penyelesaian proyek serta (4) umpan balik untuk upaya yang lebih baik.

Sampai saat ini masih terkesan kuat bahwa penanggulangan bencana dan pembangunan merupakan hal yang terpisah, dan komunitas menjadi obyek riil pembangunan dan penanggulangan bencana tersebut. Peredaman risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) menempatkan pemahaman bahwa bencana merupakan dekontruksi sosial sehingga perlu penyelesaian pada akar masalah kerentanan dan pemahaman pada ancaman. Jika risiko bencana tersebut besar, maka bencana berpotensi terjadi.

Berkenaan dengan hal tersebut maka PRBBK mencari jawaban untuk terjadinya perubahan-perubahan struktural dan fungsional dalam komunitas yang berpusat pada analisis sosial dan ilmu pengetahuan. Struktur dan fungsi komunitas berorientasi pada mendorong kapasitas komunitas untuk dapat meredam kerentanan, memahami karakter ancaman dan membangun basis kemampuan atas ancaman dan kerentanan.

Hasil yang diharapkan pada PRBBK adalah perubahan struktur dan fungsi pada komunitas. Komunitas menjadi pembuat dan pengambil keputusan utama dalam penanggulangan bencana berdasarkan visi mereka sendiri dan persepsi mereka tentang tatanan sosial yang mereka inginkan. Komunitas mengambil peran sebagai manajer yang mengidentifikasi kebutuhan mereka sendiri, mendefinisikan

tujuan dan sasaran sendiri, melaksanakan, memantau dan menilai penanggulangan bencana yang mereka sendiri.

Titik pentingnya dalam PRBBK adalah, pihak luar memulai masuk untuk melakukan peredaman risiko bersama komunitas, dan pada akhirnya keluar karena komunitas telah mampu mengelola sendiri. Banyak variasi proses, namun lazimnya dilakukan dengan melalui sebagian atau seluruh tahapan berikut: (1) memilih komunitas sasaran, (2) membangun hubungan dan memahami komunitas, (3) analisis situasi dan kondisi serta menyusun profil komunitas, (4) meningkatan kapasitas dan memahami konteks; (5) pengkajian tingkat risiko bencana secara partisipatif, (6) perencanaan pengelolaan risiko bencana secara partisipatif, (7) pelaksanaan & pemantauan risiko bencana secara partisipatif, (8) evaluasi & umpan balik, (9) perluasan & integrasi. (10) pelembagaan & konsultatif.

3.4. PROSES PENGORGANISASIAN KOMUNITAS

Seperti telah dikemukakan pada paparan sebelumnya, bahwa penanggulangan risiko bencana oleh komunitas merupakan proses untuk mendorong komunitas di kawasan rawan bencana mampu secara mandiri menangani ancaman yang ada di lingkungannya dan kerentanan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu komunitas yang menghadapi risiko perlu terlibat secara aktif dalam identifikasi, analisis, tindakan, pemantauan dan evaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas mereka. Ini berarti bahwa komunitas menjadi pusat pengambilan keputusan dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko bencana.

Letak penting pengorganisasian komunitas adalah:

- Suatu kenyataan bahwa komunitas dalam banyak hal masih dianggap lemah dan kurang mempunyai kemampuan. Maka harus ada usaha peningkatan kapasitas dan media untuk melakukan perjuangan bersama. Demikian juga pada urusan kebencanaan komunitas terkena bencana “korban” selalu dianggap obyek dan tidak berdaya.

- Pengorganisasian perlu dipahami sebagai perjuangan bersama dalam penyeleseian masalah baik taktis maupun strategis, karena bentuk-bentuk penyeleseian secara individu akan lebih berat. Pada kasus bencana, kekuatan komunitas atau kelompok komunitas mempunyai arti yang sangat besar baik secara fisik maupun psikis.
- Keberhasilan dan kekuatan pengorganisasian akan mempengaruhi keberhasilan dan percepatan waktu dalam penyeleseian masalah.

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas ini secara teknik bisa dibedakan menjadi dua hal, yaitu:

- Peningkatan kapasitas ke dalam yaitu, peningkatan kapasiatas komunitas untuk memproteksi kemungkinan tekanan dari luar yang berpotensi merugikan atau ancaman. Misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan, pendampingan, pendidikan dan sebagainya.
- Peningkatan kapasitas keluar yaitu, peningkatan kapasitas komunitas yang diperoleh dengan melakukan bentuk-bentuk perjuangan ke pihak luar. Misalnya dengan mendatangi dewan perwakilan rakyat. Bentuk peningkatan kapasitas seperti ini akan mampu mempengaruhi pihak penekan dan juga meningkatkan posisi tawar komunitas dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam melakukan pengorganisasian komunitas, pelaku proses pemberdayaan komunitas dikenal sebagai *community organizer* (CO). Tantangan bagi seorang CO adalah, bagaimana dapat menemukan "pintu masuk" sehingga bisa menyatukan diri dan diterima dalam komunitas tersebut. Langkah ini akan membuat komunitas mau membuka diri dan bersedia bercerita tanpa rasa sungkan atau curiga. Akhirnya CO akan mengetahui persoalan, sejarah, potensi, dan segala aspek kehidpan komunitas yang akan didampinginya. Untuk melakukan proses ini misalnya dengan cara, tinggal di komunitas, mengikuti pertemuan-pertemuan, membangun empati (ikut merasakan apa yang dirasakan), komunikasi dengan tokoh dan sebagainya. Perlu juga diperhatikan tentang bahasa, budaya, kreatifitas dan fleksibilitas akan mempengaruhi. Menurut pengalaman, integrasi

membutuhkan waktu yang cukup lama, namun ini juga tergantung pada pembawaan dan pendekatan CO nya.

Dalam kerja-kerja pengelolaan bencana, pengorganisasian komunitas menjadi penting terutama untuk meningkatkan tingkat partisipasi komunitas dalam kerja-kerja pengurangan risiko bencana. Selain itu keterlibatan komunitas adalah sebagai subyek dan aktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dalam tahapan pengelolaan bencana.

Partisipasi komunitas merupakan suatu proses untuk memberikan wewenang lebih luas kepada komunitas untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) komunitas dalam kegiatan tersebut. Partisipasi komunitas bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah dengan cara lebih baik, dengan memberi peran komunitas untuk memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efesien, dan berkelanjutan. Partisipasi komunitas dilakukan mulai dari tahapan kegiatan pembuatan konsep, konstruksi, operasional-pemeliharaan, serta evaluasi dan pengawasan. Tingkat partisipasi komunitas dalam kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari 7 (tujuh) tingkatan yang didasarkan pada mekanisme interaksinya, yaitu: (1) penolakan; (2) berbagi informasi; (3) konsultasi tanpa komentar; (4) konsensus dan pengambilan kesepakatan bersama; (5) kolaborasi; (6) berbagi penguatan dan risiko; dan (7) pemberdayaan dan kemitraan. Lebih lanjut tingkat partisipasi ini dapat diperkuat dari kecenderungan partisipasi yang bermakna ”untuk komunitas, menjadi ”bersama” komunitas, dan akhirnya ”oleh” komunitas.

Ada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan aktor dalam proses pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Pemangku kepentingan pengelolaan bencana secara umum dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) penerima manfaat, komunitas yang mendapat manfaat/dampak secara langsung

maupun tidak langsung, (2) intermediari, kelompok komunitas, lembaga atau perseorangan yang dapat memberikan pertimbangan atau fasilitasi dalam pengelolaan bencana antara lain: konsultan, pakar, LSM, dan profesional di bidang kebencanaan, dan (3) pembuat kebijakan, lembaga/institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum seperti lembaga pemerintahan dan dewan kebencanaan.

Penentuan dan pemilahan pemangku kepentingan dilakukan dengan metode Analisis Pemangku Kepantingan (*Stakeholders Análisis*) yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap proses yaitu: (1) identifikasi pemangku kepentingan; (2) penilaian ketertarikan pemangku kepentingan terhadap kegiatan penanggulangan bencana; (3) penilaian tingkat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder*; dan (4) perumusan rencana strategi partisipasi pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana pada setiap fase kegiatan. Semua proses dilakukan dengan cara mempromosikan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan potensi komunitas untuk secara aktif berpartisipasi, serta menyediakan kesempatan untuk ikut bagian dan memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan penanggulangan bencana.

PANDUAN
PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

DAFTAR ISTILAH PENANGGULANGAN BENCANA

DAFTAR ISTILAH
TERKAIT PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Adaptasi [perubahan iklim]: Penyesuaian dalam sistem alam atau manusia dalam menanggapi rangsangan iklim aktual atau diharapkan atau efek mereka, yang moderat merugikan atau mengeksploitasi peluang menguntungkan.**

Analisis Risiko: Suatu metodologi untuk menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisis bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada dan dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan orang, harta benda, mata pencarian, dan lingkungan tempat mereka bergantung.

Ancaman bencana (1): (atau bahaya) situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan. (*hazard*)

Ancaman bencana (2): Suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.*

Ancaman Hidrometeorologi: Proses atau fenomena alam atmosfer, hidrologi atau oseanografi yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, kehilangan mata pencaharian dan jasa, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.
Ancaman atau bahaya hidrometeorologi termasuk siklon tropis (juga dikenal sebagai topan [*typhoons*] dan badai [*hurricanes*]), badai petir [*thunderstorms*], *hailstorms*, angin tornado, badai salju [*blizzards*], salju berat [*heavy snowfall*], longsoran [*avalance*], gelombang badai pesisir, banjir termasuk banjir bandang, kekeringan, gelombang panas dan mantra dingin. kondisi hidrometeorologi juga dapat menjadi faktor dalam bahaya lain seperti tanah longsor, kebakaran wildland, wabah belalang, epidemi, dan dalam transportasi dan penyebaran

bahan beracun dan material letusan gunung berapi.

Bencana (1): gangguan serius pada berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat, yang menyebabkan kerugian manusia, materi, ekonomi atau lingkungan yang tersebar luas, serta melampaui kemampuan manusia atau penduduk tersebut dalam mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. *Bencana merupakan sebuah fungsi dari proses risiko. Bencana merupakan hasil penggabungan dari bahaya, kondisi yang rentan, dan tidak cukupnya kapasitas atau tindakan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif dari risiko.* (*disaster*).**

Bencana (2): Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis*

Budaya aman: budaya dimana kesadaran risiko dan penerapan upaya-upaya atau langkah-langkah mengurangi risiko adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. [Perkumpulan Lingkar](*culture of safety*)

Evakuasi: Upaya yang dilakukan segera sebelum, saat dan atau setelah terjadinya bencana untuk penyelamatan penduduk yang terancam dan atau terkena bencana.*

Kampiun: Kampiun pengurangan risiko bencana adalah seseorang yang berpengaruh dan menaruh perhatian pada pengurangan risiko bencana. Orang ini bersedia melakukan tindakan untuk membuat pengurangan risiko bencana menjadi suatu prioritas. Seorang champion bisa merupakan petugas pemerintahan yang ditunjuk, seorang profesional dari berbagai bidang atau seorang aktivis masyarakat. Institusi atau bahkan negara juga bisa memegang peran sebagai Kampiun.* (*champion*)

Kapasitas (1): penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk, mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana (*capacity*).

Kapasitas (2): Kombinasi dari semua kekuatan, atribut dan sumber daya yang tersedia dalam sebuah komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mengurangi tujuan-tujuan yang disepakati.
Kapasitas dapat meliputi cara-cara prasarana dan fisik, institusio, kemampuan bertahan masyarakat, serta pengetahuan manusia, ketrampilan dan kemampuan kolektif seperti hubungan social, kepemimpinan dan manajemen. Kapasitas juga dapat dijelaskan sebagai kapabilitas. Pengkajian kapasitas merupakan sebuah istilah untuk mengacu pada proses peninjauan terhadap kapasitas sebuah kelompok dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendaki dan kesenjangan kapasitas diidentifikasi untuk tindakan lebih jauh.**

Kapasitas bertahan: kemampuan orang, organisasi dan system dalam menggunakan ketrampilan dan sumber daya yang terseda untuk menghadapi dan mengelola kondisi-kondisi yang merugikan, keadaan darurat atau bencana.
Kapasitas untuk bertahan memerlukan kesadaran terus menerus, sumber daya dan pengelolaan yang baik baik di waktu-waktu normal serta selama krisis atau kondisi yang merugikan. Kapasitas bertahan berperan dalam pengurangan risiko bencana.** (*Coping capacity*)

Kerentanan: Karakteristik dan situasi sebuah masyarakat, system atau asset yang menjadikannya rawan terhadap dampak-dampak merugikan yang ditimbulkan ancaman bahaya.** (*vulnerability*)

Kesiapsiagaan (1)**:** serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.* (*preparedness*).

Kesiapsiagaan (2): Aktivitas pra-bencana yang dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko bencana dan berdasarkan analisa risiko yang baik. Hal ini mencakup pengembangan/ peningkatan keseluruhan strategi kesiapan, kebijakan, struktur institusional, peringatan dan kemampuan meramalkan, serta rencana yang menentukan langkah-langkah yang dicocokkan untuk membantu komunitas yang berisiko menyelamatkan hidup dan aset mereka dengan cara waspada terhadap bencana dan melakukan tindakan yang tepat dalam mengatasi ancaman yang akan terjadi atau bencana sebenarnya. [UN OCHA]

Ketangguhan: Kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang terpapar ancaman bahaya untuk beradaptasi dengan cara menolak, menyerap, mengakomodasi dan pulih dari dampak sebuah ancaman bahaya tepat pada waktunya dan dengan efisien, termasuk dengan memelihara dan memulihkan fungsi-fungsi dan struktur-strukturnya yang paling mendasar.** (*resilience*)

Komunitas: unit organisasi sosial yang berbasis pada minat/kepentingan yang sama (misal: komunitas akademis), daerah tempat tinggal/residensial yang sama (rukun tetangga, rukun warga), atau wilayah hukum (desa, kelurahan, kecamatan, dsb). dalam pengertian yang lain adalah kelompok masyarakat yang dapat mempunyai satu atau dua kesamaan seperti misalnya tinggal di lingkungan yang sama, terpapar ke risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena dampak suatu bencana, yang pada akhirnyamempunyai masalah, kekawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana.

Mitigasi: serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.* (*mitigation*).

Pemanasan bumi: meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer akibat aktivitas manusia di berbagai belahan dunia, menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Akibatnya, suhu rata-rata di seluruh permukaan bumi

meningkat.

GRK adalah CO2, CH4 dan N2O. Gas-gas ini dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil di sektor energi, transportasi dan industri. Sementara gas seperti HFCs, PFCs dan SF6, yang dihasilkan terutama dari industri pendingin (freon) dan penggunaan aerosol, "hanya" menyumbang kurang dari 1% total emisi GRK. Walaupun hanya 1% tetapi gas-gas tersebut punya potensi pemanasan yang jauh lebih tinggi dibanding gas CO2, CH4 dan N2O; yang pada akhirnya jumlah yang diemisikan pun tak beda dengan gas CO2, CH4 dan N2O.

Pembangunan berkelanjutan: Pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan kapasitas: usaha-usaha untuk mengembangkan keahlian manusia atau infrastruktur kemasyarakatan didalam komunitas atau organisasi yang diperlukan untuk mengurangi tingkat risiko. Pembangunan-kapasitas juga termasuk pengembangan kelembagaan, keuangan, politik dan sumber daya – sumber daya lain seperti teknologi pada tingkat dan sektor masyarakat yang berbeda-beda. (*capacity development*)

Pemulihan: serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.* (*recovery*).

Penanggulangan Bencana: serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.*

Pencegahan: Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan

ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.* (*prevention*).

Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (1): Pendidikan untuk Pengurangan risiko bencana. usaha sadar dan terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayaan peserta didik dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana dan membangun budaya aman serta tangguh terhadap bencana.

Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (2): Sebuah proses pembelajaran bersama yang bersifat interaktif di tengah masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada. Cakupan pendidikan pengurangan risiko bencana lebih luas daripada pendidikan formal di sekolah dan universitas. Termasuk di dalamnya adalah pengakuan dan penggunaan kearifan tradisional dan pengetahuan lokal bagi perlindungan terhadap bencana alam. [UN-ISDR]

Pengarusutamaan PRB: proses dimana pertimbangan-pertimbangan pengurangan risiko bencana dikedepankan oleh organisasi/individu yang terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan ekonomi, fisik, politik, sosial-budaya suatu negara pada level nasional, wilayah daerah dan/atau lokal; serta proses-proses dimana pengurangan risiko bencana dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Proses memasukkan berbagai pertimbangan PRB ke dalam kerangka strategis jangka menengah dan struktur-struktur kelembagaan, ke dalam kebijakan dan strategi suatu daerah dan sektor, juga ke dalam perancangan proyek-proyek/kegiatan-kegiatan di suatu lokasi (*DRR mainstreaming*).

Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (disingkat PRBBK): pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola risiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan risiko bencana yang dihadapinya, melakukan prioritas penanganan/ pengurangan risiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya

pengurangan bencana

Pengurangan risiko bencana (disingkat PRB) (1): konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor-faktor penyebab dari bencana termasuk dengan dikuranginya paparan terhadap ancaman, penurunan kerentanan manusia dan properti, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijaksana, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan (*disaster risk reduction*).**

Pengurangan risiko bencana (2): Serangkaian upaya penanggulangan bencana (pra, saat maupun paska bencana) yang menekankan pada pengurangan dampak bencana.*

Penyadartahuan masyarakat: Proses-proses penginformasian masyarakat umum, peningkatan tingkat kesadaranmengenai risiko dan bagaimana masyarakat dapat bertindak mengurangi eksposur mereka terhadap bahaya. Hal inipenting khususnya bagi para pejabat publik untuk memenuhi tanggung jawab mereka menyelamatkan nyawa danproperti pada saat terjadi bencana. Kegiatan penyadaran publik menumbuhkan perubahan-perubahan perilaku yangmengarah ke budaya pengurangan risiko. Ini melibatkan informasi masyarakat, sosialisasi, pendidikan, siaran-siaranradio atau televisi dan penggunaan media cetak, juga pendirian pusat-pusat informasi dan jaringan dan aksi-aksi komunitas dan partisipasi.** (*public awareness*)

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana, mencakup tanggap darurat, pemulihan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan (*disaster management conduct*).

Perencanaan Kontinjensi: Suatu proses manajemen yang menganalisis potensi kejadian tertentu atau situasi yang muncul, yang mungkin mengancam masyarakat atau lingkungan hidup; dan menetapkan pengaturan di muka untuk

memungkinkan respon yang cepat, efektif dan tepat terhadap kejadian dan situasi tersebut.** (*contingency planning*)

Peringatan dini (1): serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.*

Peringatan dini (2): Serangkain kapasitas yang diperlukan untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi peringatan yang bermakna tepat pada waktunya agar perorangan-perorangan, masyarakat, dan orgainasi-organisasi yang terancam bahaya bisa bersiap dan bertindak secara semestinya dan dengan waktu yang memadai untuk mengurangi kemungkinan kerugian dan korban jiwa/cedera (*early warning*).

Definisi ini meliputi berbagai factor yang diperlukan untuk mewujudkan tanggapan yang efektif terhadap peringatan. Sebuah sistem peringatan dini yang berpusat pada masyarakat mesti terdiri dari empat elemen utama: pengetahuan tentang risiko, analasis dan peramalan tentang ancaman bahaya; komunikasi atau penyebaran peringatan dan pesan siaga; dan kemampuan setempat untuk merespons pada peringatan yang diterima. Istilah "peringatan dini yang menyeluruh yaitu dari ujung ke ujung" juga digunakan untuk menekankan bahwa sistem-sistem peringatan dini perlu menjangkau semua langkah mulai dari deteksi ancaman bahaya hingga respons masyarakat.**

Perubahan iklim: peristiwa meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsurunsur iklim lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

Rawan bencana: kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.*

Rehabilitasi: perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.* (*rehabilitation*)

Rekonstruksi: adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.* (*reconstruction*)

Risiko Bencana: Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.* (*disaster risk*)

Tanggap darurat: serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.* (*emergency response*)

Sumber : * UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
** UNISDR 2009

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Arnstein, Sherry R. 1969 “A Ladder of Citizen Participation,” JAIP, Vol. 35, No. 4, hal. 216-224.

Ariyabandhu. 1999. *Defeating Disasters*. Colombo: Intermediate Technology Development Group (Duryog Nivaran), IDNDR Closing Seeion.

UNISDR. 2004. *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives.* Geneva: United Nations Publications

Bautista Victoria A., & Nicolas Eleanor E. 1996. *Primary Health Care: Book of Reading*. Manila: College of Public Administration UP.

Bertens, K. 2005. *Etika: Seri Filsafat Atmajaya 15.* Cetakan 9. Jakarta: Gramedia.

Blaikie et. al. 1994. *At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters*. London: Routledge.

Boli, Yoseph et.al. 2004. *Panduan Penanganan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat*. Kupang: FKPB.

Buzan, Tony. 2007. *Buku Pintar Mind Map*. Jakarta: Gramedia

Cahyo S. 2008. *Materi Fasilitasi dalam Konteks PRB: Pelatihan untuk Fasilitator PRB*. Bappenas—UNDP—ERA, 24—26 Juni 2008. Hotel Lor In, Solo, Indonesia. Unpbulished

Cannon, Terry. 1994. *Vulnerability Analysis and the Explanation of ‘Natural’ Disasters*. Chapter 2 (hal. 13—30) in Disasters, Development and Environment, A. Varley (ed.). London: Wiley.

Cohen, A. P. 1985. *The Symbolic Construction of Community* London: Tavistock. Cordaid. 2007. Membangun Ketahanan Masyarakat: Buku Panduan Pelatihan Mengenai Pengurangan Bencana Oleh Masyarakat.

Cuny, Frederick. 1983. *Disasters and Development*. OXFAM America, Oxford.

Dave Beckwith & Cristina Lopez. 2001. *Dalam Simpul Belajar Pengorganisasi Masyarakat, Catatan Pertama Pengalaman Belajar Praktik Pengorganisasian Masyarakat di Simpul Belajar.* Bogor: Yayasan Puter.

Dombrowsky. 1998. *Again and Again—Is a Disaster What We Call a'Disaster'*. Chapter 3 in What Is A Disaster. E. L. Quarantelli (ed.). London and NY: Routledge.

Dynes, Russell R. 1997. *The Lisbon Earthquake in 1755: Contested Meanings In The First Modern Disaster*. Newark, DE: University of Delaware, Department of Sociology and Criminal Justice, Disaster Research Center, Preliminary Paper.

Doocy, S. Gorokhovich,Y. Burnham, G., Balk, D. Robinson C. 2007. "*Tsunami Mortality Estimates and Vulnerability Mapping in Aceh, Indonesia*."American Journal of Public Health, Supplement 1, 2007, Vol. 97, No. S1.

Dynes, Russell R. 1993. "*Disaster Reduction: The Importance of Adequate Assumptions about Social Organization.*" Sociological Spectrum, Vol. 13.

Edi Suharto. 2006. "Filosofi dan Peran Advokasi Dalam mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat." Makalah Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhid.

Feltenbiermann, C. 2006."*Gender and Natural Disaster: Sexualized Violence and the Tsunami*." Development, 49(3), (hal. 82—86).

Fitrani, Fitria, Hofman, Bert and Kaiser, Kai. 2005."*Unity in diversity? The creation of new local governments in a decentralising Indonesia*." Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41: 1, 57—79.

Frazer, E. 1999. *The Problem of Communitarian Politics: Unity and Conflict.* Oxford: Oxford University Press.

Hart, Roger A. 1999. *Children's Participation*. London: Earthscan.

Imelda Abarquez & Zubair Murshed. 2004. *Community-Based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook*. Bangkok: ADPC

Jareed Diamond. 2004. *Collapse: Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. Viking Adult, First Edition.

Krishna S. Pribadi. 2008."Konsep Pelembagaan CBDRM." Slides disampaikan dalam Simposium PRBBK ke-4, Bali.

Koentjaraningrat. 1987. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.

Lassa, Nakmofa and Ramli. 2007. "Modul CBDRM Training for Aceh CSOs." Indosasters's Modules, 2007.

Lassa, Jonatan. 2008. *"The Rise of Risk—Where is the Resilience."* Makalah disampaikan dalam Mid Term Meeting OGB Prime. Yogyakarta.

Netting dkk. 1993. Social Work Macro Practice. New York: Longman.

Oxfam. 2005. "*The Tsunami's Impact on Women*." Oxfam International Briefing Note, March 2005.

Oliver-Smith, A. and Hoffman,S.M.1999. *The Angry Earth: Disaster in Anthropological Perspective.* London: Routledge.

Paripurno, Eko Teguh. 2006. Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana. Yogyakarta: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.

Paripurno, Eko Teguh. 2006. *Penanggulangan Bencana oleh Komunitas. Yogyakarta*: Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta.

Quarantelli. 1987. *"What Should We Study? Questions and Suggestions for Researchers About the Concept of Disasters."* International Journal of Mass Emergencies and Disasters (March), Vol. 5, No. 1. hal. 7-32.

Rogers, Lorge Beatrice and Kathy E. Macias. 2004. *"Program Graduation and Exit Strategies: Title II Program Experiences and Related Research."* TUFTs Nutrition Research Center, Discussion Paper No. 25.

Rothman, Erlich,Tropman and Cox Eds. 1995. Strategies of Community Intervention. Illinois: Peacock, Inc. 5th ed

Saragih, Bastian., Lassa, J., Ramli, A. 2007 "Kerangka Penghidupan Berkelanjutan." Draft Modul/Buku Pegangan Fasilitator SLA.

Seldadyo, Harr, Deli Sopian, Denny Julian, Retno Handini,Rullan Rinaldi, dan Wahyudi Romdhani. 2009. "Pemekaran Daerah dan Kesejahteraan Rakyat: Mencari Jalan Alternatif." BRIDGE Project UNDP Bappenas.

Steinberg. 2000. *Acts of God—The Unnatural History of Natural Disaster in America*. Oxford: Oxford University Press.

Twigg, J (2001) *"Physician, Heal Thyself? The Politics of Disaster Mitigation."* Benfield Greg Hazard Research Centre, University College London. Working Paper No. 1.

Twigg J. 2006.*"Disaster Early Warning Systems: People, Politics and Economics*." Benfield Hazard Research Centre Disaster Studies, Working Paper 16.

Twigg J. 2007."*Characteristics of Disaster-Resilient Community."A Guidance Note* Version 1, DFID Disaster Risk Reduction Interagency Coordination Group.

Thomas, David, N. 1983. *The Making of Community Work*. London: George Allen and Unwin.

UNHCR. 1996. Community Services in UNHCR Geneva.

Walhi. 2007. Berkawan dengan Ancaman: Strategi dan Adaptasi Mengurangi Bencana. Jakarta.

White, Kates and Burton. 2001.*"Knowing Better and Losing Even More: The Use of Knowledge in Hazards Management."Environmental Hazards*, Vol.3,Numbers 3—4. hal. 81—9.

Sumber lain:
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
MPBI 2005."Draft Prosiding Simposium I PRBBK." Belum dipublikasikan
MPBI 2006."Draft Prosiding Simposium II PRBBK." Belum dipublikasikan
MPBI 2007."Draft Prosiding Simposium III PRBBK." Belum dipublikasikan
MPBI 2008."Draft Prosiding Simposium IV PRBBK ." Belum dipublikasikan
MPBI 2009."Draft Prosiding Konferensi V PRBBK ." Belum dipublikasikan
MPBI 2010."Draft Prosiding Konferensi VI PRBBK ." Belum dipublikasikan
MPBI 2011."Draft Prosiding Konferensi VII PRBBK." Belum dipublikasikan

Dalam konteks Indonesia, dalam lima tahun terakhir telah beredar lebih dari 15 publikasi (belum terhitung yang tidak terpublikasikan) tentang atau berkaitan dengan PRBBK. Beberapa di antaranya:

- Terjemahan "Paket Pelatihan Analisis Kapasitas dan Kerentanan secara Partisipatif " oleh Oxfam UK (Edward Turvill & Honorio De Dios, 2010)
- Kumpulan Pengalaman CBDRM di Aceh (Affan Ramli, 2009)[1]
- Panduan Pengelolaan Risiko Bencana oleh Komunitas Peka Gender UNDPRA

[1] Menceritakan pengalaman PRBBK di Aceh oleh JKMA dan Perkumpulan Prodeelat.

Aceh (Paripurno, 2009)

- Panduan Desa Tangguh yang dikembangkan Projek ERA/UNDP-Bappenas, Desember (draft Desember, 2008).
- Kerangka Kerja Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (Puji Pujiono, 2008)
- PRBBK untuk CAP, GTZ GSLGR – MPBI (Paripurno, 2008)
- Manual CBDRM Training bagi CSO-CSO di Aceh dari Indosasters (2007)
- Penerapan PRA untuk Manajemen Bencana. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta (Paripurno, 2006a)
- Penanggulangan Bencana oleh Komunitas. Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta (Paripurno, 2006b)
- Panduan Umum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) yang diterbitkan oleh Yayasan IDEP (2004)
- Manual CBDRM PMPB Kupang (Yoseph Boli, dkk., 2004)
- Manual CBDRM oleh ADPC (Abarquez dan Murshed, 2004)—diterjemahkan Oxfam GB, 2008

Panduan ini disusun dan diterbitkan oleh **MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris** dengan dukungan **PSMB**, **Lingkar**, dan **UNDP-SCDRR.** **Panduan versi** bahasa Inggris diterjemahkan dari versi Bahasa Indonesia dengan dukungan **APADM** dan **Planas**